BADAN POM

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

BIRO KERJA SAMA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

2019

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk itu kami sajikan Laporan Kinerja Biro Kerja Sama tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban kinerja Biro Kerja Sama dalam akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerja sama di bidang Pengawasan Obat dan Makanan, guna mendukung pencapaian Visi Badan POM periode 2015-2019. Selain itu, disampaikan juga sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai di tahun 2019 beserta analisis, permasalahan, kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja kedepannya lebih optimal.

Kami berharap dengan Laporan Kinerja Biro Kerja Sama tahun 2019 yang telah kami susun, dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi, evaluasi kinerja, maupun sebagai pendorong dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Biro Kerja Sama Badan POM ditahun yang akan datang. Sehingga ke depannya Biro Kerja Sama dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi dalam pelaksanaannya.

Jakarta, Januari 2020

Kepala Biro Kerja Sama

Diana ES. Sutikno

RINGKASAN EKSEKUTIF

BIRO KERJA SAMA

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Biro Kerja Sama BPOM sebagai salah satu unit kerja di Sekretariat Utama BPOM memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Biro Kerja Sama, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Biro Kerja Sama dan upaya untuk melakukan evaluasi serta menentukan prioritas dalam perencanaan kinerja untuk mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.

Laporan Kinerja Biro Kerja Sama merupakan perwujudan akuntabilitas Biro Kerja Sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini memuat capaian kinerja selama tahun 2019 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2019.

Untuk mewujudkan visi dan misi BPOM, Biro Kerja Sama sebagai unit pendukung, sesuai tugas dan fungsi pada Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017, Biro Kerja Sama mempunyai 6 (enam) Sasaran kegiatan yaitu:

1) Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama;
2) Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional;
3) Meningkatnya Kerja Sama BPOM;
4) Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
5) Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST);
6) Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015-2019.

Sasaran program tersebut didukung oleh 8 Indikator dengan capaian IKU sebagai berikut:

1) Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama yang mencapai 100,63% dengan kriteria Baik;
2) Jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori BPOM yang mencapai 100% dengan kriteria Baik;
3) Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM yang mencapai 119,78%, dengan kriteria Sangat Baik;
4) Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerjasama BPOM yang mencapai 111,13% dengan kriteria Sangat Baik;
5) Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu yang mencapai 100% dengan kriteria Baik
6) Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu yang mencapai 100% dengan kriteria Baik.
7) Jumlah kawasan yang mendapat dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) yang mencapai 100% dengan kriteria Baik.
8) Nilai AKIP Biro Kerja Sama yang mencapai 89,35% dengan kriteria Cukup.

Pada tahun 2019, pagu anggaran Biro Kerja Sama pada Satuan Kerja Sekretariat Utama sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebesar Rp7.525.900.000,- (tujuh miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Dari total anggaran, terealisasikan sebesar Rp.7.509.180.269,- (tujuh miliar lima ratus sembilan ribu seratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) atau 99,78%.

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Biro Kerja Sama,harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain: menyusun kajian kerja sama, dalam rangka mendorong ekspor produk obat dan makanan, melakukan penjajakan kerja sama dengan regulatori negara mitra, peningkatan jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Kerja Sama, pemberian *reward* dan *punishment* terhadap pegawai, serta dilakukan intensifikasi pembinaan terhadap pegawai.

Laporan Kinerja Biro Kerja Sama ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal untuk mengetahui kinerja Biro Kerja Sama pada tahun 2019 untuk selanjutnya dapat memberi masukan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kerja Sama di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN 2

A. Maksud dan Tujuan 3

B. Peran Biro Kerja Sama berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 3

C. Struktur Organisasi Biro Kerja Sama 4

D. Analis Lingkungan Strategis 5

E. Isu Strategis Biro Kerja Sama 8

F. Analisa SWOT 13

G. Peran Biro Kerja Sama 14

BAB II PERENCANAAN KINERJA 17

A. Rencana Strategis 17

B. Tujuan Strategis 20

C. Sasaran Strategis 21

D. Perjanjian Kinerja 27

E. Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja 30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 34

A. Capaian Indikator Kinerja 34

A.1. Laporan Evaluasi atas Pelaksanaan Program dan Kegiatan 34

B. Analisis Capaian Kinerja 36

B.1. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama 36

B.2. Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional..... 38

B.3. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan..... 39

B.4. Meningkatnya Kerja Sama BPOM..... 42

B.5. Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)..... 49

B.6. Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015-2019..... 51

C. REALISASI ANGGARAN..... 55

C.1. Anggaran Program dan Kegiatan..... 55

C.2. Realisasi Anggaran Per-Program dan Kegiatan..... 56

D. Pengukuran Efisiensi Kinerja..... 58

E. Tindakan Korektif..... 59

F. Monitoring Dan Evaluasi..... 60

G. Potensi..... 60

BAB IV PENUTUP..... 64

A. Kesimpulan..... 64

B. Saran..... 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Kerja Sama sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017..... 5

Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Biro Kerja Sama..... 5

Gambar 1.3. Pegawai Berdasarkan Pendidikan..... 6

Gambar 1.4. Kebutuhan SDM Biro Kerja Sama Tahun 2019 Berdasarkan Beban Kerja..... 7

Gambar 1.5 Analisa SWOT..... 14

Gambar 1.6. Analisa Permasalahan Pokok dam Isu-Isu Strategis Biro Kerja Sama..... 15

Gambar 2.1. Visi, Misi, Tujuan BPOM, dan Sasaran Kegiatan Biro Kerja Sama..... 18

Gambar 2.2 Peta Strategi BSC Level 0 Kepala BPOM RI..... 19

Gambar 2.3 Peta Strategi BSC Level 1 Sekretariat Utama..... 19

Gambar 2.4. Peta Strategi BSC Level 2 Biro Kerja Sama BPOM RI..... 20

Gambar 3.1. Jenis Kegiatan Perjalanan Dinas..... 41

Gambar 3.2. Kerja Sama Dalam Negeri BPOM tahun 2019..... 46

Gambar 3.3. Capaian jumlah dokumen kerja sama BPOM..... 47

Gambar 3.4. Capaian Presentase Kerja Sama yang ditindaklanjuti secara efektif..... 48

Gambar 3.5. Penilaian AKIP Biro kerja Sama 2015 – 2019..... 52

Gambar 3.6. Perbandingan Nilai AKIP Biro Kerja Sama 2017, 2018 dan 2019..... 53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pegawai Biro Kerja Sama Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 6

Tabel 2.1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2018 – 2019..... 21

Tabel 2.2. Sasaran Kegiatan dan Alokasi Anggaran 2015 – 2019..... 22

Tabel 2.3. Program Kegiatan Biro Kerja Sama Tahun 2019..... 26

Tabel 2.4. Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019..... 29

Tabel 2.5. Kriteria Capaian Kinerja..... 31

Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Program Biro Kerja Sama Tahun 2019..... 34

Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama..... 36

Tabel 3.3. Pencapaian Sasaran Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional..... 38

Tabel 3.4 Pencapaian Sasaran Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan..... 40

Tabel 3.5. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kerja Sama BPOM..... 42

Tabel 3.6. Pencapaian Sasaran Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular..... 50

Tabel 3.7. Kategori Penilaian AKIP..... 51

Tabel 3.8 Pencapaian Sasaran Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015-2019..... 52

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Biro Kerja Sama tahun 2019..... 55

Tabel 3.10 Rencana Aksi Pelaksanaan Anggaran Biro Kerja Sama..... 56

Tabel 3.11. Realisasi Anggaran Biro Kerja Sama Per Komponen tahun 2019..... 56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Keputusan Kepala Biro Kerja Sama tentang Perubahan Rencana Strategis Biro Kerja Sama tahun 2015-2019..... 67

Lampiran 2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Biro Kerja Sama Tahun 2019..... 70

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi (RAPK) Kepala Biro Kerja Sama Tahun 2019..... 75

Lampiran 4. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2019…….. 78

Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Kegiatan…… 81

Lampiran 6. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan…… 85

Lampiran 7. Hasil pengukuran survei kepuasan Internal layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama Tahun 2019……... 112

Lampiran 8. Rekap hasil Survei Kepuasan Internal Biro Kerja Sama…… 113

Lampiran 9. Capaian Kerja Sama yang ditindaklanjuti secara efektif……... 122

Lampiran 10. Capaian Dokumen Kerja Sama Tahun 2019……... 126

BAB I
PENDAHULUAN
LAKIP BIRO KERJA SAMA TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mendukung agenda pembangunan nasional terutama agenda ke-5 yaitu "Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan menunjang Program Indonesia Sehat melalui Pengawasan Obat dan Makanan". Sebagai acuan untuk melaksanakan program prioritas tersebut, BPOM telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019 yang dijabarkan lebih lanjut pada Renstra Eselon I dan Renstra unit kerja.

Dalam memberikan dukungan bagi Pembangunan Nasional tersebut dan menjawab berbagai tantangan, BPOM RI telah diperkuat melalui perubahan organisasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Berkenaan dengan perubahan ini, BPOM telah merevisi Rencana Strategis (Renstra) baik pada tingkat organisasi (BPOM) yang dijabarkan lebih lanjut pada tingkat Satuan Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II.

Sesuai dengan peraturan tersebut, Biro Kerja Sama Luar Negeri mendapat penambahan tugas dan fungsi untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama dalam negeri, sehingga terdapat perubahan nomenklatur menjadi Biro Kerja Sama dengan ruang lingkup kerja sama luar negeri dan kerja sama dalam negeri. Biro Kerja Sama sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya menyusun perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Biro Kerja Sama untuk periode 2015-2019 yang disesuaikan dengan perubahan Renstra BPOM dan Sekretariat Utama. Renstra Biro Kerja Sama mempunyai nilai strategis dalam memberikan arah dan kebijakan kelembagaan baik organisasi, SDM dan Manajemen dalam rangka mendukung pencapaian pengembangan dan efektivitas jejaring kerja sama.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra, Biro Kerja Sama dituntut menerapkan akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja. Laporan Kinerja memuat penjelasan atas pencapaian setiap sasaran strategis yang ditetapkan dalam

renstra dan perjanjian kinerja termasuk aspek keuangan yang mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang digunakan dengan hasil dan manfaat yang diperoleh. Laporan kinerja Biro Kerja Sama Tahun 2019 dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan penyempurnaan kebijakan yang diperlukan. Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Tahun 2019 juga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kemajuan kinerja Biro Kerja Sama.

A. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2019 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Biro Kerja Sama selama tahun 2019. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

B. Peran Biro Kerja Sama berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017, Biro Kerja Sama mempunyai tugas “Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Obat dan Makanan”. Guna mendukung tugas tersebut, Biro Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan-selatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan-selatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Biro Kerja Sama sebagai unit organisasi yang strategis. Biro Kerja Sama senantiasa menjalankan tugasnya secara lebih profesional dan pro-aktif, sesuai dengan kewenangan dan tugasnya sebagai koordinator dan fasilitator kerja sama BPOM. Biro Kerja Sama dituntut memberikan dukungan manajemen dan mendorong kerja sama strategis sejalan dengan Renstra BPOM yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dan daya saing bangsa.

C. Struktur Organisasi Biro Kerja Sama

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Kerja Sama mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, memiliki 3 (tiga) struktur Eselon III dengan masing-masing 3 (tiga) struktur Eselon IV, sebagai berikut:

1. Bagian Kerja Sama Dalam Negeri
   a. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri I;
   b. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri II; dan
   c. Subbagian Tata Usaha.
2. Bagian Kerja Sama Bilateral, Selatan-Selatan, dan Triangular;
   a. Subbagian Kerja Sama Kawasan Asia-Pasifik;
   b. Subbagian Kerja Sama Kawasan Afrika dan Timur Tengah; dan
   c. Subbagian Kerja Sama Kawasan Amerika dan Eropa.
3. Bagian Kerja Sama Regional dan Multilateral; dan
   a. Subbagian Kerja Sama Regional I;
   b. Subbagian Kerja Sama Regional II; dan
   c. Subbagian Kerja Sama Multilateral.
4. Jabatan Fungsional

Secara lengkap, struktur organisasi Biro Kerja Sama ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Biro Kerja Sama sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017

D. Analis Lingkungan Strategis

1) Sumber Daya Manusia di Biro Kerja Sama

Data per 31 Desember 2019, jumlah pegawai Biro Kerja Sama BPOM seluruhnya adalah 36 (tiga puluh enam) orang, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) orang Aparatur Sipil Negara (ASN), 7 (tujuh) orang Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan staf pramubakti yang berjumlah 12 (dua belas) orang.

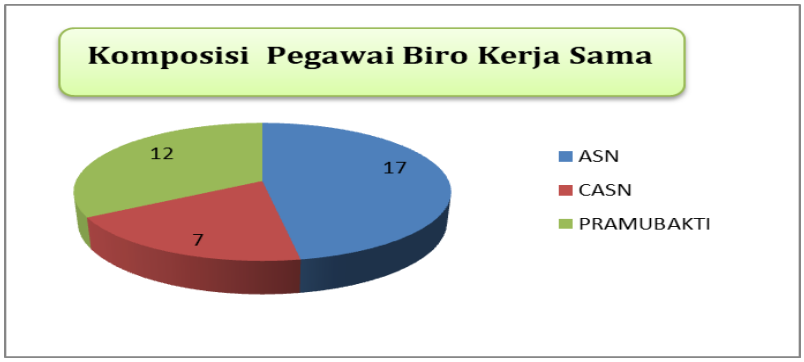

Gambar 1.2. Komposisi Pegawai Biro Kerja Sama

Jumlah pegawai Biro Kerja Sama berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Pegawai Biro Kerja Sama Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	ASN		CASN		Pramubakti	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
S2	9	37,5%	0	0	0	0
S1	6	45,8%	5	13,8%	10	83,3%
D3,D4 dan sarjana Muda	0	8,3%	2	2,7%	1	8,3%
D1 Kebawah	2	8,3%	0	2,7%	1	8,3%
Total	**17**	**47,2%**	**7**	**19,4%**	**12**	**33,3%**

Dari latar belakang pendidikan, 58% pegawai Biro Kerja Sama adalah sarjana, dan 275 % berpendidikan Pasca Sarjana (S2), dan 17% pendidikan Diploma dan SLTA.

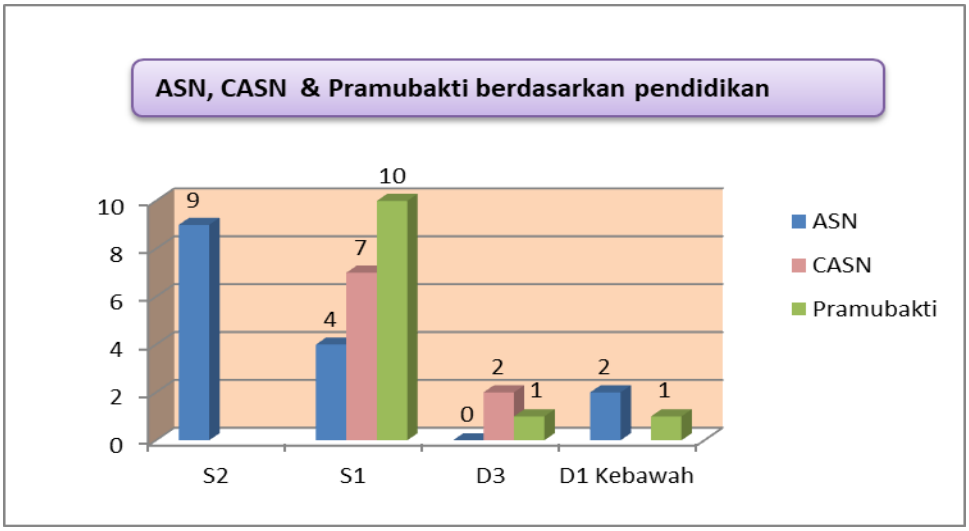

Gambar 1.3. Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Jumlah SDM Biro Kerja Sama tersebut belum memadai dan belum mendukung pelaksanaan tugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama BPOM baik dalam dan luar negeri. Kebutuhan pegawai Tahun 2019 berdasarkan Analisa Beban Kerja sebagaimana Gambar 1.4.

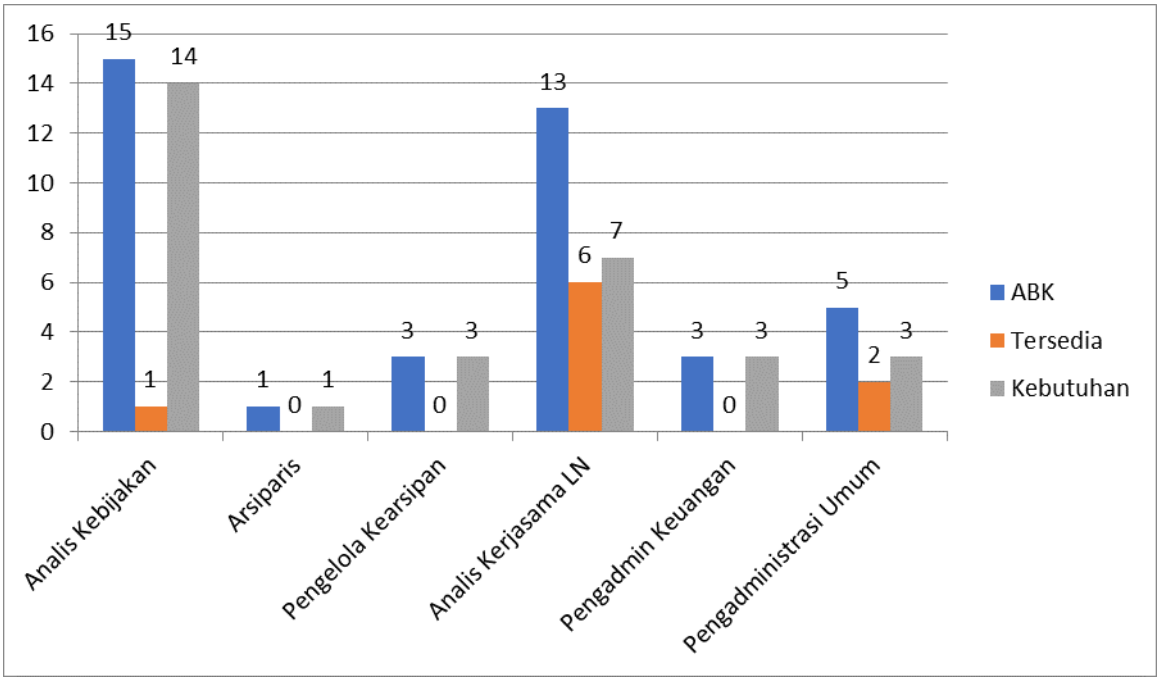

Gambar 1.4 Kebutuhan SDM Biro Kerja Sama Tahun 2019 Berdasarkan Beban Kerja

2) <u>Sarana dan Prasarana</u>

Biro Kerja Sama telah didukung dengan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas antara lain:

a. Ruang kerja yang terdiri atas Ruang Kepala Biro, Ruang Kepala Bagian dan serta ruang kerja staf.
b. Perangkat dan sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan aktivitas.
c. Peralatan dan meubelair dan kelengkapan lain untuk melaksanakan tugas.
d. Ruang rapat dan ruang arsip

3) <u>Anggaran</u>

Anggaran Biro Kerja Sama pada tahun 2019 sebesar Rp 7.525.900.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.509.180.269,- (99,78%).

E. Isu Strategis Biro Kerja Sama

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan multisektor yang perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, BPOM mengembangkan jejaring kerja sama baik dalam maupun luar negeri baik pada tataran bilateral, regional dan multilateral. BPOM berkerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan jajarannya, akademisi, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, *e-commerce*, organisasi masyarakat, mitra luar negeri, serta berperan aktif dalam forum internasional. Kerja sama BPOM, ditujukan untuk dukungan terhadap penguatan pengawasan obat dan makanan, peningkatan daya saing bangsa, pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat. Beberapa isu strategis kerja sama BPOM antara lain:

1) Globalisasi

   Globalisasi merupakan perubahan interaksi manusia secara luas yang mencakup banyak bidang dan saling terkait. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi, dan transportasi yang sangat cepat. Dampak tersebut mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional, khususnya kerja sama di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas (*Free Trade Area/FTA*) baik kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral. FTA membuka peluang perdagangan obat dan makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau sehingga terdapat risiko beredarnya obat ilegal maupun pangan mengandung bahan berbahaya. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan ekonomi dan kesehatan.

   Dampak globalisasi pada pembangunan ekonomi, dapat membuka peluang yang memungkinkan sejumlah produk obat dan makanan Indonesia lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang bergabung dalam perjanjian FTA. Hal ini juga membuka peluang bagi produk obat dan makanan negara anggota FTA untuk masuk ke Indonesia. Masuknya produk perdagangan bebas tersebut, merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk obat dan makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Perdagangan bebas juga membawa dampak pada penurunan derajat kesehatan yang dipicu dengan oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran akan kesehatan. Untuk itu, masyarakat perlu proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi obat dan makanan tersebut.

Globalisasi serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga berdampak pada semakin meningkatkan mobilitas manusia maupun produk, khususnya obat dan makanan (*borderless*). Untuk itu terdapat kepentingan untuk penguatan pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan koordinasi dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.

2) Perjanjian-perjanjian Internasional yang berdampak pada peran BPOM sebagai *Regulatory Authority*

Semakin meningkatnya perjanjian internasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan bebas (*Free Trade Area*/FTA) diantaranya *Indonesia – European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement* (I-EFTA CEPA), I-Australia CEPA, I-EU CEPA, I-Turkey CEPA, I-Iran *Preferential Trade Agreement* (I-I PTA), I-Tunisia PTA, I-Mozambique PTA, dan I-Bangladesh CEPA, ASEAN-*China FTA*, *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, *ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)*, *ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)* dan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)*, dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Perdagangan bebas ini membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini dapat menjadi potensi penyebab beredarnya produk ilegal dan tidak memenuhi ketentuan.

Sebagai *regulatory authority*, BPOM memiliki peran dan tanggung jawab memastikan produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia dan juga yang akan diekspor ke berbagai negara aman, bermutu, dan berkhasiat. Dalam kaitan ini, berbagai perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan berbagai negara juga melibatkan peran BPOM, khususnya dalam rangka memastikan produk obat dan makanan Indonesia dapat menjadi produk unggulan ke pasar internasional. Hal ini merupakan kontribusi penting BPOM dalam mendorong daya saing bangsa melalui keterlibatan aktif di berbagai perjanjian perdagangan.

3) Jejaring Kemitraan Kerja Sama semakin intensif

a) Jejaring kerja sama intensif di dalam negeri

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan multisektor yang perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, BPOM mengembangkan jejaring kerja sama baik dalam maupun luar negeri dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan

jajarannya, akademisi, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, organisasi masyarakat, pramuka, e-*commerce*, dll. Kerja sama ditujukan tidak hanya untuk peningkatan pengawasan obat dan makanan, tetapi juga meliputi peningkatan daya saing bangsa melalui berbagai pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat agar dapat menghasilkan produk nasional yang kompetitif.

b) Jejaring kerja sama intensif di luar negeri

BPOM menyadari dalam pengawasan obat dan makanan tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu BPOM mengembangkan kerja sama dengan stakeholder baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 2015-2018, BPOM telah berperan aktif dalam forum bilateral dengan lebih dari 20 negara, forum regional pada ASEAN, ASEAN + 1, RCEP, APEC, forum multilateral dan organisasi internasional pada forum WTO, WHO, Codex Alimentarius Commission, FAO, *Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Co-operation Scheme* (PIC/S), *International Crime Police Organization* (Interpol), *Commission Narcotics Nation* (CND), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dll. Jejaring kerja sama ini perlu penguatan karena karena belum semuanya berjalan efektif. Tantangan kedepan, BPOM harus membuat terobosan untuk memperkuat kemitraan dengan stakeholder terkait dalam pengawasan obat dan makanan.

4) Kerja Sama Selatan-Selatan di bawah Program Prioritas Nasional

Kerja Sama Selatan-Selatan BPOM senantiasa mendukung kebijakan politik luar negeri Indonesia, diantaranya adalah:

"Penguatan Diplomasi Ekonomi" diwujudkan oleh BPOM melalui agenda pelatihan regulator di bidang obat dan makanan dan pelaksanaan *Business Meeting* di sela-sela pelaksanaan Program KSS Palestina, Papua Nugini, dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Dalam hal ini, BPOM memberikan ilmu dan pengalaman terkait sistem pengawasan obat dan makanan kepada regulator obat dan makanan di ketiga negara tersebut, dengan harapan adanya kesamaan dalam penerapan pengawasan serta fasilitasi kemudahan izin masuk produk. BPOM juga mempertemukan pelaku usaha obat dan makanan tanah air dengan pelaku usaha serta otoritas regulator obat dan makanan negara penerima bantuan KSS. Upaya-upaya ini dilakukan untuk mendorong dan memfasilitasi ekspor serta ekspansi perusahan-perusahaan Indonesia di luar negeri.

Selain itu, BPOM juga turut membantu mewujudkan "Peningkatan Kontribusi dan Kepemimpinan Indonesia di Kawasan dan Dunia" melalui penyelenggaraan KSS Palestina secara berkelanjutan sejak tahun 2018. Melalui Program KSS BPOM untuk Palestina, Indonesia telah hadir untuk turut serta mendukung perkuatan kapasitas regulator pengawasan obat Palestina yang berfokus pada fungsi *pre-market evaluation* dan *post-market surveillance* dalam bentuk pelatihan dan konsultasi teknis. Hal ini dilakukan untuk membantu regulator Palestina dalam meningkatkan akses obat yang aman, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat Palestina.

5) Kerja sama penguatan pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Nasional

Dalam rangka penguatan Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2017, BPOM sebagai koordinator dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan mendorong peningkatan kerja sama BPOM dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, Inpres ini didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018, serta Instruksi Gubernur dan Walikota tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah. Melalui kerja sama ini telah dibentuk tim koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan serta alokasi anggaran daerah untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Selain itu, jejaring kerja sama dengan lintas sektor juga dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat agar menjadi konsumen cerdas dalam memilih dan menggunakan produk obat dan makanan. Untuk mendukung hal ini, BPOM juga bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat, termasuk dengan Gerakan Nasional Pramuka.

6) Kerja sama penguatan pengawasan Obat dan Makanan, terutama di wilayah perbatasan

Sebagaimana diketahui, Indonesia berbatasan langsung baik darat maupun laut dengan 10 negara, antara lain Malaysia, Timor-Leste, Papua Nugini, Singapura, Thailand, Palau, India, dan Australia. Tantangan di wilayah perbatasan adalah masih banyaknya produk ilegal atau yang tidak memenuhi ketentuan yang melewati perbatasan. Untuk itu, perlu peningkatan kerja sama dengan pemangku kepentingan di wilayah perbatasan, seperti PLBN, Dit. Jen. Bea Cukai, KKP, Pemda, dll. BPOM juga perlu meningkatkan terlibat dan berperan aktif pada forum-forum perbatasan, seperti JBC, BIMST, BTA, dll. Untuk itu, perlu meningkatkan koordinasi dengan perwakilan RI di wilayah

perbatasan dan peningkatan kerja sama bilateral dengan Regulatory Authority yang memiliki perbatasan dengan Indonesia.

7) Kerja sama penguatan pengawasan Obat dan Makanan di jalur daring (*online*)

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi digital dan revolusi industri 4.0, meningkatkan peredaran produk Obat dan Makanan secara *online* yang berbanding lurus dengan meningkatnya peredaran Obat dan Makanan ilegal/yang tidak memenuhi ketentuan secara daring. Terkait hal ini, BPOM telah menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti Kementerian Kominfo, idEA (asosiasi *e-commerce*), *Marketplace* (Tokopedia, Bukalapak, Halodoc, KlikDokter, Grab dan Gojek), ASPERINDO, dll. Ke depan, BPOM perlu mengembangkan kerja sama dengan platform media sosial, seperti dengan facebook, Instagam, twitter, dll.

8) Peningkatan daya saing (ekspor) produk Obat dan Makanan dengan keberpihakan pada UMKM

Perkembangan teknologi informasi dan revolusi industri 4.0 juga membuka pasar baik dosmetik maupun internasional. BPOM juga ditutut dapat mendukung sektor industri Obat dan Makanan terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk itu, BPOM perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerinta Daerah dan K/L terkait dalam hal pembinaan, pendampingan dan pemberdayaan UMKM, seperti dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri/Perwakilan RI di Luar Negeri dll. Selain itu, BPOM juga turut berperan dalam forum kerja sama perdagangan FTA, CEPA, PTA, dll, terutama di bidang standardisasi produk Obat dan Makanan. Diharapkan dengan kesesuaian atau kesamaan standard yang diberlakukan di Indonesia dan negara tujuan, memudahkan penetrasi produk Indonesia ke negara tujuan ekspor.

9) Penguatan regulasi Obat untuk mewujudkan kemandirian obat dan vaksin di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)

Dengan mempertimbangkan bahwa masih lemahnya Badan Otoritas Obat di negara-negara anggota OKI karena fasilitas fungsional yang rendah atau sebagian negara OKI tidak memiliki Badan Otoritas Obat, BPOM telah menginisiasi jejaring kerja sama antara Badan Otoritas Obat dan Makanan (NMRAs) negara-negara OKI. Hal ini diwujudkan dengan penyelenggaraan Pertemuan Pertama Kepala Badan Otoritas Obat dan Makanan negara-negara OKI pada tahun 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk

penguatan regulasi obat dalam rangka mewujudkan kemandirian obat dan vaksin di negara-negara OKI. Pertemuan telah menghasilkan Deklarasi Jakarta dan rencana aksi OKI yang telah diadopsi pada Pertemuan OKI tingkat Menteri Kesehatan (ICHM) di Abu Dhabi, Tahun 2019. Ke depan, BPOM akan terus mendorong pelaksanaan implementasi Deklarasi Jakarta dan Rencana Aksi OKI antara lain melalui Program KSS untuk Palestina dan negara-negara Islam.

10) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM BPOM

Kerja sama BPOM juga ditujukan untuk meningkatkan kapasitas SDM BPOM. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, SDM BPOM harus paham teknologi dan menjawab tantangan di bidang Obat dan Makanan. Hal ini dilakukan baik melalui kerja sama dalam negeri (dengan akademisi dalam negeri), kerja sama bilateral (melalui penjajakan kerja sama dengan *Harvard Kenedy School* (HKS), *Michigan States University* (MSU), *Massachusetts Institute of Technology* (MIT), dll), kerja sama regional (dalam forum APEC dan ASEAN) dan kerja sama multilateral (*grant agreement* WHO, JICA, USP, dll).

F. Analisa SWOT

Dalam menghadapi isu strategis di atas, Biro Kerja Sama telah melakukan identifikasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan melalui analisa SWOT, sebagaimana Gambar 1.5.

SWOT MATRIX	**Strenghts** 1. Dukungan dan komitmen Pimpinan yang tinggi 2. *Leadership* Kepala Biro Kerja Sama yang kuat; 3. Koordinasi internal dan eksternal yang terjalin cukup baik; 4. Sistem Manajemen Mutu yang diimplementasikan dengan baik; 5. Tersedianya sarana dan prasarana serta ruang rapat yang representatif.	**Weakness** 1. Jumlah SDM di Biro Kerja Sama belum sesuai dengan ABK; 2. SDM Biro Kerja Sama masih banyak yang belum menguasai Bahasa asing; 3. Koordinasi dalam penyusunan bahan kerja sama Kepala BPOM belum optimal; 4. Pemanfaatan teknologi sebagai media penyebaran informasi belum optimal; 5. Sarana dan prasarana layanan perkantoran belum memenuhi standar BMN.
Opportunities 1. Meningkatnya permohonan kerja sama dari pemangku kepentingan terkait; 2. Pemanfaatan kerja sama BPOM untuk perlindungan masyarakat dan peningkatan daya saing bangsa; 3. Cepatnya perkembangan teknologi sebagai media penyebaran informasi; 4. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung peningkatan kinerja.	• Meningkatnya kualitas layanan kerja sama; • Meningkatkan kepuasan internal dengan meningkatkan kualitas SDM yang kompeten; • Meningkatnya efektivitas kerja sama dalam pengawasan obat dan makanan serta peningakatan daya saing bangsa.	• Penyiapan panduan penyiapan bahan kerja sama Kepala BPOM; • Terpenuhinya sarana dan prasarana layanan untuk meningkatkan kepuasan internal dan pemangku kepentingan terkait terhadap layanan kerja sama; • Pemenuhan jumlah dan kapasitas SDM untuk meningkatkan kualitas layanan termasuk SDM.
Threats 1. Harmonisasi standard Obat dan Makanan 2. Pengurusan dokumen perjalanan dinas luar negeri untuk inspeksi	• Penyediaan panduan penyusunan perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri; • Penyediaan informasi persyaratan pengajuan perjalanan dinas luar negeri.	• Penyediaan aplikasi untuk mendukung capaian kinerja dan pemantauan kerja sama; • Penyediaan informasi kerja sama dan *up-dating* informasi untuk keterbukaan publik.

Gambar 1.5 Analisa SWOT

G. Peran Biro Kerja Sama

Berdasarkan isu strategis dan analisa SWOT, maka agar kerja sama BPOM dapat optimal dan memberikan manfaat maksimal, maka perlu didukung oleh peran Biro Kerja Sama dalam memberikan dukungan layanan manajemen kerja sama, meningkatkan koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama serta meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kerja sama BPOM.

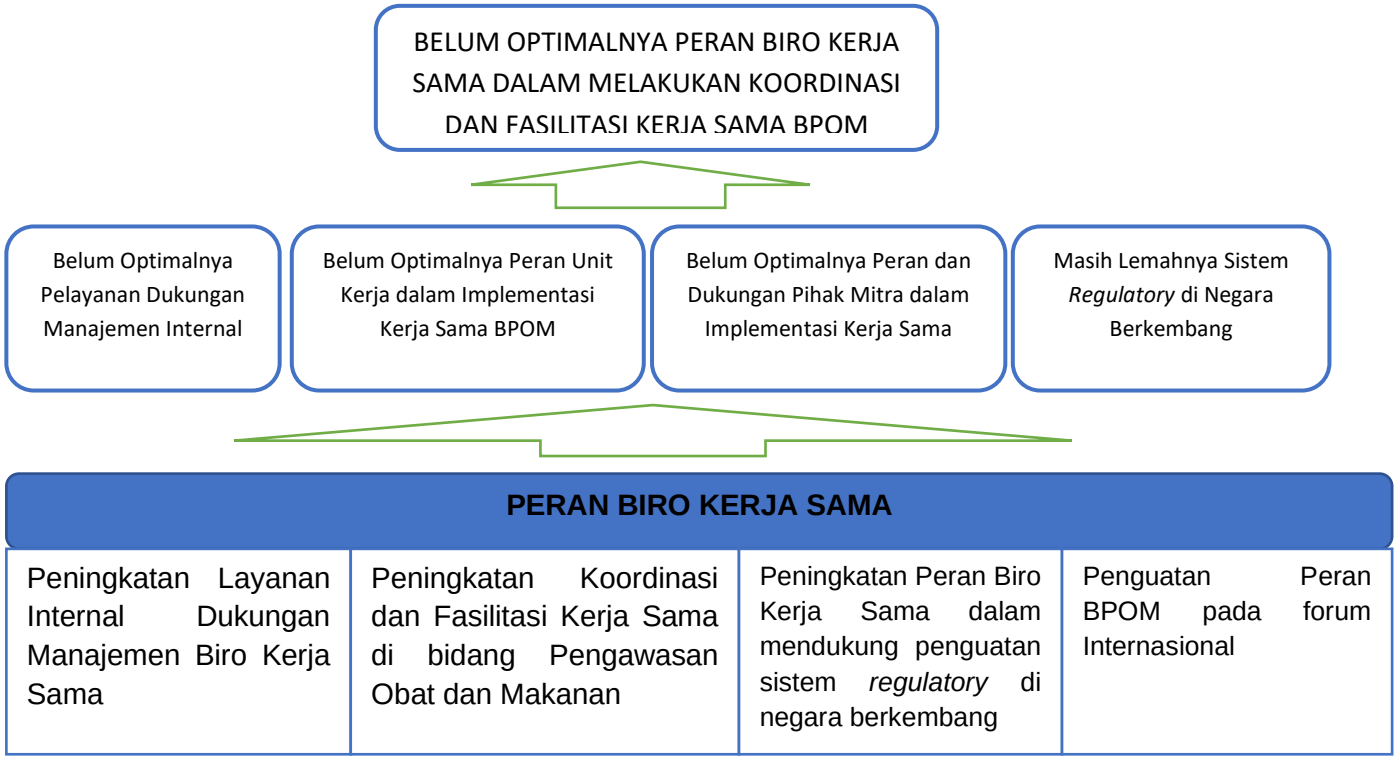

Gambar 1.6. Analisa Permasalahan Pokok dan Isu-Isu Strategis Biro Kerja Sama

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

LAKIP BIRO KERJA SAMA TAHUN 2019

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 memberikan amanat bahwa pembangunan kesehatan dan gizi bangsa Indonesia ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat. Salah satu upaya dalam pembangunan kesehatan dan gizi tersebut, perlu dilakukan peningkatan pengawasan obat dan makanan. Hal tersebut dituangkan dalam Visi dan Misi yang merupakan panduan dalam menjalankan tugas dan fungsi BPOM. Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan strategis (*strategic goals*) BPOM. Rencana pencapaian tujuan strategis BPOM lebih lanjut dituangkan dalam rencana strategis (Renstra). Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPOM sebagaimana Gambar 7.

Biro Kerja Sama sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai dukungan manajemen pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama BPOM guna mencapai visi, misi dan tujuan BPOM. Biro Kerja Sama merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerja sama di bidang Pengawasan Obat dan Makanan, guna mendukung pencapaian Visi, Misi dan Tujuan BPOM.

Visi, Misi dan Tujuan ini diuraikan lebih lanjut dalam Peta Strategis BPOM yang selanjutnya diturunkan pada level Eselon I (Sekretariat Utama) dan level Eselon II (Biro Kerja Sama). Sesuai dengan peta strategis tersebut, Biro Kerja Sama menunjang pencapaian sasaran strategis BPOM untuk “Mewujudkan Obat dan Makanan Aman dan Bermutu” melalui “Peningkatan Kerja Sama BPOM”.

Gambar 2.1. Visi, Misi, Tujuan BPOM, dan Sasaran Kegiatan Biro Kerja Sama

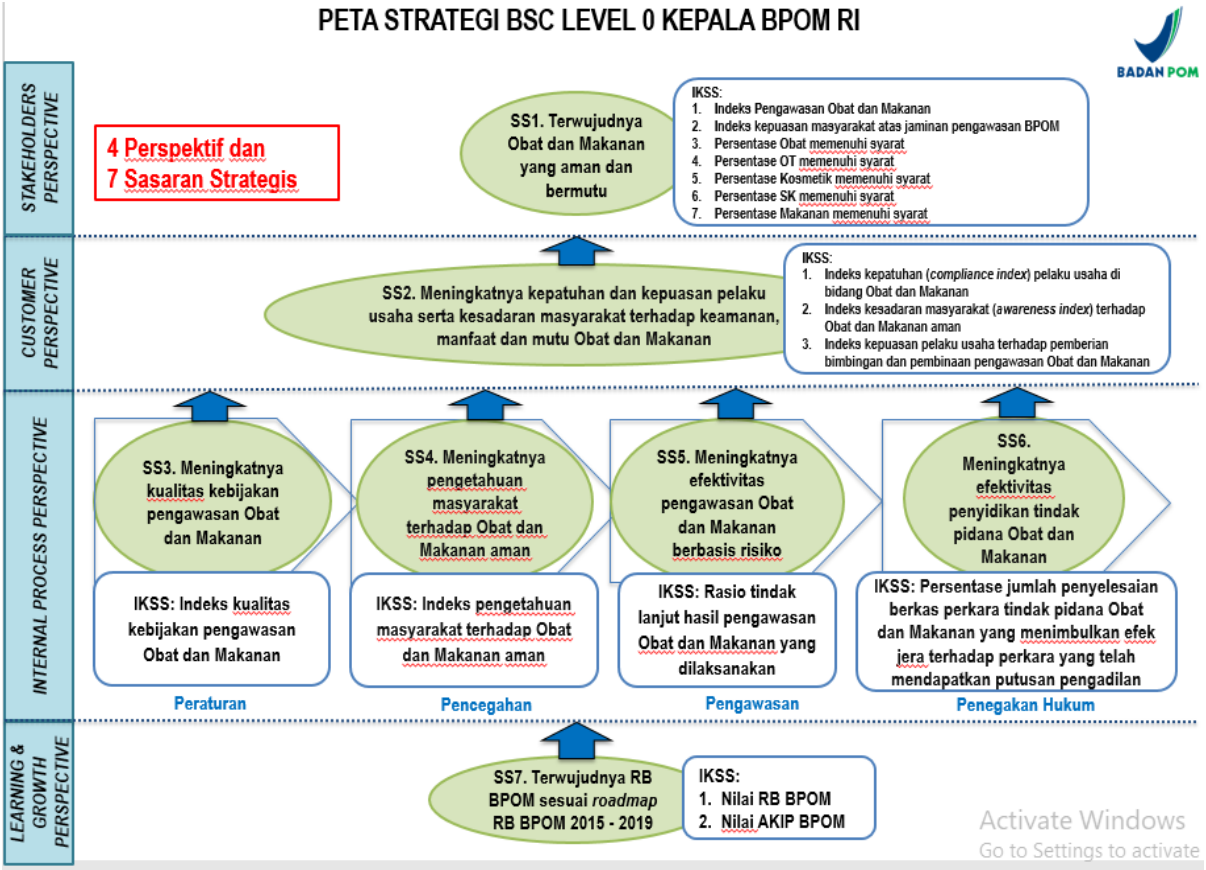

Gambar 2.2. Peta Strategi BSC Level 0 Kepala BPOM RI

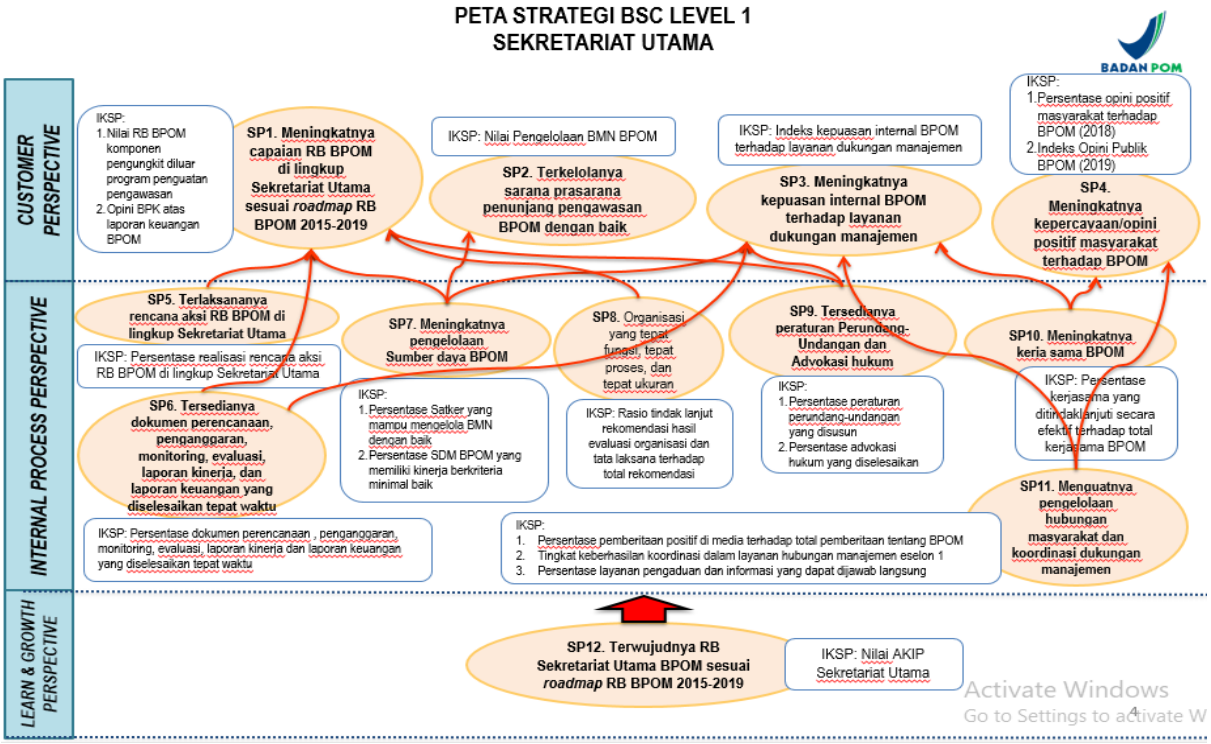

Gambar 2.3. Peta Strategi BSC Level 1 Sekretariat Utama

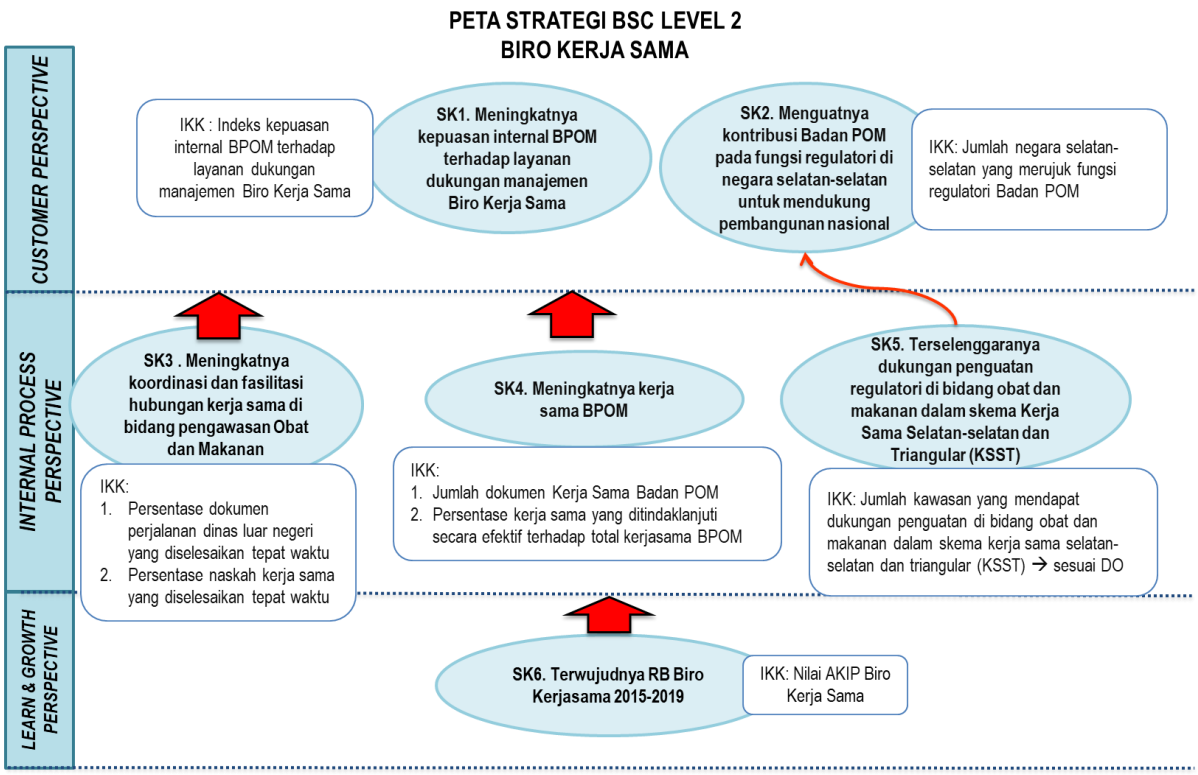

Gambar 2.4. Peta Strategi BSC Level 2 Biro Kerja Sama BPOM RI

B. TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi berdasarkan potensi dan permasalahan di Biro Kerja Sama, ditetapkan tujuan Biro Kerja Sama tahun 2015-2019 adalah:

Terwujudnya dukungan manajemen dalam rangka:

1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat; dan
2. Meningkatkan daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi.

Biro Kerja Sama memberikan dukungan manajemen dalam memfasilitasi dan mengkoordinasi kerja sama BPOM yang ditujukan untuk meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka

meningkatkan kesehatan masyarakat; dan Meningkatkan daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi.

C. SASARAN KEGIATAN

Sesuai dengan Peta Strategis Biro Kerja Sama, Sasaran Kegiatan Biro Kerja Sama sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2018-2019

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja	
		2018	2019
Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	75	80
Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori BPOM	1	1
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu	95%	95%
	Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	80 %	80 %
Meningkatnya Kerja Sama BPOM	Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM	91	91
	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM	70 %	71 %
Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)	Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan	3	3
Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015-2019	Nilai AKIP Biro Kerja Sama	78	81

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Biro Kerja Sama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Sasaran Kegiatan dan Alokasi Anggaran 2015 - 2019

Sasaran Program	Alokasi (Rp Milyar)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Program pengembangan kerja sama dan/kerja sama dalam dan luar negeri di bidang obat dan makanan	5,6	6	7	8,225	7,525.9
Program penguatan fungsi regulatori pengawasan obat dan makanan di negara selatan-selatan	-	-	-	1	1,5

Adapun uraian Sasaran Kegiatan, Indikator, Definisi Operasional, Cara Perhitungan dan Target sebagaimana berikut:

Sasaran Kegiatan 1	• **Meningkatnya kepuasan internal Badan POM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama**

Untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan ini ditetapkan definisi operasional, cara pengukuran dan target masing-masing indikator sebagai berikut:

Indikator	Definisi Opersional	Cara Perhitungan	IKU
Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama	Layanan Biro Kerja Sama meliputi: 1) Penyusunan MoU dan PKS antara BPOM dengan lintas sektor di dalam negeri, 2) Penyiapan bahan kerja sama luar negeri, 3) Penyelesaian surat persetujuan dan *exit permit* perjalanan dinas luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri.	Dilaksanakan survei kepuasan internal BPOM tehadap layanan Biro Kerja Sama. Indeks dihitung dari pembobotan nilai survey.	80

Sasaran Kegiatan 2	• **Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional**

Untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan ini ditetapkan indikator kegiatan, cara pengukuran dan target masing-masing indikator sebagai berikut:

Indikator	Definisi Opersional	Cara Perhitungan	IKU
Jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori BPOM	Yang dimaksud dengan kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan adalah kegiatan peningkatan kapasitas untuk negara selatan selatan di bidang obat dan makanan.	Jumlah negara selatan-selatan yang merujuk regulasi BPOM untk menerapkan standard/ persyaratan dibidang obat dan makanan.	Min 1

Sasaran Kegiatan 3	• **Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan**

Untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan ini ditetapkan indikator kegiatan, cara pengukuran dan target masing-masing indikator sebagai berikut:

Indikator	Definisi Opersional	Cara Perhitungan	IKU
Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	Yang dimaksud dengan naskah kerja sama meliputi penyusunan rancangan Kesepakatan Bersama dan perjanjian kerja sama.	Jumlah rancangan Kesepakatan Bersama dan perjanjian kerja sama yang diselesaikan tepat waktu.	80
Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu	Yang dimaksud dengan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri meliputi: 1. Surat Penugasan dari Kementerian Sekretaris negara, *2. Exit permit* Kementerian Luar Negeri	Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu yaitu perbandingan antara jumlah dokumen perjalanan dinas yang selesai tepat waktu dengan pengajuan usulan perjalanan dinas yang sesuai dengan ketentuan.	95

Sasaran Kegiatan 4	• **Meningkatnya kerja sama BPOM**

Untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan ini ditetapkan indikator kegiatan, cara pengukuran dan target masing-masing indikator sebagai berikut:

Indikator	Definisi Opersional	Cara Perhitungan	IKU
Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM	Kerja sama dalam negeri, bilateral, regional, dan multilateral termasuk hibah, yang yang difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Biro Kerja Sama dan diimplementasikan oleh unit kerja minimal 1 ruang lingkup.	Jumlah kerja sama yang diimplementasikan, ditindaklanjuti atau difasilitasi oleh Biro Kerja Sama minimal 1 ruang lingkup / Total jumlah kerja sama BPOM	71
Jumlah dokumen kerja sama BPOM	Yang dimaksud dengan dokumen kerja sama berupa kajian kerja sama, dokumen kertas posisi, penjajakan kerja sama, perjanjian kerja sama seperti Nota Kesepahaman (MoU), Letter of Intent (LoI), Record of Discussion (RoD), dll	Jumlah dokumen kerja sama berupa kajian kerja sama, dokumen kertas posisi, penjajakan kerja sama, perjanjian kerja sama seperti Nota Kesepahaman (MoU), Letter of Intent (LoI), Record of Discussion (RoD), dll yang difasilitasi dan dikooridnasi oleh Biro Kerja Sama.	91

Sasaran Kegiatan 5	• **Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)**

Untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan ini ditetapkan indikator kegiatan, cara pengukuran dan target masing-masing indikator sebagai berikut:

Indikator	Definisi Opersional	Cara Perhitungan	IKU
Jumlah kerja sama dan dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular	Jumlah negara di setiap kawasan dan sub kawasan dalam pelaksanaan kerja sama selatan-selatan dalam bentuk workshop, training, seminar atau kegiatan capacity building lainnya yang melibatkan negara-negara di kawasan selatan-selatan.	Menghitung total jumlah kawasan yang mendapat bantuan berupa peningkatan kapasitas regulatori di bidang obat dan makanan.	3

Sasaran Kegiatan 6	• **Terwujudnya RB Biro Kerjasama 2015-2019**

Untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan ini ditetapkan indikator kegiatan, cara pengukuran dan target masing-masing indikator sebagai berikut:

Indikator	Definisi Opersional	Cara Perhitungan	IKU
Nilai AKIP Biro Kerja Sama	Nilai AKIP Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi.	Dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai dengan PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81

Untuk mewujudkan kinerja tersebut dan berdasarkan peta strategi Biro Kerja Sama Negeri, dirancang kegiatan seperti pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Program Kegiatan Biro Kerja Sama Tahun 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan
Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	80	1. Operasional Biro Kerja Sama
Meningkatnya Kerja Sama BPOM	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM	71%	1. Koordinasi Lintas Sektor/Interkementerian dan Pertemuan Bilateral dengan Mitra di Dalam dan Luar Negeri 2. Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-isu Kerja Sama Bilateral 3. Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Regional dan Multilateral di Dalam dan Luar Negeri 4. Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerja Sama Regional dan Multilateral 5. Dukungan Pertemuan Codex 6. Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Kerja Sama Dalam Negeri 7. Pertemuan Regional dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri
	Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM	91 Dokumen kerja sama	1. Penyusunan Kajian, Posisi,dan Penjajakan Kerja Sama Bilateral 2. Penyusunan Kajian dan Posisi BPOM dalam Kerja Sama Regional dan Multilateral 3. Penyusunan Kajian dan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri
Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara	Jumlah negara selatan-selatan yang merujuk	Min 1 negara	1. Peningkatan Kapasitas dengan Negara di Timor Leste-Pasifik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan
selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	fungsi regulatori BPOM		2. Peningkatan Kapasitas dengan Negara-negara OKI 3. Peningkatan Kapasitas dengan Negara mitra di Asia/Afrika
Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)	Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan	3 kawasan	
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu	95%	Operasional Biro Kerja Sama
	Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	80%	1. Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Bilateral dengan Mitra di Dalam dan Luar Negeri 2. Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Regional di Dalam dan Luar Negeri 3. Koordinasi Lintas Sektor dlm rangka Monitoring dan Evaluasi MoU Dalam Negeri
Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015-2019	Nilai AKIP Biro Kerja Sama	81	1. Peningkatan Kompetensi Biro Kerja Sama 2. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Biro Kerja Sama

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja

terwujudlah komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan perjanjian kinerja antara lain adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparasi dan kinerja aparatur, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *punishment* atau sanksi.

Perjanjian kinerja Biro Kerja Sama Tahun 2019, merupakan perjanjian Kepala Biro Kerja Sama dengan Sekretaris Utama dengan indikator utama adalah (a) Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen Biro Kerja Sama (b) Persentase Kerja Sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM (c) Jumlah Dokumen Kerja Sama BPOM (d) Jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori BPOM (e) Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan (f) Nilai AKIP Biro Kerja Sama. Sesuai dengan dokumen rencana kerja pemerintah (RKP), definisi operasional untuk indikator utama adalah sebagai berikut:

1) <u>Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen Biro Kerja Sama</u>, meliputi:
   1. Penyusunan MoU dan PKS antara BPOM dengan lintas sektor di dalam negeri,
   2. Penyiapan bahan kerja sama luar negeri,
   3. Penyelesaian surat persetujuan dan *exit permit* perjalanan dinas luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri.
2) <u>Persentase Kerja Sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM</u>

   Kerja sama dalam negeri, bilateral, regional, dan multilateral termasuk hibah, yang yang difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Biro Kerja Sama dan diimplementasikan oleh unit kerja minimal 1 ruang lingkup. Biro Kerja Sama BPOM memiliki tugas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kerja sama meliputi penjajakan kerja sama, penyusunan kesepakatan kerja sama, pelaksanaan kerja sama di bidang obat dan makanan dengan mitra baik dalam negeri (K/L terkait,

akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi pelaku usaha, dll) dan luar negeri baik dalam kerja sama bilateral, regional, dan multilateral.

3) Jumlah Dokumen Kerja Sama BPOM

Dokumen kerja sama yang berupa kajian kerja sama, dokumen kertas posisi, penjajakan kerja sama, perjanjian kerja sama seperti Nota Kesepahaman (MoU), *Letter of Intent* (LoI), *Record of Discussion* (RoD), dll. Biro Kerja Sama BPOM memiliki tugas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kerja sama meliputi penjajakan kerja sama, penyusunan kesepakatan kerja sama, pelaksanaan kerja sama di bidang obat dan makanan dengan mitra baik dalam negeri (K/L terkait, akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi pelaku usaha, dll) dan luar negeri baik dalam kerja sama bilateral, regional, dan multilateral.

4) Jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori BPOM adalah kegiatan peningkatan kapasitas untuk negara selatan selatan di bidang obat dan makanan.

Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan, yang mencakup jumlah kegiatan peningkatan kapasitas untuk negara selatan-selatan di bidang obat dan makanan di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular.

5) Nilai AKIP Biro Kerja Sama

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian hasil kinerja.

Dokumen Perjanjian Kinerja Biro Kerja Sama dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kepala Biro Kerja Sama sebagaimana pada Lampiran 3.

Adapun anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di atas untuk pencapaian sasaran dan indikator kinerja Tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 2.4. Anggaran Pelaksanaan Kegiatan tahun 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	80	Rp. 568.850.000

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Meningkatnya Kerja Sama BPOM	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM	71%	Rp. 4.360.744.000
	Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM	91	Rp. 632.980.000
Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori BPOM	1	Rp. 1.500.000.000
Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)	Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan	3	
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu	95%	
	Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	80%	
Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015-2019	Nilai AKIP Biro Kerja Sama	81	Rp. 471.326.000

E. PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini:

% Capaian = Realisasi x100% Target

Adapun kategori capaian kinerja sebagaimana Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Kriteria Capaian Kinerja

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	**x > 120%**	
Sangat Baik	**110% < x ≤ 120%**	
Baik	**90% ≤ x < 110%**	
Cukup	**70% ≤ x < 90%**	
Kurang	**50% ≤ x < 70%**	
Sangat Kurang	**< 50%**	

Sasaran kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Untuk masing -masing indikator kinerja memiliki bobot yang sama.

Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) = {(bobot x % capaian)$_1$ + (bobot x % capaian)$_2$ + (bobot x %capaian)$_n$} / n

Sasaran Kinerja 1 "Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama"

$$NPS1 = NPI1$$

*) NPI = Nilai Pencapaian Indikator

Sasaran Kinerja 2 "Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional"

$$NPS2 = NPI2$$

Sasaran Kinerja 3 “Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan”

$$NPS3 = \frac{NPI3 + NPI4}{2}$$

Sasaran Kinerja 4 “Meningkatnya kerja sama BPOM”

$$NPS4 = \frac{NPI5 + NPI6}{2}$$

Sasaran Kinerja 5 “Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)”

$$NPS5 = NPI7$$

Sasaran Kinerja 6 “Terwujudnya RB Biro Kerjasama 2015-2019”

$$NPS4 = NPI8$$

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

LAKIP BIRO KERJA SAMA TAHUN 2019

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Tahun 2019 merupakan tahun kedua Biro Kerja Sama dalam konteks organisasi dan tata kerja baru berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2017. Evaluasi program dan kegiatan ditujukan sebagai referensi/acuan dalam perbaikan perencanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan pada 6 (enam) sasaran kegiatan dengan 8 (delapan) indikator kinerja yang telah dijabarkan seperti pada BAB II.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Kerja Sama pada tahun 2019 adalah "Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama" dengan target sebesar 80%. Pengukuran tingkat capaian indikator kinerja Biro Kerja Sama dilakukan melalui pengisian kuesioner survey internal kepuasan pelanggan.

A.1. Laporan Evaluasi atas Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019 dalam meningkatkan penyelenggaraan hubungan dan kerja sama BPOM, Biro Kerja Sama memiliki 6 (enam) sasaran kegiatan dengan 8 (delapan) indikator kinerja yang telah dijabarkan seperti pada BAB II.

Capaian Kinerja Biro Kerja Sama pada tahun 2019 seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Pencapaian Sasaran Program Biro Kerja Sama Tahun 2019

***Prespective*/Sasaran Sasaran Program**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**	**Kriteria**
A. Customer Perspective				**100,31 %**	**Baik**
Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama	80	80.5	100.63 %	Baik

Prespective/Sasaran Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori BPOM	1	1	100 %	Baik
B. Internal Process Perspective				**107.18 %**	**Baik**
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu	95 %	100 %	105 %	Baik
	Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	80 %	80 %	100 %	Baik
Meningkatnya kerja sama BPOM	Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM	91	109	119.78 %	Sangat Baik
	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerjasama BPOM	71 %	78.9 %	111.13 %	Sangat Baik
Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)	Jumlah kawasan yang mendapat dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST)	3	3	100 %	Baik
C. Learning Growth Perspective				**89.35 %**	**Cukup**
Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015-2019	Nilai AKIP Biro Kerja Sama	81	72.38	89.35 %	Cukup

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis masing-masing Sasaran Kegiatan Biro Kerja Sama sebagai berikut:

B.1. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama

Sasaran 1 Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama

IKK: Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama

Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dihitung dengan melaksanakan survei kepuasan internal BPOM terhadap layanan Biro Kerja Sama. Indeks tersebut didapatkan berdasarkan pembobotan nilai survey.

Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama

No	Indikator	2019				2018			2017	2016	2015
		T	R	%	% C thd 2018	T	R	%			
1	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	**80**	**80.5**	**100.63**	**96.33**	75	78,35	104.46			

Indikator kinerja **Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama** adalah 80.5 dari target 80, sehingga capaian indikator adalah 100.63%.

Indikator ini merupakan pengukuran tingkat kepuasan seluruh unit kerja di BPOM baik unit Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat unit kerja BPOM terhadap layanan Biro Kerja sama yang meliputi: (1). Penyusunan naskah kesepakatan bersama (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) BPOM dengan lintas sektor di dalam negeri (bobot 35%), (2). Penyiapan bahan kerja sama dengan pihak mitra luar negeri secara bilateral, maupun dalam forum regional dan multilateral (bobot 35%), (3). Penyelesaian persetujuan dan exit permit perjalanan dinas luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara dan

Kementerian Luar Negeri (bobot 30%). Hasil pengukuran survei kepuasan pelanggan sebagaimana Lampiran 7.

Hasil survei kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama Tahun 2019 (80.5 %) menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 (78 %). Adapun kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian ini, antara lain:

a. Penyusunan SOP Makro POM-13.01/CFM.01/SOP.01 tentang Penyusunan Perjanjian Kerja Sama, POM-13.01/CFM.01/SOP.02 tentang Pengembangan Jejaring Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri, POM-13.01/CFM.01/SOP.03 tentang Penyiapan Kertas Posisi, dan POM-13.01/CFM.01/SOP.04 tentang Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Negeri.
b. Pengembangan aplikasi sistem informasi *database* MoU/Perjanjian Kerja Sama BPOM berbasis website pada tautan kerjasama.pom.go.id. Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan memudahkan berbagai pihak untuk mengetahui berbagi infomasi terkait kerja sama yang telah dilakukan oleh BPOM. Selain itu, sistem informasi ini dapat diakses oleh pihak internal maupun eksternal BPOM.
c. Biro Kerja Sama melakukan perkuatan koordinasi yang dilakukan melalui rapat koordinasi internal, komunikasi melalui telepon, *e-mail*, aplikasi *whatsapp group* guna mempermudah informasi dapat tersalurkan.
d. Peningkatan koordinasi dengan unit teknis terkait dalam rangka penyiapan bahan kunjungan kerja Kepala BPOM ke luar negeri.

Upaya Biro Kerja Sama untuk meningkatkan kepuasan internal dalam dukungan manajemen Biro Kerja Sama tahun 2019 terhadap keberhasilan pencapaian indikator dilakukan melalui:

1. Pemuktahiran data pada *subsite* sistem informasi kerja sama BPOM dan *subsite Export Consultation Desk* (ECD), serta mengintegrasikan sistem informasi tersebut menjadi salah satu bagian dari *website* utama BPOM.
2. Sosialisasi terkait tata cara perjalanan dinas luar negeri serta pengajuan surat persetujuan dan *exit permit* ke luar negeri. Selain itu, adanya pembuatan *leaflet* terkait pedoman pengurusan perjalanan dinas luar negeri yang disebarkan ke seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM.
3. Pada tahun 2019, Biro Kerja Sama berinisiasi melakukan penyusunan pedoman dan *roadmap* kerja sama BPOM. Biro Kerja Sama bekerja sama dengan *Centre for*

Strategic and International Studies (CSIS) dalam pembuatan Analisis Pengembangan Kerja Sama di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan 2020-2024.

4. Penyusunan panduan penyiapan bahan kerja sama luar negeri BPOM yang dibuat dalam bentuk A4 atau A5 sehingga mempermudah dalam penyampaian informasi serta lebih terstruktur.

B.2. Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional

Sasaran 2 Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional

IKU: Jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori BPOM

Jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori BPOM dihitung dengan total negara selatan-selatan yang menerapkan standard dan merujuk regulasi BPOM dibagi dengan persyaratan di bidang Obat dan Makanan.

Tabel 3.3 Pencapaian Sasaran Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional

No	Indikator	2019				2018			2017	2016	2015
		T	R	%	% C thd 2018	T	R	%			
1	Jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori BPOM	**1**	**1**	**100**	**100**	1	1	100			

Jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori BPOM adalah 1 dari target 1, sehingga capaian indikator adalah 100%. Pencapaian sasaran dinilai berdasarkan jumlah negara yang telah merujuk fungsi regulatori BPOM dalam hal penyusunan regulasi maupun aturan pengawasan Obat dan Makanan di negara selatan-selatan.

Indikator jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori BPOM ini merupaka pengukuran efektivitas Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) yang dilakukan BPOM yang dimana program ini merupakan salah satu program prioritas nasional.

Capaian jumlah negara selatan-selatan yang telah merujuk fungsi regulatori BPOM pada tahun 2019 tidak mengalami perubahan dengan capaian tahun 2018, yaitu 1 negara dengan capaian sebesar 100% dengan kategori Baik. Negara yang telah merujuk fungsi

regulatori BPOM adalah Timor Leste, *Autoridade Inspesaun no Fiskalizasaun Atividade Ekonómika, Sanitária no Alimentár (AIFAESA)*, yang telah merujuk fungsi regulatori BPOM di bidang Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.

Hal ini dilihat dari prosedur atau regulasi teknis dalam inspeksi keamanan pangan telah menjadi rujukan AIFAESA dalam penyusunan aturan terkait inspeksi di Timor Leste.

Selain itu, terdapat kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang pencapaian indikator jumlah negara selatan-selatan yang dalam merujuk fungsi regulatori BPOM pada tahun 2019. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan materi peningkatan kapasitas;

b. Peningkatan koordinasi Biro Kerja Sama melalui rapat koordinasi, komunikasi melalui telepon, *e-mail* dan *Whatsapp group* baik dengan unit internal BPOM dan juga pihak mitra terkait; dan

c. Menigkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Biro Kerja Sama telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah negara selatan-selatan yang dapat merujuk regulasi BPOM selama tahun 2019 untuk mencapai keberhasilan pencapaian indikator seperti hal berikut:

a. Penyusunan *Roadmap* Kerja Sama Selatan-Selatan;

b. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Selatan-Selatan; serta

c. Menjajaki kerja sama dengan donor luar negeri dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular.

B.3. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran 3 Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan

IKU:

1. Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu
2. Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 3.4 Pencapaian Sasaran Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan

No	Indikator	2019				2018			2017			2016			2015		
		T	**R**	**%**	**% C thd 2018**	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu	**95**	**100**	**105**	**100**	95	100	105	95	95	100	95	95	100	95	95	100
2	Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	**80**	**80**	**100**	**99,1**	80	80,7	100,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja yang pertama adalah "Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu" adalah adalah 100 % dari target 95 % sehingga capaian indikator adalah 105 %.

Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah dokumen perjalanan dinas yang selesai tepat waktu dengan pengajuan usulan perjalanan dinas yang sesuai dengan ketentuan. Yang dimaksud tepat waktu adalah dokumen perjalanan dinas dapat selesai paling lama 14 hari kerja dihitung setelah persyaratan lengkap dan telah disetujui pimpinan.

Pada tahun 2019, Biro Kerja Sama telah memfasilitasi 590 pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri ke 44 negara. Perjalanan dinas didominasi pada pertemuan (meeting) internasional (52%), selanjutnya adalah *training* dan workshop (22%) dan kunjungan kerja (10%).

Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 105%, hal ini merupakan capaian maksimal seperti halnya capaian tahun 2018. Secara umum capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena:

1. Sosialisasi/penyampaian *leaflet* terkait perjalanan dinas luar negeri.
2. Pengajuan ke setneg via aplikasi dapat di akses 24 jam.

3. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar di Indonesia (terkait penerbitan Visa).
4. Sistem manajemen mutu BPOM yang telah diimplementasikan dengan baik.

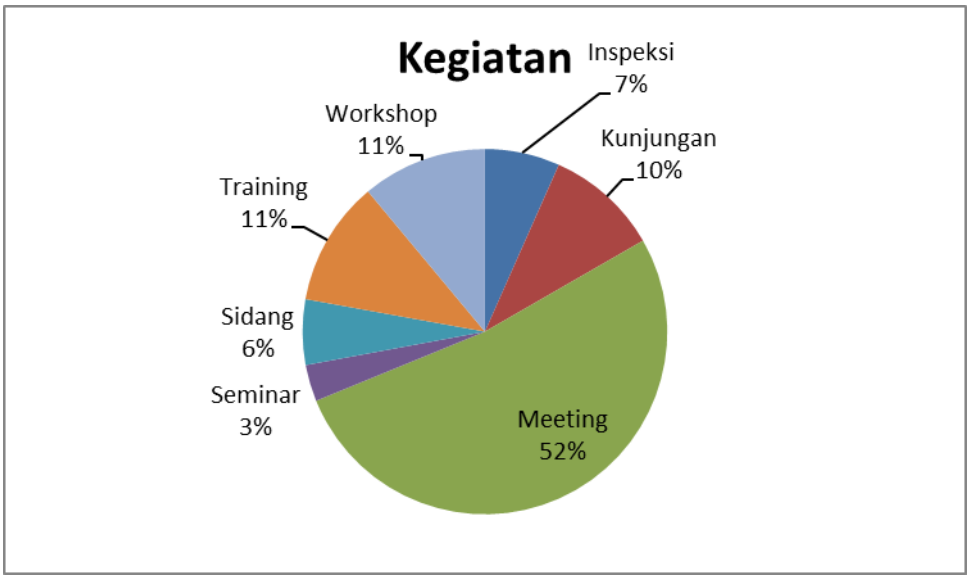

Gambar 3.1 Jenis Kegiatan Perjalanan Dinas

Indikator kinerja yang kedua adalah "Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu" adalah adalah 80 % dari target 80 % sehingga capaian indikator adalah 100%.

Cara perhitungan adalah jumlah kerja sama yang meliputi "Presentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu" meliputi Menghitung total jumlah kesepakatan bersama (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan dengan waktu standar dalam SOP Makro.

$$Nilai\ Presentasi = \frac{Jumlah\ MoU\ atau\ PKS\ yang\ tepat\ waktu}{Total\ Pengajuan\ Penyusunan\ MoU\ atau\ PKS}$$

Selama tahun 2019, Biro Kerja Sama telah memfasilitasi 70 penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dalam negeri BPOM.

Upaya Peningkatan tahun 2019 terhadap keberhasilan indikator tersebut di atas antara lain melakukan:

1. Pelaksanaan monitoring progres layanan Biro Kerja Sama.
2. Peningkatan kompetensi SDM Biro Kerja Sama.
3. Sosialisasi alur pengajuan penyusunan MoU/PKS kepada unit kerja terkait.

B.4. Meningkatnya Kerja Sama BPOM

Sasaran 4 Meningkatnya Kerja Sama BPOM

IKU:

1. Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM
2. Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM

Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM diukur berdasarkan jumlah dokumen kerja sama berupa kajian kerja sama, dokumen kertas posisi, penjajakan kerja sama, perjanjian kerja sama seperti Nota Kesepahaman (MoU), *Letter of Intent* (LoI), *Record of Discussion* (RoD) dan lain-lain, yang difasilitasi dan dikoordinasi oleh Biro Kerja Sama.

Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM dihitung berdasarkan jumlah kerja sama yang telah diimplementasikan, ditindaklanjuti atau difasilitasi oleh Biro Kerja Sama minimal 1 ruang lingkup dibagi dengan total jumlah kerja sama BPOM.

Sasaran ***"Meningkatnya Kerja Sama BPOM"*** diwujudkan melalui fasilitasi dan koordinasi kerja sama BPOM yang dilaksanakan oleh Biro Kerja Sama, berupa pelaksanaan kegiatan *capacity building* (workshop, seminar, desiminasi, *sharing experience/knowledge*, dll), kegiatan bersama (*joint inspection*, *joint assessment*, dll), penyusunan naskah dan dokumen kerja sama, rapat koordinasi, dll.

Keberhasilan pencapaian sasaran keempat ini diukur dengan 2 (dua) indikator, dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 3.5 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kerja Sama BPOM

No	Indikator	**2019**				2018			2017			2016			2015		
		T	**R**	**%**	**% C thd 2018**	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM	**91**	**109**	**119.78**	**119.78**	91	91	100	31	31	100	28	28	100	25	25	100
2	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerjasama BPOM	**71**	**78.9**	**111.13**	**111.13**	70	70	100		67			66			63	

Indikator kinerja yang pertama adalah "Jumlah dokumen kerja sama BPOM" adalah adalah 109 dari target 91 sehingga capaian indikator adalah 119.778 % dengan kategori "Sangat Baik".

Dihitung berdasarkan jumlah kerja sama yang meliputi penjajakan kerja sama, penyusunan kesepakatan kerja sama, serta pelaksanaan kerja sama BPOM dengan mitra baik dalam negeri dan luar negeri. Kerja sama dalam negeri dilakukan melalui kemitraan dengan lintas sektor terkait antara lain kerja sama dengan kementerian/lembaga, akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi pelaku usaha, gerakan pramukan, dll. Kerja sama luar negeri dilaksanakan meliputi kerja sama dengan mitra luar negeri secara bilateral, maupun dalam forum regional, dan multilateral.

Selama tahun 2019, BPOM telah melakukan kerja sama sebanyak 109 kerja sama yang terdiri dari:

1. Kerja Sama Bilateral dan KSST sebanyak 19 (sembilan belas) kerja sama yang meliputi 19 (sembilan belas) negara yaitu:
    1) Amerika Serikat: *US Food and Drug Administration (FDA), US Pharmacopeia (USP), Harvard Kennedy School (HKS), US Department of Agriculture (USDA), Michigan State University (MSU), Massachusetts Institute of Technology (MIT);*
    2) Arab Saudi: *Saudi Food and Drug Administration (SFDA);*
    3) Australia: *Therapeutic Goods Administration (TGA), Indonesia-Australia CEPA, Ministry of Primary Industries (MPI);*
    4) Bangladesh: *Indonesia-Bangladesh PTA;*
    5) China: *State Administration of Traditional Chinese Medicine (SATCM);*
    6) Eropa: *Indonesia – European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EFTA CEPA);*
    7) India: *State Administration of Traditional Chinese Medicine (SATCM), Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO), Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy (AYUSH);*
    8) Iran: *Iran Food and Drug Administration (IFDA), I-Iran Preferential Trade Agreement (I-I PTA);*

9) Jepang: *Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA), Japan International Cooperation Agency (JICA);*

10) Kazakhstan: *National Center for Expertise of Medicines, Medical Devices and Medical Equipment (NCEMMDME);*

11) Korea Selatan: *Ministry of Food and Drug Safety (MFDS);*

12) Maroko: *Office National de Securite Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA);*

13) Mozambik: *Indonesia-Mozambique PTA;*

14) Nigeria: *National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC);*

15) Palestina: *Ministry of Health of Palestine;*

16) Timor-Leste: *The Inspection and Supervision Authority for Economic, Health, and Food Activity (AIFAESA);*

17) Turki: *I-Turkey CEPA;*

18) Ukraina: *State Service of Ukraine on Medicines and Drugs Control (SSUMDC), National Center for Expertise of Medicines, Medical Devices and Medical Equipment (NCEMMDME);*

19) Yordania: *Jordan Food and Drug Administration (JFDA).*

2. Kerja Sama Regional Multilateral sebanyak 20 (dua puluh) dokumen kerja sama yang meliputi kerja sama sebagai berikut:

1) Forum *APEC-LSIF RHSC (Life Science Innovation Forum and Convergence - Regulatory Harmonization Steering Committee);*

2) *ACCSQ PPWG (Pharmaceutical Product Working Group);*

3) *ACCSQ TMHS-PWG (Traditional Medicines and Health Supplement Product Working Group);*

4) *ACCSQ PFPWG (Processed Food Product Working Group);*

5) *ASEAN Health Cluster 2 (AHC 2) - Responding to All Hazards and Emerging Threats;*

6) *ASEAN Health Cluster 3 (AHC 3) - Strengthening Health Systems and Access to Care;*

7) *ASEAN Health Cluster 4 (AHC 4) - Ensuring Food Safety;*

8) *ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA);*
9) *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA);*
10) *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP);*
11) *World Health Organization (WHO), Member States Mechanism on Substandard and Falsified Medical Products (MSM SFMP), Benchmarking;*
12) *World Health Assembly (WHA);*
13) Pembahasan *Concept Paper WHO-Listed Authority (WLA);*
14) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI);
15) *Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S);*
16) *Codex Committee Contaminant in Food (CCCF), Codex Committee on Food Additives (CCFA), Codex Committee on Nutrition and Food for Special Dietary Uses (CCNFSDU), dan Codex Committee on Food Labelling (CCFL);* dan
17) *(WTO) Technical Barriers to Trade (TBT), Sanitary and Phytosanotary (SPS), Trade Policy Review (TPR), Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPS);*
18) *Food and Agriculture Organization (FAO);*
19) *World Bank;* dan
20) *Commission on Narcotics and Drugs (CND).*

3. Kerja Sama Dalam Negeri sebanyak 70 (tujuh puluh) kerja sama yang meliputi 41 kerja sama dengan instansi pemerintah dan 16 dengan mitra non pemerintah. Kerja Sama dengan instansi pemerintah meliputi kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota serta perangkat daerah lainnya. Kerja Sama dengan mitra non pemerintah meliputi akademisi, asosiasi, organisasi masyarakat dan gerakan pramuka. Secara lengkap capaian kerja sama dalam negeri sebagaimana Lampiran 9.

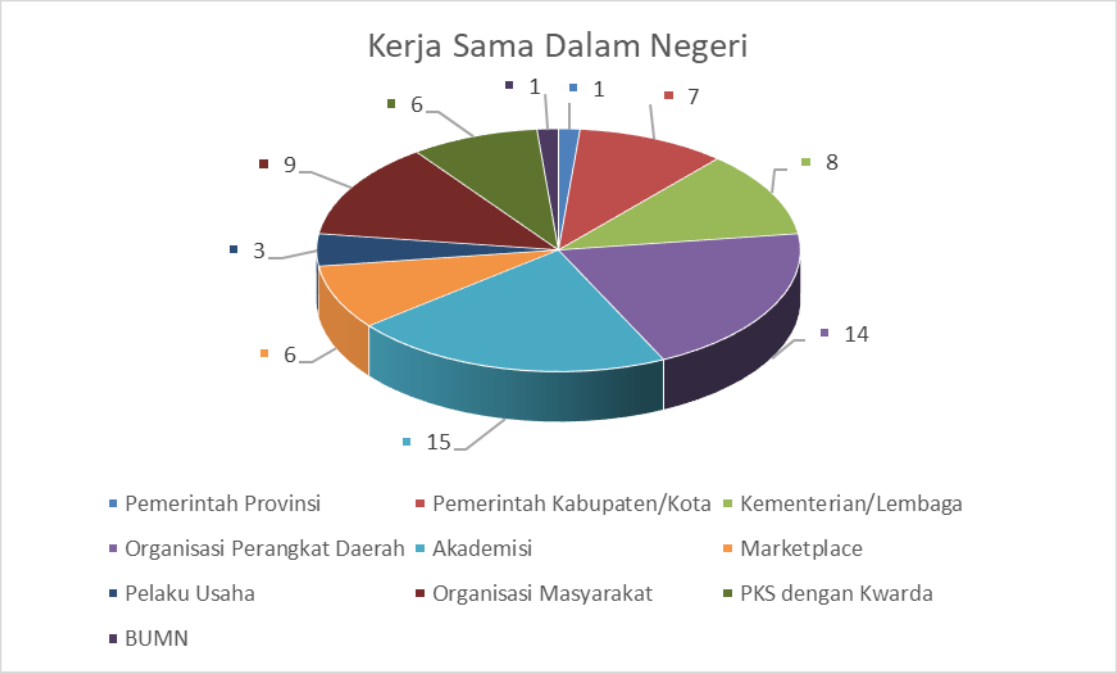

Gambar 3.2 Kerja Sama Dalam Negeri BPOM Tahun 2019

Jumlah dokumen kerja sama BPOM tahun 2019 sebanyak 109 dokumen meningkat dari tahun 2018 yang sebanyak 91 dokumen kerja sama. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena:

1. Meningkatnya koordinasi dengan unit kerja, Kementerian/Lembaga terkait serta mitra BPOM lainnya.
2. Sistem manajemen mutu BPOM yang telah diimplementasikan dengan baik.
3. Tersedianya panduan penyiapan bahan kerja sama dan penyusunan perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri.
4. Meningkatnya permintaan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama yang bertujuan untuk mengakomodir kepentingan masing-masing negara dan dengan lintas sektor terkait di dalam negeri.

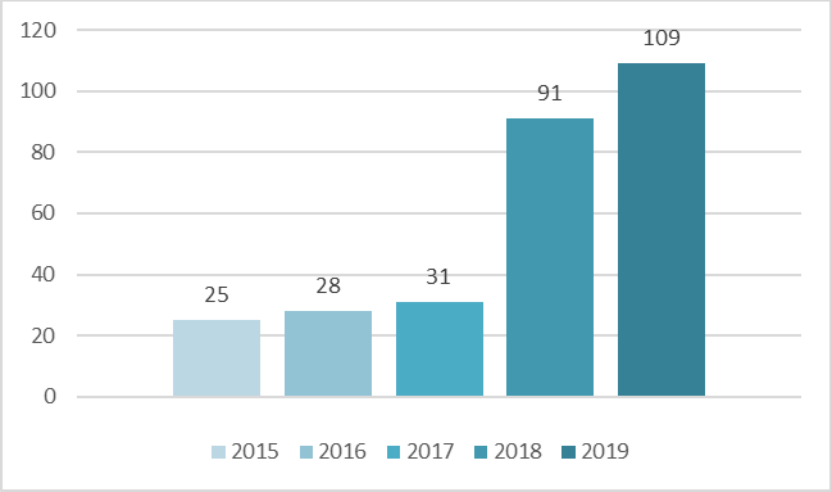

Gambar 3.3 Capaian jumlah dokumen kerja sama BPOM

Upaya Peningkatan tahun 2019 terhadap keberhasilan indikator tersebut di atas antara lain melakukan:

1. Pengembangan *database* internal untuk memonitor progres layanan Biro Kerja Sama.
2. Peningkatan kompetensi SDM Biro Kerja Sama.
3. Peningkatan kapasitas Pejabat BPOM dalam komunikasi, negosiasi, dan diplomasi.
4. Sosialisasi alur pengajuan penyusunan MoU/PKS kepada unit kerja terkait.
5. Peningkatan koordinasi penyiapan bahan kunjungan kerja luar negeri dan dokumen posisi BPOM/Indonesia dalam forum bilateral, regional dan multilateral.

Indikator kinerja yang kedua adalah "Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM" sebesar 78.9 % dari target 71 % sehingga capaian indikator adalah 111.13 %.

Kerja sama yang dimaksud meliputi penjajakan kerja sama, penyusunan kesepakatan kerja sama, serta pelaksanaan kerja sama BPOM dengan mitra baik dalam negeri dan luar negeri. Kerja sama dalam negeri dilakukan melalui kemitraan dengan lintas sektor terkait antara lain kerja sama dengan kementerian/lembaga, akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi pelaku usaha dan profesi, gerakan pramuka, dll. Kerja sama luar negeri dilaksanakan pada tataran bilateral, regional, dan multilateral.

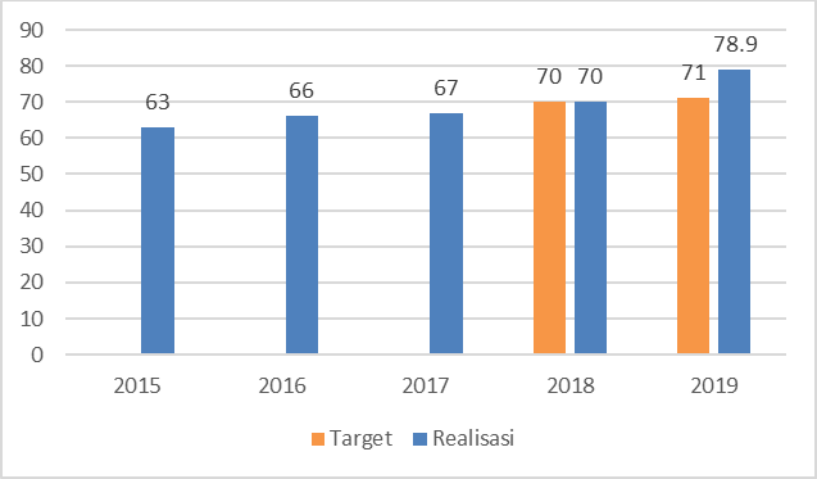

Gambar 3.4 Capaian Presentase Kerja Sama yang ditindaklanjuti secara efektif

Indikator ini dihitung dengan membandingkan Jumlah kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM. Pada tahun 2019, BPOM telah memiliki 86 kerja sama yang telah diimplementasikan dari total kerja sama sebanyak 109 kerja sama (sebagaimana Lampiran 9) yang terdiri dari:

a. 17 kerja sama bilateral yang telah dilaksanakan dari 19 negara mitra. Kerja sama yang belum efektif antara lain kerja sama bilateral dengan Republik Rakyat Thiongkok (RRT) dan Korea Selatan yang saat ini masih membahas rancangan MoU antara BPOM dengan SATCM, RRT dan MFDS, Korea Selatan;
b. 19 kerja sama sama regional dan multilateral yang telah dilaksanakan dari 20 forum Kerja sama regional dan multilateral. Kerja sama yang belum efektif antara lain kerja sama pada forum ASEAN Health Cluster 2 (AHC 2) - Responding to All Hazards and Emerging Threats. Pada forum ini, BPOM berperan dalam strategic objectives 4, yaitu Optimize Use of Antimicrobial Medicines, pada 4.2. Regulate post-marketing quality of drugs under the coordination by NRA/DRA to ensure access to safe and quality antibiotics. Pada tahun 2019, berlum terdapat pembahasan mengenai isu tersebut;
c. 50 kerja sama dalam negeri telah dilaksanakan dari 70 Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri. Kerja sama yang belum dilaksanakan antara lain kerja sama dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Banten, KPID Provinsi Banten, Kabupaten Tanah Laut, Kapupaten Nias Barat, Kabupaten Pematangsiantar, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Kabupaten Nias, Universitas Sahid, Univesitas Terbuka Batam, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan,

Universitas Wira Wacana, Universitas Islam Riau, Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah kabupaten Karanganyar, PT Grab Teknologi Indonesia, Politeknik Kesehatan Bengkulu, Kementerian Hukum dan HAM, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi, dan Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu. Hal ini disebabkan beberapa unit kerja belum menyampaikan data implementasi kerja sama. Terkait hal ini, Sektama c.q. Biro Kerja Sama akan meningkatkan koordinasi dengan unit terkait dalam hal monitoring dan evaluasi kerja sama.

Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 78.9 dengan capaian 111.13 % dengan kategori "Sangat Baik", meningkat jika dibandingkan pada tahun 2018 dengan jumlah 70 % dan capaian indikator sebesar 100% secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena:

1. Dukungan regulasi dan penguatan kelembagaan BPOM, seperti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018.
2. Meningkatnya koordinasi internal dan eksternal, dalam penyiapan bahan Kerja sama serta monitoring dan evaluasi kerja sama.
3. Sistem manajemen mutu BPOM yang telah diimplementasikan dengan baik.
4. Tersedianya panduan penyiapan bahan kerja sama dan penyusunan perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri.
5. Mendorong unit kerja untuk mengisi implementasi kerja sama melalui monitoring dan evaluasi kerja sama secara *online*.
6. Meningkatnya komitmen unit kerja dan mitra kerja sama dalam implementasi kerja sama yang bertujuan untuk mengakomodir kepentingan masing-masing negara dan dengan lintas sektor terkait di dalam negeri.

B.5. Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)

Sasaran 5 Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)

IKU:

Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan

Tabel 3.6 Pencapaian Sasaran Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)

No	Indikator	2019				2018			2017	2016	2015
		T	**R**	**%**	**% C thd 2018**	T	R	%			
1	Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan	**3**	**3**	**100**	**100**	3	3	100			

Indikator kinerja "Jumlah kerja sama dan dukungan Indonesia terdapat negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang Obat dan Makanan." Target pada tahun 2019 adalah 3 kawasan dan dengan realisasi 3 kawasan sehingga capaian indikator pada sasaran kinerja ke-5 adalah 100%.

Seperti pada tahun 2018 indikator ini dihitung berdasarkan dengan menghitung jumlah kawasan yang telah mendapat bantuan berupa peningkatan kapasitas seperti *workshop, training,* seminar, dan *capacity building* regulatori di bidang Obat dan Makanan yang melibatkan negara-negara di kawasan selatan-selatan.

Pada tahun 2019, Biro Kerja Sama telah memfasilitasi pelaksanaan kerja sama selatan-selatan untuk 3 negara di 3 kawasan, yaitu Timor Leste, Papua Nugini, dan Palestina. Kegiatan yang telah dilakukan dalam menunjang pencapaian indikator Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang Obat dan Makanan antara lain sebagai berikut:

a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan materi peningkatan kapasitas;

b. Meningkatkan koordinasi Biro Kerja Sama melalui rapat koordinasi, komunikasi melalui telepon, *e-mail* dan *whatsapp group* baik dengan unit internal BPOM maupun pihak mitra'

c. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Selain kegiatan-kegiatan diatas, Biro Kerja Sama telah mengupayakan peningkatan Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang Obat dan Makanan terhadap keberhasilan pencapaian indikator dilakukan melalui:

a. Menyusun *roadmap* Kerja Sama Selatan-Selatan;
b. Melakukan *Monitoring* dan Evaluasi Kerja Sama Selatan-Selatan;
c. Menjajaki kerja sama dengan lembaga donor luar negeri dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular

B.6. Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015-2019

Sasaran 6 Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015-2019

IKU:
Nilai AKIP Biro Kerja Sama

Biro Kerja Sama melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja melalui Inspektorat Utama yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Sasaran Kegiatan ini diukur menggunakan indikator Nilai AKIP dengan komponen penilaian seperti, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Tabel 3.7 Kategori Penilaian AKIP

Kategori	*Nilai Angka*	*Intepretasi*
AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan
A	> 80 – 90	Memuaskan
BB	> 70 - 80	Sangat Baik
B	> 60 - 70	Baik
CC	> 50 - 60	Cukup
C	> 30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Berdasarkan tabel 3.8, dapat dilihat bahwa Indikator kinerja "Nilai AKIP Biro Kerja Sama" pada tahun 2019 mendapatkan nilai 72,38 dari target 81 sehingga capaian indikator adalah 89,39 % dengan kategori "Cukup".

Tabel 3.8. Pencapaian Sasaran Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015-2019

No	Indikator	**2019**				2018			2017			2016			2015		
		T	**R**	**%**	**% C thd 2018**	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Nilai AKIP Biro Kerja Sama	**81**	**72.38**	**89.35**	**96.02**	78	72,58	93,05	80	72,1	90	80	69,8	87	80	62	77,5

Nilai AKIP Biro Kerja Sama diperoleh berdasarkan nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Biro Kerja Sama. Nilai AKIP Biro Kerja Sama menunjukkan trend meningkat sejak tahun 2015 s.d 2018, yaitu 62,05 (2015), 69,84 (2016), 72,08 (2017) dan 72,58 (2018), namun mengalami sedikit penurunan 72,38 (2019).

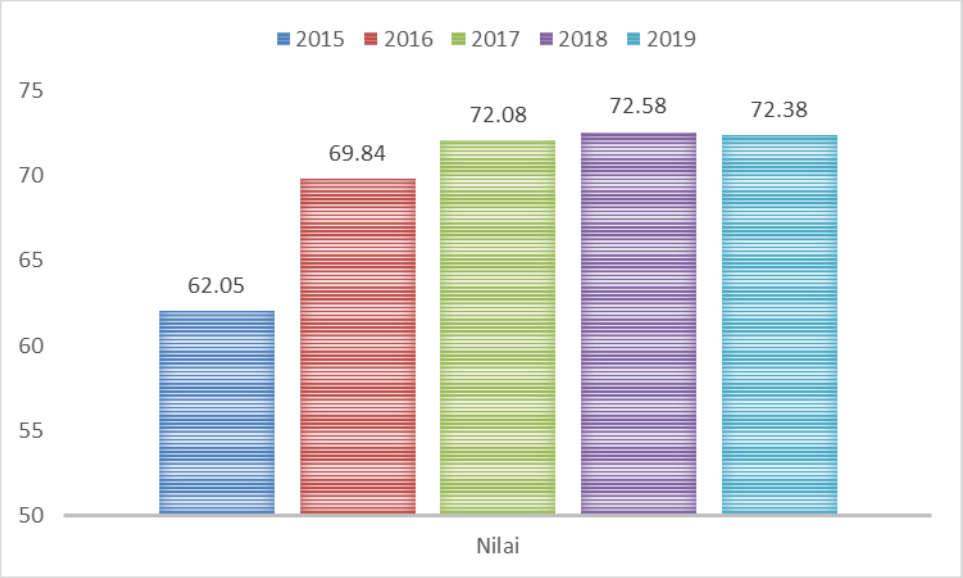

Gambar 3.5 Penilaian AKIP Biro Kerja Sama 2015 - 2019

Penilaian AKIP oleh Inspektorat Utama berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 12 Tahun 2015 berdasarkan 5 komponen penilaian yaitu Perencaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%), dan

Pencapaian Kinerja (20%). Berdasarkan hasil penilaian AKIP tersebut, menunjukan trend meningkat di hampir semua komponen kecuali pelaporan kinerja dan capaian kinerja.

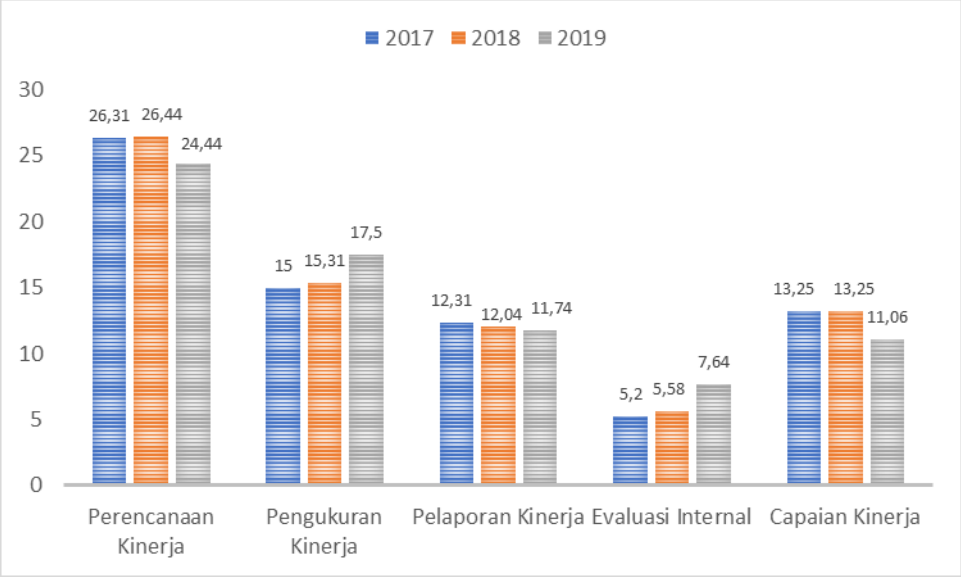

Gambar 3.6 Perbandingan Nilai AKIP Biro Kerja Sama 2017, 2018 dan 2019

Hasil Penilaian AKIP Tahun 2019 tersebut, Biro Kerja Sama dinilai memiliki akuntabilitas yang baik, berkinerja sangat baik serta memiliki kinerja yang andal, hal ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

a. Perencanaan: Biro Kerja Sama telah memiliki dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis (Renstra) secara berkala, yang menyajikan indikator kinerja utama (IKU) 2015-2019 sebagai tolak ukur kinerja secara formal sesuai dengan perubahan organisasi.
b. Pengukuran Kinerja: Biro Kerja Sama telah menyusun *cascading* indikator kinerja sampai tingkat individu pegawai.
c. Pelaporan Kinerja: Biro Kerja Sama telah menyajikan informasi kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja.
d. Evaluasi Kinerja: Biro Kerja Sama telah melakukan evaluasi internal, namun belum memanfaatkan hasil evaluasi internal secara optimal untuk umpan balik bagi penyempurnaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja.
e. Capaian Kinerja: Biro Kerja Sama telah mencapai sasaran kinerja utama untuk meningkatkan kerja sama BPOM, tetapi terdapat indikator yang masih di bawah target.

Selama tahun 2019, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

a. Melakukan revisi renstra Biro Kerja Sama Tahun 2015-2019 sesuai dengan perubahan organisasi dan dinamika lingkungan strategis;
b. Menyusun rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja dan Laporan Kinerja Biro Kerja Sama;
c. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran Biro Kerja Sama;
d. Menyusun sasaran strategis dan indikator kinerja sesuai dengan perubahan organisasi;
e. Menyusun Laporan Kinerja Biro Kerja Sama.

Upaya Biro Kerja Sama untuk meningkatkan keberhasilan indikator tersebut pada tahun 2019 yaitu:

1. Melakukan reviu renstra secara berkala;
2. Melakukan evaluasi internal pencapaian kinerja terhadap perencanaan setiap bulan;
3. Menyempurnakan penyajian informasi perihal pengukuran kinerja melalui pengukuran data kinerja yang sistematis dan mampu telusur berbasis teknologi informasi;
4. Melaksanakan dan mendokumentasikan monitoring pencapaian rencana aksi dalam mengendalikan kinerja;
5. Melakukan evaluasi akuntabilitas dan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Biro Kerja Sama;
6. Melakukan sosialisasi dan internalisasi Reformasi Birokrasi;
7. Melakukan penggalangan komitmen Reformasi Birokrasi Biro Kerja Sama;
8. Melakukan monitoring akuntabilitas realisasi kinerja (Lampiran 6) dan serapan anggaran setiap bulan;
9. Menyusun SOP Mikro tentang pengumpulan data kinerja yang *up to date*.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 oleh Inspektorat Utama BPOM, ada beberapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Biro Kerja Sama, antara lain:

1. Melakukan publikasi terhadap dokumen revisi Rencana Strategis pada *website* BPOM;

2. Menyesuaikan Sasaran dan Indikator kinerja pada perjanjian kinerja dengan Sasaran dan Indikator kinerja pada Renstra;
3. Melakukan reviu indikator kinerja sehingga cukup untuk menilai/mengukur kinerja dan mencapai sasaran;
4. Menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP yang up to date dan melakukan pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi;
5. Melengkapi rencana aksi agar mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja dan memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata selanjutnya untuk menindaklanjuti rencana aksi untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang;
6. Memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment;
7. Laporan Kinerja disampaikan tepat waktu; dan
8. Laporan kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai yaitu perbandingan realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi tahun berjalan dengan RPJMN serta capaian dengan organisasi yang setara/sejenis.

C. REALISASI ANGGARAN

1) Anggaran Program dan Kegiatan

Pada tahun 2019, pagu anggaran Biro Kerja Sama sebesar Rp. 7.525.900.000.- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.509.180.259.- (99.78%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Biro Kerja Sama tahun 2019

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM:		**Rp 7,525,900,000**	**Rp 7,509,180,259**	**99.78**
1	Kerja sama yang difasilitasi	Rp 6,025,900,000	Rp 6,011,440,417	99,76
2	Penguatan fungsi regulatori pengawasan Obat dan Makanan di negara Selatan-Selatan	Rp 1,500,000,000	Rp 1,497,739,852	99,85

Tabel 3.10 Rencana Aksi Pelaksanaan Anggaran Biro Kerja Sama

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	
Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM:		**Rp 7,525,900,000**	**Rp 7,509,180,259**	**99.78**
1	Kerja sama yang difasilitasi	Rp 6,025,900,000	Rp 6,011,440,417	99,76
	Mengarahkan koordinasi fasilitasi kerja sama BPOM	Rp 632,980,000	Rp 606,375,553	95,79
	Mengarahkan koordinasi kerja sama BPOM yang efektif	Rp 4,360,744,000	Rp 4,522,578,377	103,71
	Mengarahkan koordinasi layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama kepada internal BPOM	Rp 560,850,000	Rp 543,965,772	96,98
	Mengarahkan perencanaan tahunan dan Reformasi Birokrasi	Rp 161,696,000	Rp 100,039,715	61,86
	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	Rp 309,630,000	Rp 238,481,000	77,02
2	Penguatan fungsi regulatori pengawasan Obat dan Makanan di negara Selatan-Selatan	Rp 1,500,000,000	Rp 1,497,739,852	99,85
	Mengarahkan koordinasi dukungan Indonesia terhadap negara berkembang dibawah kerja sama selatan-selatan di bidang obat dan makanan			

2) Realisasi Anggaran Per-Program dan Kegiatan

Adapun realisasi perkomponen anggaran sebagaimana Tabel 3.11:

Tabel 3.11. Realisasi Anggaran Biro Kerja Sama Per Komponen tahun 2019

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
001	Kerja sama yang difasilitasi	6.025.900.000	6.011.440.417	99,76
1	Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Bilateral	1.611.937.000	1.611.583.120	99,97

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
2	Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Regional dan Multilateral	2.053.278.000	2.051.915.563	99,93
3	Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Dalam Negeri	1.470.925.000	1.465.455.247	99,62
4	Monitoring/Evaluasi Kinerja	889.760.000	882.486.487	99,18
002	Penguatan Fungsi Regulatori Pengawasan Obat dan Makanan di Negara Selatan-Selatan	1.500.000.000	1.497.739.852	99,85
1	Penyelenggaraan Kerja Sama dengan Timor Leste/Pasifik	284.218.000	284.179.187	99,98
2	Penyelenggaraan Kerja Sama dengan Negara Anggota OKI	1.074.200.000	1.072.637.665	99,85
3	Penyelenggaraan Kerja Sama dengan Negara Mitra Asia/Pasifik	141.582.000	140.923.000	99,53
	TOTAL ANGGARAN	**7.525.900.000**	**7.509.180.259**	**99.78**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran program "Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM" yaitu sebesar 80,07. Hal ini karena tugas dan fungsi Biro Kerja Sama adalah melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri di bidang pengawasan obat dan makanan.

Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 99,78 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2018, 87,81. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan realisasi anggaran lebih optimal, antara lain:

1. Menyusun *Plan of Action* (PoA) pada awal tahun anggaran dan dipatuhi pada pelaksanaannya.
2. Melakukan monitoring berkala secara lebih ketat atas pencapaian kinerja dan realisasi anggaran kegiatan sesuai sasaran pada Perjanjian Kinerja.
3. Melaksanakan koordinasi lintas unit dan sektor untuk mengidentifikasi peluang, tantangan dan kesempatan untuk membangun kerja sama di bidang pengawasan

obat dan makanan yang menjadi tugas dan fungsi utama BPOM, yang dilaksanakan oleh Biro Kerja Sama.

Adapun upaya yang akan dilaksanakan Biro Kerja Sama untuk meningkatkan serapan anggaran antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan kegiatan Biro Kerja Sama secara cermat dan menyusun langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran;
2. Pelaksanaan program kegiatan dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disiapkan sehingga realisasi anggaran, dapat sesuai dengan perencanan yang tepat;
3. Melakukabn monitoring pelaksanaan program dan kegiatan secara rutin setiap bulan.

D. PENGUKURAN EFISIENSI KINERJA

Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama, atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang lebih besar, atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Dengan demikian, fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan.

Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi Capaian *Output* terhadap Capaian Input sebagaimana rumus di bawah ini:

$$\boldsymbol{IE} = \frac{\%\ \boldsymbol{Capaian\ Output}}{\%\ \boldsymbol{Capaian\ Input}}$$

Sedangkan Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Angka ini bisa berupa angka capaian efisiensi tahun lalu, angka capaian efisiensi instansi lain untuk kegiatan yang sama, atau angka capaian efisiensi sesuai dengan rencana capaian target, dan sebagainya.

Dalam laporan ini SE yang digunakan adalah *angka capaian efisiensi* sesuai dengan rencana capaian/target yaitu 1, yang diperoleh dengan memakai rumus di bawah ini:

$$\boldsymbol{SE} = \frac{\%\ \boldsymbol{Rencana\ Capaian\ Output}}{\%\ \boldsymbol{Rencana\ Capaian\ Output}} = \frac{\mathbf{100\%}}{\mathbf{100\%}} = \mathbf{1}$$

IE kemudian dibandingkan dengan SE dan kategori penilaian diberikan dengan cara sebagai berikut:

- **Jika IE ≥ SE, maka kegiatan dianggap efisien**
- **Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien**

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur. Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Inefisiensi dapat menyebabkan pemborosan/kerugian negara, tetapi tidak selalu demikian. Ada juga inefisiensi yang tidak mengakibatkan terjadinya pemborosan/kerugian negara antara lain :

- Jika input kegiatan bukan dana, melainkan hanya SDM atau metode peralatan dan sebagainya.
- Realisasi input melebihi anggaran atau output lebih rendah dari targetnya akibat kenaikan harga yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

E. TINDAKAN KOREKTIF

Pada tahun 2019, BPOM telah mampu memaksimalkan kerja sama, baik dari segi administrasi maupun teknis pengawasan obat dan makanan di dalam dan luar negeri. Biro Kerja Sama gencar meningkatkan eksistensi dan kredibilitasnya pada tingkat internasional maupun nasional. Namun seiring dengan proses untuk mendapatkan pencapaian-pencapaian tersebut, terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi.

Berikut adalah tindakan korektif yang telah dilakukan Biro Kerja Sama pada tahun 2019, antara lain:

1. Biro Kerja Sama sangat aktif dalam Kerja Sama Selatan-Selatan yang merupakan salah satu program prioritas pembangunan nasional yang diharapkan untuk terus berlanjut, seperti kerja sama dengan Palestina yang cukup kompleks dan inovatif, Biro Kerja Sama bekerja sama dengan regulator di Jordan, Palestina, seperti melakukan supervisi dalam membentuk regulasi pengawasan obat yang independen di Palestina.
2. Selain itu, Biro Kerja Sama memfasilitasi pemberian bantuan kepada Papua Nugini dengan mengundang *stakeholders* penting di dunia farmasi dan makanan (rumah

sakit, Kimia Farma, dan pengusaha) untuk mengidentifikasi kebutuhan Obat dan Makanan di Papua Nugini serta membuat MoU dengan Timor Leste untuk membantu memperkuat pengawasan ketahanan pangan.

3. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Biro Kerja Sama dengan memanfaatkan penggunaan teknologi online, seperti hal nya google drive dan google sheets. Selain itu melakukan pertemuan dan rapat dengan unit teknis BPOM dengan mengundang K/L yang menjadi mitra Biro Kerja Sama seperti halnya Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara sebagai narasumber dan memberikan saran dan masukan untuk meningkatkan kinerja Biro Kerja Sama baik nasional maupun internasional.
4. Dalam hal peningkatan kapasitas, Biro Kerja Sama yang aktif bertemu dengan mitra baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri, Biro Kerja Sama telah mengadakan *Workshop* Komunikasi, Negosiasi dan Diplomasi baik untuk staf Biro Kerja Sama dan unit teknis BPOM.

F. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi rencana kerja (kegiatan) Biro Kerja Sama dilaksanakan setiap bulan. Untuk kegiatan yang belum terlaksana, akan dilakukan penyesuaian. Sebagai contoh pada program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) BPOM untuk Palestina, yang semula akan dilaksanakan di Jakarta dengan mengundang regulator obat Palestina ke Indonesia. Seiring dengan dinamika dan perkembangan prioritas kerja sama BPOM, program diselenggarakan di Yordania agar semakin banyak regulator obat yang ikut serta pada kegiatan tersebut. Sehingga perlu dilakukan perubahan kegiatan dan alokasi anggaran. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini, Biro Kerja Sama mencapai serapan anggaran sebesar 99,78.

G. POTENSI

Dalam rangka peningkatan kinerja, Biro Kerja Sama memiliki potensi yang diwujudkan dengan inovasi, antara lain, sebagai berikut:

1. Bentuk tindak lanjut inisiasi kerja sama dengan Badan Otoritas Pengawasan Obat dan Makanan Negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), mulai dari inisiasi Pertemuan Kepala BPOM dengan Sekjen OKI pada tahun 2017 yang dilanjutkan dengan penyelenggaraan NMRAs OKI di tahun 2018, sampai degan Sosialisasi Hasil Pertemuan dengan Negara OKI pada tahun 2019;

2. Koordinasi penyusunan masukan Draft Concept Paper untuk WHO-Listed Auhtorities (WLA) dan tawaran WHO kepada BPOM untuk menjadi WLA;
3. Behasil meyakinkan WHO bahwa BPOM merupakan National Regulatory Authority (NRA) yang independen, tidak berada di bawah Kementerian Kesehatan dan menyampaikan laporan langsung kepada Presiden RI. Koordinasi selanjutnya, termasuk usulan kerjasama (workplans) akan dibuat sendiri;
4. Keberhasilan Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan sistem pengawasan obat di Palestina melalui Knowledge Sharing antara BPOM dan Regulator Obat di West Bank dan Palestina melalui kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan, selain itu memfasilitasi Keikutsertaan Pejabat Tinggi AIFAESA, Timor-Leste pada pertemuan Codex, serta kerja sama dalam koordinasi pelaksanaan peningkatan sistem pengawasan obat di Vanimo, Papua Nugini (PNG);
5. Inisiasi Kerja Sama Perbatasan dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Bangsa telah dilakukan di Pos Lintas Batas Aruk, Kalimantan Barat dan SKOUW, Jayapura;
6. Penggalangan Masukan Perkembangan Hubungan dan Kerja Sama Bilateral, Regional dan Multilateral di Bidang Obat dan Makanan untuk Penyusunan Rencana Program Kerja Sama BPOM ke depan;
7. Kooridnasi Penggalangan Bantuan BPOM untuk Palestina Bersama Pemangku Kepentingan Terkait;
8. Komitmen Pimpinan: Internalisasi RB, Peningkatan Kompetensi Pegawai, Kesejahteraan Pegawai, Internalisasi Pancasila, Kebersamaan dan Kekeluargaan;
9. Inisiasi peningkatan kapasitas pejabat BPOM melalui Workshop Komunikasi, Negosiasi dan Diplomasi;
10. Pengembangan mekanisme menotoring dan evaluasi MoU Dalam Negeri dengan memanfaatkan teknologi melalui online dan media sosial;
11. Pemanfaatan teknologi dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Internal Biro Kerja Sama secara online;
12. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Staf secara rutin termasuk diseminasi pelatihan, sharing knowledge;
13. Dukungan negosiasi dalam pelakasanaan WHO *Benchmarking*;
14. Inovasi dalam sharing knowledge pemberitaan terkait Pengawasan Obat dan Makanan melalui wag;
15. *Debriefing* setelah kunjungan kerja Kepala BPOM kepada staf;

16. *Inovasi format/template penyiapan bahan kunjungan kerja, Courtesy Call, Briefing Pimpinan dalam bentuk A5, penyusunan Talking Point dan Speech, serta rundown acara.*
17. Penerapan *reward* dan *punishment* bagi pegawai Biro Kerja Sama sesuai dengan hasil kinerja yang bersangkutan. *Reward* diberikan berupa *capacity building*, penugasan dalam dan luar negeri. Adapun *punishment* yang diterapkan dalam bentuk teguran lisan dan tertulis hingga penangguhan pemberian *capacity building* dan penugasan, khususnya penugasan luar negeri.

BAB IV
PENUTUP
LAKIP BIRO KERJA SAMA TAHUN 2019

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan 6 (enam) sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Biro Kerja Sama Tahun 2015-2019 yang telah diukur menggunakan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU), diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari 6 (enam) sasaran program, terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan dengan kriteria "Sangat Baik", 4 (empat) sasaran kegiatan dengan kategori "Baik", 1 (satu) sasaran kegiatan dengan kategori "Cukup".
2. Kriteria "Sangat Baik" untuk 1 (satu) sasaran kegitan karena pencapaian indikator lebih dari 110, "Meningkatnya kerja sama BPOM", dengan indikator:
   a. Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM yang mencapai 119,78, dan
   b. Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerjasama BPOM yang mencapai 111,13.
3. Kriteria "Baik" untuk 4 (empat) sasaran kegiatan karena pencapaian indikator sebesar 100, yaitu:
   a. "Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama" dengan indikator Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama yang mencapai 100,63.
   b. "Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional" dengan indikator Jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori BPOM yang mencapai 100.
   c. "Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan" dengan indikator:
      i. Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu yang mencapai 100.
      ii. Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu yang mencapai 100.
   d. "Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)" dengan indikator Jumlah kawasan yang mendapat dukungan penguatan di bidang obat

dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) yang mencapai 100.

4. Kriteria “Cukup” untuk 1 (satu) sasaran kegitan karena pencapaian indikator kurang dari 90, yaitu “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Biro Kerja Sama 2015-2019” dengan indicator nilai AKIP Biro Kerja Sama yang mencapai 89,35. Namun demikian, nilai AKIP Biro Kerja Sama masih dalam kategori BAIK (BB).
5. Realisasi anggaran Biro Kerja Sama pada tahun 2019 mencapai 99,78. Realisasi ini jauh meningkat dari Realisasi Tahun 2018 yaitu 87,81.
6. Hasil capaian kinerja secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan masih dalam kategori “Baik”. Meskipun demikian, pencapaian target indikator kinerja Biro Kerja Sama memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kerja sama juga ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif unit kerja teknis terkait.
7. Biro Kerja Sama telah menyusun rencana tincakan korektif dan terobosan untuk dilaksanakan pada tahun 2020, antara lain adalah:
   a. Penyusunan dan sosialiasi rencana kerja sama BPOM Tahun 2020 kepada unit kerja terkait;
   b. Melakukan kajian kerja sama luar negeri dengan negara-negara mitra maupun kerja sama dalam lingkup yang lebih besar seperti regional dan multilateral;
   c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama;
   d. Peningkatan pengelolaan dan kompetensi *Human Capital Management* (HCM) di Biro Kerja Sama;
   e. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi (RB), *Quality Management System* (QMS), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
   f. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Biro Kerja Sama.
   g. Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait baik internal BPOM maupun pihak eksternal.
   h. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama BPOM.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan kinerja Biro Kerja Sama sebagai unit dukungan manajemen BPOM dikaitkan dengan efektivitas kerja sama. Disarankan untuk menyusun fokus prioritas kerja sama BPOM yanhg meliputi peningkatan pemenuhan timeline penyusunan dokumen kerja sama, pemantapan dan penguatan elektronisasi informasi kerja sama, peningkatan kompetensi SDM, dan penerapan Reformasi Birokrasi (RB), *Quality Management System* (QMS), serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
2. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dan menyusun langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran
3. Pelaksanaan program kegiatan dilaksanakan agar dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disiapkan sehingga realisasi anggarann dapat sesuai denganperencanaan yang tepat. Perencanaan merupakan kunci utama dalam pelaksanaan kegiatan sehingga perlu dijabarkan dalam KAK yang spesifik.
4. Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan secara optimal terutama pantauan capaian kinerja dan penyerapan anggaran setiap bulannya sesuai dengan yang direncanakan. Evaluasi kegiatan rutin dilakukan agar setiap permasalahan yang terhjadi dapat dilakukan perbaikan dengan cepat dan tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal.
5. Perlu dilakukan upaya-upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kepuasan pelanggan internal sebagai dasar implementasi pelayanan prima.
6. Peningkatan kompetensi SDM terutama untuk kompetensi yang menunjang kerja sama, antara lain kemampuan bahasa asing, penyiapan kertas posisi, komunikasi, negosiasi dan diplomasi.
7. Seiring dengan meningkatnya kerja sama BPOM, Biro Kerja Sama perlu mengusulkan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) ke Biro Umum dan SDM BPOM.
8. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punishment yang tegas dan ketat.
9. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan koordinasi penyiapan bahan kunjungan kerja luar negeri dan dokumen posisi BPOM/Indonesia dalam forum bilateral, regional dan multilateral.

Lampiran 1. Keputusan Kepala Biro Kerja Sama tentang Perubahan Rencana Strategis Biro Kerja Sama tahun 2015-2019

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO KERJA SAMA
NOMOR HK.04.02.23.231.02.19.0185 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BIRO KERJA SAMA
TAHUN 2015-2019

KEPALA BIRO KERJA SAMA

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannnya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, dan Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.04.02.2.21.01.19.0269 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;

b. bahwa rencana strategis Biro Kerja Sama perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Biro Kerja Sama tentang Perubahan Rencana Strategis Biro Kerja Sama tahun 2015-2019;

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

1

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);

d. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

e. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 180);

f. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENNAS Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2015-2019;

g. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

h. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BIRO KERJA SAMA TAHUN 2015-2019;

Pertama : Menetapkan dan mengesahkan Perubahan atas Rencana Strategis Biro Kerja Sama tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Biro Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Kedua : Rencana Strategis Biro Kerja Sama memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, stategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Kerja Sama dalam rangka mencapai sasaran strategis Sekretariat Utama dan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Ketiga : Rencana Strategis Biro Kerja Sama sebagaimana dalam diktum kedua merupakan landasan dan acuan dalam melaksanakan pengembangan dan efektivitas jejaring kerja sama pengawasan Obat dan Makanan baik di dalam negeri dan luar negeri untuk periode tahun 2015-2019;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 4 Februari 2019

Kepala Biro Kerja Sama

Diana ES Sutikno, S.IP., M.Si., LL.M
NIP. 197 10405 199903 2 001

3

Lampiran 2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Biro Kerja Sama Tahun 2019

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO KERJA SAMA
BADAN POM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.04.1.23.02.19.0200 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 - 2019
DI LINGKUNGAN BIRO KERJA SAMA

KEPALA BIRO KERJA SAMA

Menimbang :

a. bahwa terdapat penyesuaian Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Biro Kerja Sama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Kerja Sama tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 – 2019 di Lingkungan Biro Kerja Sama;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 784);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO KERJA SAMA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN BIRO KERJA SAMA

Kesatu : Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Kerja Sama, Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah indikator untuk mengukur capaian keberhasilan program dan

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

kegiatan yang akan dilaksanakan di Biro Kerja Sama yang berkontribusi terhadap IKU Sekretariat Utama dalam rangka peningkatan kerjasama lintas sektor yang efektif;

Kedua : Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Kerja Sama, Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2019

Kepala Biro Kerja Sama

Diana ES Sutikno

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
3. Kepala Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Lampiran 1.

INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO KERJA SAMA

1. Nama Organisasi : BIRO KERJA SAMA
2. Tugas : Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Obat dan Makanan
3. Fungsi :
   a. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan - selatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
   b. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan-selatan, triangular, regional dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4 Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama
2	Meningkatnya kerja sama BPOM	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM
		Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM
	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu
3	Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori BPOM
4	Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)	Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan
5	Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015 - 2019	Nilai AKIP Biro Kerja Sama

Kepala Biro Kerja Sama

Diana ES Sutikno

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi (RAPK) Kepala Biro Kerja Sama Tahun 2019

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diana ES Sutikno, S.IP, M.Si, LL.M
Jabatan : Kepala Biro Kerja Sama
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dra. Elin Herlina, Apt, MP
Jabatan : Sekretaris Utama
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dra. Elin Herlina, Apt, MP	Diana ES Sutikno, S.IP, M.Si, LL.M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO KERJA SAMA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama	61
2.	Meningkatnya kerja sama BPOM	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM	71%
		Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM	91
3.	Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Indeks kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan	60
4.	Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)	Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan	3
5.	Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015 - 2019	Nilai AKIP Biro Kerja Sama	81

Kegiatan:

Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM:	Rp 7.525.900.000
001. Kerjasama yang difasilitasi	Rp 6.025.900.000
002. Penguatan fungsi regulatori pengawasan obat dan makanan di negara selatan-selatan	Rp 1.500.000.000

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dra. Elin Herlina, Apt, MP	Diana ES Sutikno, S.IP, M.Si, LL.M

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BIRO KERJA SAMA
TAHUN 2019

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
			B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
1.	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	-	-	-	61				
2.	Meningkatnya kerja sama BPOM	Persentase kerja sama yang ditindak lanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM	16%	35%	50%	71%				
		Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM	10	30	60	91				
3.	Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Indeks kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan	-	-	-	60				
4.	Terselenggara nya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)	Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan	-	1	2	3				
5.	Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015 - 2019	Nilai AKIP Biro Kerja Sama	-	-	-	81				

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

Dra. Elin Herlina, Apt, MP

Pihak Pertama

Diana ES Sutikno, S.IP, M.Si, LL.M

4. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diana ES Sutikno, S.IP, M.Si, LL.M
Jabatan : Kepala Biro Kerja Sama
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dra. Elin Herlina, Apt, MP
Jabatan : Sekretaris Utama
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 April 2019

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dra. Elin Herlina, Apt, MP	Diana ES Sutikno, S.IP, M.Si, LL.M

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO KERJA SAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama	80
2	Meningkatnya kerja sama BPOM	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM	71 %
		Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM	91
3	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	80 %
4	Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori BPOM	1
5	Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)	Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan	3
6	Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015 - 2019	Nilai AKIP Biro Kerja Sama	81

Kegiatan:

Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM:	Rp 7.525.900.000
001. Kerja Sama yang difasilitasi	Rp 6.025.900.000
002. Penguatan fungsi regulatori pengawasan obat dan makanan di negara selatan-selatan	Rp 1.500.000.000

Jakarta, 15 April 2019

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dra. Elin Herlina, Apt, MP	Diana ES Sutikno, S.IP, M.Si, LL.M

REVISI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BIRO KERJA SAMA
TAHUN 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
			B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
1.	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	-	-	-	61				
2.	Meningkatnya kerja sama BPOM	Persentase kerja sama yang ditindak lanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM	10%	30%	50%	71%				
		Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM	10	30	60	91				
3	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu				95 %				
		Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu				80 %				
3.	Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Indeks kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan	-	-	-	60				
4.	Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)	Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan	-	1	2	3				
5.	Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015 - 2019	Nilai AKIP Biro Kerja Sama	-	-	-	81				

Jakarta, 15 April 2019

Pihak Kedua

Dra. Elin Herlina, Apt, MP

Pihak Pertama

Diana ES Sutikno, S.IP, M.Si, LL.M

Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Kegiatan

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Biro Kerja Sama
Tahun Anggaran : 2019

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM**		**Rp 7.525.900.000**	**Rp 7.509.180.269**	**99,78%**
	Peningkatan penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	**Kerjasama yang difasilitasi [Base Line]**	**Rp 6.025.900.000**	**Rp 6.011.440.417**	**99,76%**
1.	Operasional Biro Kerja Sama	*Input:*			
		Dana	Rp 407.835.000	Rp 401.626.713	98,48%
		Output:	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Jumlah Laporan kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen			
Meningkatnya Kerja Sama BPOM		-			
1.	Koordinasi Lintas Sektor/Interkementerian dan Pertemuan Bilateral dengan Mitra di Dalam dan Luar Negeri	*Input:*			
		Dana	Rp 1.198.860.000	Rp 1.198.676.882	99,98%
		Output:	4 laporan	4 laporan	100,00%
		Jumlah Laporan Koordinasi Lintas Sektor/Interkementerian dan Pertemuan Bilateral dengan Mitra di Dalam dan Luar Negeri			
2.	Workshop/Seminar/ Sosialisasi Isu-isu Kerja Sama Bilateral	*Input:*			
		Dana	Rp 69.745.000	Rp 69.674.650	99,90%
		Output:	2 laporan	2 laporan	100,00%

		Jumlah Laporan Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-isu Kerja Sama Bilateral			
3.	Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Regional dan Multilateral di Dalam dan Luar Negeri	*Input:*			
		Dana	Rp 904.866.000	Rp 904.119.880	99,92%
		Output:	4 laporan	4 laporan	100,00%
		Jumlah laporan Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Regional dan Multilateral di Dalam dan Luar Negeri			
4.	Workshop/Seminar/ Sosialisasi Isu-Isu Kerja Sama Regional dan Multilateral	*Input:*			
		Dana	Rp 547.297.000	Rp 546.918.086	99,93%
		Output:	2 laporan	2 laporan	100%
		Jumlah laporan Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerja Sama Regional dan Multilateral			
5.	Dukungan Pertemuan Codex	*Input:*			
		Dana	Rp 427.899.000	Rp 427.804.464	99,98%
		Output:	1 laporan	1 laporan	100%
		Jumlah laporan pertemuan Codex			
6.	Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Kerja Sama Dalam Negeri	*Input:*			
		Dana	Rp 223.850.000	Rp 218.504.595	97,61%
		Output:	1 workshop	1 workshop	100,00%
		Jumlah workshop yang diselenggarakan			
7.	Pertemuan Regional dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri	*Input:*			
		Dana	Rp 1.156.975.000	Rp 1.156.879.820	99,99%
		Output:	3 pertemuan	3 pertemuan	100%
		Jumlah pertemuan egional dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri			

8.	Penyusunan Kajian, Posisi,dan Penjajakan Kerja Sama Bilateral	*Input:*			
		Dana	Rp 343.332.000	Rp 343.231.588	99,97%
		Output:	14 Laporan	19 Laporan	136%
		Jumlah kertas/dokumen posisi kerjasama bilateral			
9.	Penyusunan Kajian dan Posisi Badan POM dalam Kerja Sama Regional dan Multilateral	*Input:*			
		Dana	Rp 173.216.000	Rp 173.073.133	99,92%
		Output:	20 Laporan	20 Laporan	100,00%
		Jumlah kertas/dokumen posisi kerjasama regional dan multilateral			
10.	Penyusunan Kajian dan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri	*Input:*			
		Dana	Rp 90.100.000	Rp 90.070.832	99,97%
		Output:	57 dokumen	70 dokumen	122,81%
		Jumlah kertas/dokumen /MoU posisi kerjasama dalam negeri			
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan		-			
Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015-2019		-			
1.	Peningkatan Kompetensi Biro Kerja Sama	*Input:*			
		Dana	Rp 239.016.000	Rp 238.481.000	99,78%
		Output:	2 laporan	2 laporan	100,00%
		Jumlah Peningkatan Kompetensi Biro Kerja Sama			
2.	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Biro Kerja Sama	*Input:*			
		Dana	Rp 242.909.000	Rp 242.378.774	99,78%
		Output:	2 laporan	2 laporan	100%
		Tersusunnya Laporan Tahunan dan LAKIP Biro			

		Kerja Sama tahun 2019			
Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional		**Penguatan fungsi regulatori pengawasan obat dan makanan di negara Selatan-selatan (Baseline)**	**Rp 1.500.000.000**	**Rp 1.497.739.852**	**99,85%**
Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)		-			
1.	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di Timor Leste-Pasifik	*Input:*			
		Dana	Rp 284.218.000	Rp 284.179.187	99,99%
		Output:	1 Negara	1 Negara	100%
		Jumlah laporan negara yang mendapat Peningkatan Kapasitas dengan Negara di Timor Leste-Pasifik			
2.	Peningkatan Kapasitas dengan Negara-negara OKI	*Input:*			
		Dana	Rp 1.074.200.000	Rp 1.072.637.665	99,85%
		Output:	1 Negara	1 Negara	100,00%
		Jumlah laporan negara yang mendapat Peningkatan Kapasitas dengan Negara-negara OKI			
3.	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di mitra Asia/Afrika	*Input:*			
		Dana	Rp 141.582.000	Rp 140.923.000	99,53%
		Output:	1 Negara	1 Negara	100%
		Jumlah laporan negara yang mendapat Peningkatan Kapasitas dengan Negara di Mitra Asia/Afrika			

Lampiran 6. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN
BIRO KERJA SAMA
TAHUN 2019

No	SASARAN	Kegiatan		Rata-Rata % Capaian Target Indikator		IE	SE	Kategori	TE
		No	Uraian	Input	Output				
1	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama		**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM**						
			Peningkatan penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM						
	Meningkatnya Kerja Sama BPOM	1	Operasional Biro Kerja Sama	0,98	1,00	1,02	1,00	efisien	0,015
		2	Koordinasi Lintas Sektor/Interkementerian dan Pertemuan Bilateral dengan Mitra di Dalam dan Luar Negeri	1,00	1,00	1,00	1,00	efisien	0,000
		3	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-isu Kerja Sama Bilateral	1,00	1,00	1,00	1,00	efisien	0,001
		4	Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Regional dan Multilateral di Dalam dan Luar Negeri	1,00	1,00	1,00	1,00	efisien	0,001
		5	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerja Sama Regional dan Multilateral	1,00	1,00	1,00	1,00	efisien	0,001
		6	Dukungan Pertemuan Codex	1,00	1,00	1,00	1,00	efisien	0,000
		7	Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Kerja Sama Dalam Negeri	0,98	1,00	1,02	1,00	efisien	0,024

No	SASARAN	Kegiatan		Rata-Rata % Capaian Target Indikator		IE	SE	Kategori	TE
		No	Uraian	Input	Output				
		8	Pertemuan Regional dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri	1,00	1,36	1,36	1,00	efisien	0,357
		9	Penyusunan Kajian, Posisi, dan Penjajakan Kerja Sama Bilateral	1,00	1,36	1,36	1,00	efisien	0,358
		10	Penyusunan Kajian dan Posisi Badan POM dalam Kerja Sama Regional dan Multilateral	1,00	1,23	1,23	1,00	efisien	0,229
		11	Penyusunan Kajian dan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri	1,00	1,23	1,23	1,00	efisien	0,228
	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan								
	Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015-2019								
		12	Peningkatan Kompetensi Biro Kerja Sama	1,00	1,00	1,00	1,00	efisien	0,002
		13	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Biro Kerja Sama	1,00	1,00	1,00	1,00	efisien	0,002
	Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional		Penguatan fungsi regulatori pengawasan obat dan makanan di negara Selatan-selatan (*Baseline*)						

No	SASARAN	Kegiatan		Rata-Rata % Capaian Target Indikator		IE	SE	Kategori	TE
		No	Uraian	Input	Output				
	Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)								
		14	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di Timor Leste-Pasifik	1,00	1,00	1,00	1,00	efisien	0,002
		15	Peningkatan Kapasitas dengan Negara-negara OKI	1,00	1,00	1,00	1,00	efisien	0,001
		16	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di mitra Asia/Afrika	1,00	1,00	1,00	1,00	efisien	0,005

TABEL MONITORING - EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN KEGIATAN
SAMPAI DENGAN BULAN JANUARI 2019

NAMA SATUAN KERJA : Sekretaris Utama
TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	METODE PENGADAAN 1 Lelang Umum/ Seleksi Umum 2 Lelang Terbatas/ Seleksi Terbatas 3 Pemilihan langsung/ Seleksi Langsung 4 Penunjukan Langsung	REALISASI					HAMBATAN DAN KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
				FISIK			KEUANGAN				
				Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	%	Rupiah (Rp)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyusunan Kajian, Posisi,dan Penjajakan Kerja Sama Bilateral	343.332.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	14 Laporan	1 Laporan	7,14%	19.939.910	5,81%	Lemahnya pemantauan pelaksanaan kegiatan	Januari s.d. Desember	
2	Koordinasi Lintas Sektor/Interkementerian dan Pertemuan Bilateral dengan Mitra di Dalam dan Luar Negeri	1.198.860.000	Swakelola	4 Laporan	1 Laporan	25,00%	472.052.694	39,38%		Januari s.d. Oktober	
3	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-isu Kerja Sama Bilateral	69.745.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	2 Laporan	0 Laporan	0,00%	-	0,00%		Januari s.d. Desember	
4	Penyusunan Kajian dan Posisi Badan POM dalam Kerja Sama Regional dan Multilateral	173.216.000	Swakelola	20 Laporan	1 Laporan	5,00%	2.159.000	1,25%		Januari s.d. Desember	
5	Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Regional dan Multilateral di Dalam dan Luar Negeri	904.866.000	Swakelola	4 Laporan	0 Laporan	0,00%	450.000	0,05%		Februari s.d. Desember	
6	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerja Sama Regional dan Multilateral	547.297.000	Swakelola	2 Laporan	0 Laporan	0,00%	-	0,00%		Januari s.d. Desember	
7	Dukungan Pertemuan Codex	427.899.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	-	0,00%		Januari s.d. Desember	
8	Penyusunan Kajian dan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri	90.100.000	Swakelola	57 Dokumen	1 Dokumen	1,75%	4.009.000	4,45%		Agustus	
9	Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Kerja Sama Dalam Negeri	223.850.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	1 workshop	0 workshop	0,00%	1.800.000	0,80%		September	
10	Pertemuan Regional dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri	1.156.975.000	Swakelola	3 Pertemuan	0 Pertemuan	0,00%	-	0,00%		Januari s.d. Desember	
11	Operasional Biro Kerja Sama	407.835.000	Swakelola	12 Laporan	1 Laporan	8,33%	11.836.095	2,90%		Januari s.d. Desember	
12	Peningkatan Kompetensi Biro Kerja Sama	239.016.000	Swakelola	2 Laporan	0 Laporan	0,00%	-	0,00%		Januari s.d. Desember	

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	METODE PENGADAAN 1 Lelang Umum/ Seleksi Umum 2 Lelang Terbatas/ Seleksi Terbatas 3 Pemilihan langsung/ Seleksi Langsung 4 Penunjukan Langsung	REALISASI					HAMBATAN DAN KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
				FISIK			KEUANGAN				
				Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	%	Rupiah (Rp)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Biro Kerja Sama	242.909.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	2 Laporan	1 Laporan	50,00%	4.682.500	1,93%	Lemahnya pemantauan pelaksanaan kegiatan	April, Agustus dan Desember	
14	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di Timor Leste-Pasifik	284.218.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	-	0,00%		April, Juli, November	
15	Peningkatan Kapasitas dengan Negara-negara OKI	1.074.200.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	-	0,00%		Mei	
16	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di mitra Asia/Afrika	141.582.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	-	0,00%		Mei	
	TOTAL	**7.525.900.000**					**516.929.199**	**6,87%**			

TABEL MONITORING - EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN KEGIATAN
SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI 2019

NAMA SATUAN KERJA : Sekretaris Utama
TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	METODE PENGADAAN 1 Lelang Umum/ Seleksi Umum 2 Lelang Terbatas/ Seleksi Terbatas 3 Pemilihan langsung/ Seleksi Langsung 4 Penunjukan Langsung	REALISASI					HAMBATAN DAN KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
				FISIK			KEUANGAN				
				Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	%	Rupiah (Rp)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyusunan Kajian, Posisi,dan Penjajakan Kerja Sama Bilateral	343.332.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	14 Laporan	2 Laporan	14,29%	28.965.910	8,44%	1. Lambatnya pencairan dana 2. Kurangnya koordinasi dengan penanggung jawab kegiatan 3. Lemahnya pemantauan pelaksanaan kegiatan	Januari s.d. Desember	
2	Koordinasi Lintas Sektor/Interkementerian dan Pertemuan Bilateral dengan Mitra di Dalam dan Luar Negeri	1.198.860.000	Swakelola	4 Laporan	1 Laporan	25,00%	494.271.694	41,23%		Januari s.d. Oktober	
3	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-isu Kerja Sama Bilateral	69.745.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	2 Laporan	0 Laporan	0,00%	-	0,00%		Januari s.d. Desember	
4	Penyusunan Kajian dan Posisi Badan POM dalam Kerja Sama Regional dan Multilateral	173.216.000	Swakelola	20 Laporan	2 Laporan	10,00%	3.839.000	2,22%		Januari s.d. Desember	
5	Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Regional dan Multilateral di Dalam dan Luar Negeri	904.866.000	Swakelola	4 Laporan	0 Laporan	0,00%	70.509.872	7,79%		Februari s.d. Desember	
6	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerja Sama Regional dan Multilateral	547.297.000	Swakelola	2 Laporan	0 Laporan	0,00%	-	0,00%		Januari s.d. Desember	
7	Dukungan Pertemuan Codex	427.899.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	1.186.000	0,28%		Januari s.d. Desember	
8	Penyusunan Kajian dan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri	90.100.000	Swakelola	57 Dokumen	5 Dokumen	8,77%	5.809.000	6,45%		Agustus	
9	Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Kerja Sama Dalam Negeri	223.850.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	1 workshop	0 workshop	0,00%	16.811.740	7,51%		September	
10	Pertemuan Regional dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri	1.156.975.000	Swakelola	3 Pertemuan	0 Pertemuan	0,00%	-	0,00%		Januari s.d. Desember	
11	Operasional Biro Kerja Sama	407.835.000	Swakelola	12 Laporan	1 Laporan	8,33%	24.457.799	6,00%		Januari s.d. Desember	
12	Peningkatan Kompetensi Biro Kerja Sama	239.016.000	Swakelola	2 Laporan	0 Laporan	0,00%	-	0,00%		Januari s.d. Desember	

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	METODE PENGADAAN 1 Lelang Umum/ Seleksi Umum 2 Lelang Terbatas/ Seleksi Terbatas 3 Pemilihan langsung/ Seleksi Langsung 4 Penunjukan Langsung	REALISASI					HAMBATAN DAN KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
				FISIK			KEUANGAN				
				Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	%	Rupiah (Rp)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Biro Kerja Sama	242.909.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	2 Laporan	0 Laporan	0,00%	8.223.296	3,39%		April, Agustus dan Desember	
14	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di Timor Leste-Pasifik	284.218.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	-	0,00%		April, Juli, November	
15	Peningkatan Kapasitas dengan Negara-negara OKI	1.074.200.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	-	0,00%		Mei	
16	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di mitra Asia/Afrika	141.582.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	-	0,00%		Mei	
	TOTAL	**7.525.900.000**					**654.074.311**	**8,69%**			

TABEL MONITORING - EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN KEGIATAN
SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2019

NAMA SATUAN KERJA : **Sekretaris Utama**
TAHUN ANGGARAN : **2019**

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	METODE PENGADAAN 1 Lelang Umum/ Seleksi Umum 2 Lelang Terbatas/ Seleksi Terbatas 3 Pemilihan langsung/ Seleksi Langsung 4 Penunjukan Langsung	REALISASI					HAMBATAN DAN KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
				FISIK			KEUANGAN				
				Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	%	Rupiah (Rp)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyusunan Kajian, Posisi,dan Penjajakan Kerja Sama Bilateral	343.332.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	14 Laporan	2 Laporan	14,29%	54.277.910	15,81%	1. Lemahnya pemantauan pelaksanaan kegiatan	Januari s.d. Desember	
2	Koordinasi Lintas Sektor/Interkementerian dan Pertemuan Bilateral dengan Mitra di Dalam dan Luar Negeri	1.198.860.000	Swakelola	4 Laporan	1 Laporan	25,00%	519.618.254	43,34%		Januari s.d. Oktober	
3	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-isu Kerja Sama Bilateral	69.745.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	2 Laporan	0 Laporan	0,00%	17.360.000	24,89%		Januari s.d. Desember	
4	Penyusunan Kajian dan Posisi Badan POM dalam Kerja Sama Regional dan Multilateral	173.216.000	Swakelola	20 Laporan	2 Laporan	10,00%	11.876.000	6,86%		Januari s.d. Desember	
5	Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Regional dan Multilateral di Dalam dan Luar Negeri	904.866.000	Swakelola	4 Laporan	0 Laporan	0,00%	162.076.950	17,91%		Februari s.d. Desember	
6	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerja Sama Regional dan Multilateral	547.297.000	Swakelola	2 Laporan	0 Laporan	0,00%	-	0,00%		Januari s.d. Desember	
7	Dukungan Pertemuan Codex	427.899.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	1.186.000	0,28%		Januari s.d. Desember	
8	Penyusunan Kajian dan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri	90.100.000	Swakelola	57 Dokumen	7 Dokumen	12,28%	10.309.000	11,44%		Agustus	
9	Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Kerja Sama Dalam Negeri	223.850.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	1 workshop	0 workshop	0,00%	26.417.740	11,80%		September	
10	Pertemuan Regional dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri	1.156.975.000	Swakelola	3 Pertemuan	0 Pertemuan	0,00%	15.665.000	1,35%		Januari s.d. Desember	
11	Operasional Biro Kerja Sama	407.835.000	Swakelola	12 Laporan	2 Laporan	16,67%	67.055.138	16,44%		Januari s.d. Desember	
12	Peningkatan Kompetensi Biro Kerja Sama	239.016.000	Swakelola	2 Laporan	0 Laporan	0,00%	1.808.000	0,76%		Januari s.d. Desember	
13	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Biro Kerja Sama	242.909.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	2 Laporan	0 Laporan	0,00%	33.792.551	13,91%		April, Agustus dan Desember	

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	METODE PENGADAAN 1 Lelang Umum/ Seleksi Umum 2 Lelang Terbatas/ Seleksi Terbatas 3 Pemilihan langsung/ Seleksi Langsung 4 Penunjukan Langsung	REALISASI					HAMBATAN DAN KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
				FISIK			KEUANGAN				
				Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	%	Rupiah (Rp)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di Timor Leste-Pasifik	284.218.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	-	0,00%	1. Lemahnya pemantauan pelaksanaan kegiatan	April, Juli, November	
15	Peningkatan Kapasitas dengan Negara-negara OKI	1.074.200.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	-	0,00%		Mei	
16	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di mitra Asia/Afrika	141.582.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	-	0,00%		Mei	
	TOTAL	**7.525.900.000**					**921.442.543**	**12,24%**			

TABEL MONITORING - EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN KEGIATAN
SAMPAI DENGAN BULAN APRIL 2019

NAMA SATUAN KERJA : **Sekretaris Utama**
TAHUN ANGGARAN : **2019**

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	METODE PENGADAAN 1 Lelang Umum/ Seleksi Umum 2 Lelang Terbatas/ Seleksi Terbatas 3 Pemilihan langsung/ Seleksi Langsung 4 Penunjukan Langsung	REALISASI					HAMBATAN DAN KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
				FISIK			KEUANGAN				
				Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	%	Rupiah (Rp)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyusunan Kajian, Posisi,dan Penjajakan Kerja Sama Bilateral	343.332.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	14 Laporan	4 Laporan	28,57%	54.277.910	15,81%	Lemahnya pemantauan pelaksanaan kegiatan	Januari s.d. Desember	
2	Koordinasi Lintas Sektor/Interkementerian dan Pertemuan Bilateral dengan Mitra di Dalam dan Luar Negeri	1.198.860.000	Swakelola	4 Laporan	2 Laporan	50,00%	522.919.154	43,62%		Januari s.d. Oktober	
3	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-isu Kerja Sama Bilateral	69.745.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	2 Laporan	0 Laporan	0,00%	33.270.000	47,70%		Januari s.d. Desember	
4	Penyusunan Kajian dan Posisi Badan POM dalam Kerja Sama Regional dan Multilateral	173.216.000	Swakelola	20 Laporan	3 Laporan	15,00%	11.876.000	6,86%		Januari s.d. Desember	
5	Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Regional dan Multilateral di Dalam dan Luar Negeri	904.866.000	Swakelola	4 Laporan	1 Laporan	25,00%	249.642.680	27,59%		Februari s.d. Desember	
6	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerja Sama Regional dan Multilateral	547.297.000	Swakelola	2 Laporan	0 Laporan	0,00%	-	0,00%		Januari s.d. Desember	
7	Dukungan Pertemuan Codex	427.899.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	178.788.394	41,78%		Januari s.d. Desember	
8	Penyusunan Kajian dan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri	90.100.000	Swakelola	57 Dokumen	23 Dokumen	40,35%	10.309.000	11,44%		Agustus	
9	Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Kerja Sama Dalam Negeri	223.850.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	1 workshop	0 workshop	0,00%	44.423.340	19,85%		September	
10	Pertemuan Regional dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri	1.156.975.000	Swakelola	3 Pertemuan	0 Pertemuan	0,00%	183.064.000	15,82%		Januari s.d. Desember	
11	Operasional Biro Kerja Sama	407.835.000	Swakelola	12 Laporan	3 Laporan	25,00%	82.373.138	20,20%		Januari s.d. Desember	
12	Peningkatan Kompetensi Biro Kerja Sama	239.016.000	Swakelola	2 Laporan	0 Laporan	0,00%	1.808.000	0,76%		Januari s.d. Desember	
13	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Biro Kerja Sama	242.909.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	2 Laporan	0 Laporan	0,00%	33.792.551	13,91%		April, Agustus dan Desember	

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	METODE PENGADAAN 1 Lelang Umum/ Seleksi Umum 2 Lelang Terbatas/ Seleksi Terbatas 3 Pemilihan langsung/ Seleksi Langsung 4 Penunjukan Langsung	REALISASI					HAMBATAN DAN KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
				FISIK			KEUANGAN				
				Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	%	Rupiah (Rp)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di Timor Leste-Pasifik	284.218.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	-	0,00%	Lemahnya pemantauan pelaksanaan kegiatan	April, Juli, November	
15	Peningkatan Kapasitas dengan Negara-negara OKI	1.074.200.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	-	0,00%		Mei	
16	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di mitra Asia/Afrika	141.582.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	-	0,00%		Mei	
	TOTAL	**7.525.900.000**					**1.406.544.167**	**18,69%**			

TABEL MONITORING - EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN KEGIATAN
SAMPAI DENGAN BULAN MEI 2019

NAMA SATUAN KERJA : Sekretaris Utama
TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	METODE PENGADAAN 1 Lelang Umum/ Seleksi Umum 2 Lelang Terbatas/ Seleksi Terbatas 3 Pemilihan langsung/ Seleksi Langsung 4 Penunjukan Langsung	REALISASI					HAMBATAN DAN KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
				FISIK			KEUANGAN				
				Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	%	Rupiah (Rp)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyusunan Kajian, Posisi,dan Penjajakan Kerja Sama Bilateral	343.332.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	14 Laporan	5 Laporan	35,71%	72.148.910	21,01%	Lemahnya pemantauan pelaksanaan kegiatan	Januari s.d. Desember	
2	Koordinasi Lintas Sektor/Interkementerian dan Pertemuan Bilateral dengan Mitra di	1.198.860.000	Swakelola	4 Laporan	2 Laporan	50,00%	779.801.688	65,05%		Januari s.d. Oktober	
3	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-isu Kerja Sama Bilateral	69.745.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	2 Laporan	1 Laporan	50,00%	33.270.000	47,70%		Januari s.d. Desember	
4	Penyusunan Kajian dan Posisi Badan POM dalam Kerja Sama Regional dan Multilateral	173.216.000	Swakelola	20 Laporan	3 Laporan	15,00%	48.379.500	27,93%		Januari s.d. Desember	
5	Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Regional dan Multilateral di Dalam	904.866.000	Swakelola	4 Laporan	1 Laporan	25,00%	265.956.380	29,39%		Februari s.d. Desember	
6	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerja Sama Regional dan Multilateral	547.297.000	Swakelola	2 Laporan	0 Laporan	0,00%	1.768.000	0,32%		Januari s.d. Desember	
7	Dukungan Pertemuan Codex	427.899.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	211.939.364	49,53%		Januari s.d. Desember	
8	Penyusunan Kajian dan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri	90.100.000	Swakelola	57 Dokumen	27 Dokumen	47,37%	17.754.000	19,70%		Agustus	
9	Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Kerja Sama Dalam Negeri	223.850.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	1 workshop	0 workshop	0,00%	45.923.340	20,52%		September	
10	Pertemuan Regional dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri	1.156.975.000	Swakelola	3 Pertemuan	0 Pertemuan	0,00%	195.155.895	16,87%		Januari s.d. Desember	
11	Operasional Biro Kerja Sama	407.835.000	Swakelola	12 Laporan	5 Laporan	41,67%	123.889.234	30,38%		Januari s.d. Desember	

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	METODE PENGADAAN 1 Lelang Umum/ Seleksi Umum 2 Lelang Terbatas/ Seleksi Terbatas 3 Pemilihan langsung/ Seleksi Langsung 4 Penunjukan Langsung	REALISASI					HAMBATAN DAN KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
				FISIK			KEUANGAN				
				Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	%	Rupiah (Rp)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Peningkatan Kompetensi Biro Kerja Sama	239.016.000	Swakelola	2 Laporan	0 Laporan	0,00%	10.308.000	4,31%	Lemahnya pemantauan pelaksanaan kegiatan	Januari s.d. Desember	
13	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Biro Kerja Sama	242.909.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	2 Laporan	0 Laporan	0,00%	78.557.051	32,34%		April, Agustus dan Desember	
14	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di Timor Leste-Pasifik	284.218.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	65.975.862	23,21%		April, Juli, November	
15	Peningkatan Kapasitas dengan Negara-negara OKI	1.074.200.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	-	0,00%		Mei	
16	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di mitra Asia/Afrika	141.582.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	-	0,00%		Mei	
	TOTAL	**7.525.900.000**					**1.950.827.224**	**25,92%**			

TABEL MONITORING - EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN KEGIATAN
SAMPAI DENGAN BULAN JUNI 2019

NAMA SATUAN KERJA : **Sekretaris Utama**
TAHUN ANGGARAN : **2019**

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	METODE PENGADAAN 1 Lelang Umum/ Seleksi Umum 2 Lelang Terbatas/ Seleksi Terbatas 3 Pemilihan langsung/ Seleksi Langsung 4 Penunjukan Langsung	REALISASI					HAMBATAN DAN KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
				FISIK			KEUANGAN				
				Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	%	Rupiah (Rp)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyusunan Kajian, Posisi,dan Penjajakan Kerja Sama Bilateral	343.332.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	14 Laporan	6 Laporan	42,86%	105.386.378	30,70%	1. Lambatnya pencairan dana 2. Kurangnya koordinasi dengan penanggung jawab kegiatan 3. Lemahnya pemantauan pelaksanaan kegiatan	Januari s.d. Desember	
2	Koordinasi Lintas Sektor/Interkementerian dan Pertemuan Bilateral dengan Mitra di Dalam dan Luar Negeri	1.198.860.000	Swakelola	4 Laporan	2 Laporan	50,00%	786.764.688	65,63%		Januari s.d. Oktober	
3	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-isu Kerja Sama Bilateral	69.745.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	2 Laporan	1 Laporan	50,00%	33.270.000	47,70%		Januari s.d. Desember	
4	Penyusunan Kajian dan Posisi Badan POM dalam Kerja Sama Regional dan Multilateral	173.216.000	Swakelola	20 Laporan	8 Laporan	40,00%	73.158.500	42,24%		Januari s.d. Desember	
5	Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Regional dan Multilateral di Dalam dan Luar Negeri	904.866.000	Swakelola	4 Laporan	1 Laporan	25,00%	342.149.697	37,81%		Februari s.d. Desember	
6	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerja Sama Regional dan Multilateral	547.297.000	Swakelola	2 Laporan	0 Laporan	0,00%	1.768.000	0,32%		Januari s.d. Desember	
7	Dukungan Pertemuan Codex	427.899.000	Swakelola	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	402.550.664	94,08%		Januari s.d. Desember	
8	Penyusunan Kajian dan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri	90.100.000	Swakelola	57 Dokumen	27 Dokumen	47,37%	30.511.332	33,86%		Agustus	
9	Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Kerja Sama Dalam Negeri	223.850.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	1 workshop	0 workshop	0,00%	94.414.340	42,18%		September	
10	Pertemuan Regional dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri	1.156.975.000	Swakelola	3 Pertemuan	0 Pertemuan	0,00%	285.227.495	24,65%		Januari s.d. Desember	
11	Operasional Biro Kerja Sama	407.835.000	Swakelola	12 Laporan	6 Laporan	50,00%	138.629.242	33,99%		Januari s.d. Desember	
12	Peningkatan Kompetensi Biro Kerja Sama	239.016.000	Swakelola	2 Laporan	0 Laporan	0,00%	10.308.000	4,31%		Januari s.d. Desember	
13	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Biro Kerja Sama	242.909.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	2 Laporan	0 Laporan	0,00%	78.908.051	32,48%		April, Agustus dan Desember	

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	METODE PENGADAAN 1 Lelang Umum/ Seleksi Umum 2 Lelang Terbatas/ Seleksi Terbatas 3 Pemilihan langsung/ Seleksi Langsung 4 Penunjukan Langsung	REALISASI					HAMBATAN DAN KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
				FISIK			KEUANGAN				
				Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	%	Rupiah (Rp)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di Timor Leste-Pasifik	284.218.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	148.359.362	52,20%		April, Juli, November	
15	Peningkatan Kapasitas dengan Negara-negara OKI	1.074.200.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	3.086.250	0,29%		Mei	
16	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di mitra Asia/Afrika	141.582.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	1.791.000	1,26%		Mei	
	TOTAL	**7.525.900.000**					**2.536.282.999**	**33,70%**			

TABEL MONITORING - EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN KEGIATAN
SAMPAI DENGAN BULAN JULI 2019

NAMA SATUAN KERJA : Sekretaris Utama
TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	METODE PENGADAAN 1 Lelang Umum/ Seleksi Umum 2 Lelang Terbatas/ Seleksi Terbatas 3 Pemilihan langsung/ Seleksi Langsung 4 Penunjukan Langsung	REALISASI					HAMBATAN DAN KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
				FISIK			KEUANGAN				
				Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	%	Rupiah (Rp)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyusunan Kajian, Posisi,dan Penjajakan Kerja Sama Bilateral	343.332.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	14 Laporan	7 Laporan	50,00%	109.486.378	31,89%	Lemahnya pemantauan pelaksanaan kegiatan	Januari s.d. Desember	
2	Koordinasi Lintas Sektor/Interkementerian dan Pertemuan Bilateral dengan Mitra di Dalam dan Luar Negeri	1.198.860.000	Swakelola	4 Laporan	3 Laporan	75,00%	924.320.978	77,10%		Januari s.d. Oktober	
3	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-isu Kerja Sama Bilateral	69.745.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	2 Laporan	1 Laporan	50,00%	33.270.000	47,70%		Januari s.d. Desember	
4	Penyusunan Kajian dan Posisi Badan POM dalam Kerja Sama Regional dan Multilateral	173.216.000	Swakelola	20 Laporan	11 Laporan	55,00%	95.308.500	55,02%		Januari s.d. Desember	
5	Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Regional dan Multilateral di Dalam dan Luar Negeri	904.866.000	Swakelola	4 Laporan	1 Laporan	25,00%	348.854.157	38,55%		Februari s.d. Desember	
6	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerja Sama Regional dan Multilateral	547.297.000	Swakelola	2 Laporan	0 Laporan	0,00%	25.143.000	4,59%		Januari s.d. Desember	
7	Dukungan Pertemuan Codex	427.899.000	Swakelola	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	402.550.664	94,08%		Januari s.d. Desember	
8	Penyusunan Kajian dan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri	90.100.000	Swakelola	57 Dokumen	33 Dokumen	57,89%	53.901.332	59,82%		Agustus	
9	Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Kerja Sama Dalam Negeri	223.850.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	1 workshop	0 workshop	0,00%	94.414.340	42,18%		September	
10	Pertemuan Regional dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri	1.156.975.000	Swakelola	3 Pertemuan	1 Pertemuan	33,33%	668.015.920	57,74%		Januari s.d. Desember	
11	Operasional Biro Kerja Sama	407.835.000	Swakelola	12 Laporan	7 Laporan	58,33%	173.999.987	42,66%		Januari s.d. Desember	
12	Peningkatan Kompetensi Biro Kerja Sama	239.016.000	Swakelola	2 Laporan	0 Laporan	0,00%	10.308.000	4,31%		Januari s.d. Desember	
13	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Biro Kerja Sama	242.909.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	2 Laporan	0 Laporan	0,00%	78.908.051	32,48%		April, Agustus dan Desember	

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	METODE PENGADAAN 1 Lelang Umum/ Seleksi Umum 2 Lelang Terbatas/ Seleksi Terbatas 3 Pemilihan langsung/ Seleksi Langsung 4 Penunjukan Langsung	REALISASI					HAMBATAN DAN KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
				FISIK			KEUANGAN				
				Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	%	Rupiah (Rp)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di Timor Leste-Pasifik	284.218.000	Swakelola	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	271.376.287	95,48%	Lemahnya pemantauan pelaksanaan kegiatan	April, Juli, November	
15	Peningkatan Kapasitas dengan Negara-negara OKI	1.074.200.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	26.166.250	2,44%		Mei	
16	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di mitra Asia/Afrika	141.582.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	1.791.000	1,26%		Mei	
	TOTAL	**7.525.900.000**					**3.317.814.844**	**44,09%**			

TABEL MONITORING - EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN KEGIATAN
SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2019

NAMA SATUAN KERJA : Sekretaris Utama
TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	METODE PENGADAAN 1 Lelang Umum/ Seleksi Umum 2 Lelang Terbatas/ Seleksi Terbatas 3 Pemilihan langsung/ Seleksi Langsung 4 Penunjukan Langsung	REALISASI					HAMBATAN DAN KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
				FISIK			KEUANGAN				
				Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	%	Rupiah (Rp)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyusunan Kajian, Posisi,dan Penjajakan Kerja Sama Bilateral	343.332.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	14 Laporan	9 Laporan	64,29%	120.236.378	35,02%	Lemahnya pemantauan pelaksanaan kegiatan	Januari s.d. Desember	
2	Koordinasi Lintas Sektor/Interkementerian dan Pertemuan Bilateral dengan Mitra di Dalam dan Luar Negeri	1.198.860.000	Swakelola	4 Laporan	3 Laporan	75,00%	963.336.328	80,35%		Januari s.d. Oktober	
3	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-isu Kerja Sama Bilateral	69.745.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	2 Laporan	1 Laporan	50,00%	38.498.355	55,20%		Januari s.d. Desember	
4	Penyusunan Kajian dan Posisi Badan POM dalam Kerja Sama Regional dan Multilateral	173.216.000	Swakelola	20 Laporan	12 Laporan	60,00%	109.810.000	63,39%		Januari s.d. Desember	
5	Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Regional dan Multilateral di Dalam dan Luar Negeri	904.866.000	Swakelola	4 Laporan	1 Laporan	25,00%	362.649.697	40,08%		Februari s.d. Desember	
6	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerja Sama Regional dan Multilateral	547.297.000	Swakelola	2 Laporan	1 Laporan	50,00%	364.800.111	66,65%		Januari s.d. Desember	
7	Dukungan Pertemuan Codex	427.899.000	Swakelola	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	427.804.464	99,98%		Januari s.d. Desember	
8	Penyusunan Kajian dan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri	90.100.000	Swakelola	57 Dokumen	41 Dokumen	71,93%	74.766.332	82,98%		Agustus	
9	Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Kerja Sama Dalam Negeri	223.850.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	1 workshop	0 workshop	0,00%	99.661.340	44,52%		September	
10	Pertemuan Regional dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri	1.156.975.000	Swakelola	3 Pertemuan	1 Pertemuan	33,33%	771.178.420	66,65%		Januari s.d. Desember	
11	Operasional Biro Kerja Sama	407.835.000	Swakelola	12 Laporan	8 Laporan	66,67%	184.891.393	45,33%		Januari s.d. Desember	
12	Peningkatan Kompetensi Biro Kerja Sama	239.016.000	Swakelola	2 Laporan	1 Laporan	50,00%	188.508.000	78,87%		Januari s.d. Desember	
13	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Biro Kerja Sama	242.909.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	2 Laporan	0 Laporan	0,00%	80.433.311	33,11%		April, Agustus dan Desember	

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	METODE PENGADAAN 1 Lelang Umum/ Seleksi Umum 2 Lelang Terbatas/ Seleksi Terbatas 3 Pemilihan langsung/ Seleksi Langsung 4 Penunjukan Langsung	REALISASI					HAMBATAN DAN KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
				FISIK			KEUANGAN				
				Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	%	Rupiah (Rp)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di Timor Leste-Pasifik	284.218.000	Swakelola	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	278.450.187	97,97%	Lemahnya pemantauan pelaksanaan kegiatan	April, Juli, November	
15	Peningkatan Kapasitas dengan Negara-negara OKI	1.074.200.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	26.463.750	2,46%		Mei	
16	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di mitra Asia/Afrika	141.582.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	1.791.000	1,26%		Mei	
	TOTAL	**7.525.900.000**					**4.093.279.066**	**54,39%**			

TABEL MONITORING - EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN KEGIATAN
SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2019

NAMA SATUAN KERJA : **Sekretaris Utama**
TAHUN ANGGARAN : **2019**

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	METODE PENGADAAN 1 Lelang Umum/ Seleksi Umum 2 Lelang Terbatas/ Seleksi Terbatas 3 Pemilihan langsung/ Seleksi Langsung 4 Penunjukan Langsung	REALISASI							HAMBATAN DAN KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
				FISIK					KEUANGAN				
				Target (Satuan)		Realisasi (Satuan)		%	Rupiah (Rp)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyusunan Kajian, Posisi,dan Penjajakan Kerja Sama Bilateral	343.332.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	14	Laporan	9	Laporan	64,29%	177.139.278	51,59%	Lemahnya pemantauan pelaksanaan kegiatan	Januari s.d. Desember	
2	Koordinasi Lintas Sektor/Interkementerian dan Pertemuan Bilateral dengan Mitra di Dalam dan Luar Negeri	1.198.860.000	Swakelola	4	Laporan	3	Laporan	75,00%	970.179.528	80,93%		Januari s.d. Oktober	
3	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-isu Kerja Sama Bilateral	69.745.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	2	Laporan	1	Laporan	50,00%	46.676.355	66,92%		Januari s.d. Desember	
4	Penyusunan Kajian dan Posisi Badan POM dalam Kerja Sama Regional dan Multilateral	173.216.000	Swakelola	20	Laporan	14	Laporan	70,00%	124.215.000	71,71%		Januari s.d. Desember	
5	Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Regional dan Multilateral di Dalam dan Luar Negeri	904.866.000	Swakelola	4	Laporan	1	Laporan	25,00%	365.154.697	40,35%		Februari s.d. Desember	
6	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerja Sama Regional dan Multilateral	547.297.000	Swakelola	2	Laporan	1	Laporan	50,00%	420.177.036	76,77%		Januari s.d. Desember	
7	Dukungan Pertemuan Codex	427.899.000	Swakelola	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	427.804.464	99,98%		Januari s.d. Desember	
8	Penyusunan Kajian dan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri	90.100.000	Swakelola	57	Dokumen	47	Dokumen	82,46%	82.766.332	91,86%		Agustus	
9	Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Kerja Sama Dalam Negeri	223.850.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	1	workshop	0	workshop	0,00%	109.789.079	49,05%		September	
10	Pertemuan Regional dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri	1.156.975.000	Swakelola	3	Pertemuan	2	Pertemuan	66,67%	1.036.780.420	89,61%		Januari s.d. Desember	
11	Operasional Biro Kerja Sama	407.835.000	Swakelola	12	Laporan	9	Laporan	75,00%	231.488.202	56,76%		Januari s.d. Desember	
12	Peningkatan Kompetensi Biro Kerja Sama	239.016.000	Swakelola	2	Laporan	1	Laporan	50,00%	188.508.000	78,87%		Januari s.d. Desember	
13	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Biro Kerja Sama	242.909.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	2	Laporan	0	Laporan	0,00%	88.696.511	36,51%		April, Agustus dan Desember	

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	METODE PENGADAAN 1 Lelang Umum/ Seleksi Umum 2 Lelang Terbatas/ Seleksi Terbatas 3 Pemilihan langsung/ Seleksi Langsung 4 Penunjukan Langsung	REALISASI					HAMBATAN DAN KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
				FISIK			KEUANGAN				
				Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	%	Rupiah (Rp)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di Timor Leste-Pasifik	284.218.000	Swakelola	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	278.450.187	97,97%	Lemahnya pemantauan pelaksanaan kegiatan	April, Juli, November	
15	Peningkatan Kapasitas dengan Negara-negara OKI	1.074.200.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	745.841.734	69,43%		Mei	
16	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di mitra Asia/Afrika	141.582.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	1.791.000	1,26%		Mei	
	TOTAL	**7.525.900.000**					**5.295.457.823**	**70,36%**			

TABEL MONITORING - EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN KEGIATAN
SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER 2019

NAMA SATUAN KERJA : **Sekretaris Utama**
TAHUN ANGGARAN : **2019**

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	METODE PENGADAAN 1 Lelang Umum/ Seleksi Umum 2 Lelang Terbatas/ Seleksi Terbatas 3 Pemilihan langsung/ Seleksi Langsung 4 Penunjukan Langsung	REALISASI					HAMBATAN DAN KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
				FISIK			KEUANGAN				
				Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	%	Rupiah (Rp)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyusunan Kajian, Posisi,dan Penjajakan Kerja Sama Bilateral	343.332.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	14 Laporan	9 Laporan	64,29%	199.290.388	58,05%	1. Lambatnya pencairan dana 2. Kurangnya koordinasi dengan penanggung jawab kegiatan 3. Lemahnya pemantauan pelaksanaan kegiatan	Januari s.d. Desember	
2	Koordinasi Lintas Sektor/Interkementerian dan Pertemuan Bilateral dengan Mitra di Dalam dan Luar Negeri	1.198.860.000	Swakelola	4 Laporan	3 Laporan	75,00%	1.113.497.580	92,88%		Januari s.d. Oktober	
3	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-isu Kerja Sama Bilateral	69.745.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	2 Laporan	1 Laporan	50,00%	54.617.955	78,31%		Januari s.d. Desember	
4	Penyusunan Kajian dan Posisi Badan POM dalam Kerja Sama Regional dan Multilateral	173.216.000	Swakelola	20 Laporan	16 Laporan	80,00%	135.907.000	78,46%		Januari s.d. Desember	
5	Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Regional dan Multilateral di Dalam dan Luar Negeri	904.866.000	Swakelola	4 Laporan	1 Laporan	25,00%	380.122.569	42,01%		Februari s.d. Desember	
6	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerja Sama Regional dan Multilateral	547.297.000	Swakelola	2 Laporan	1 Laporan	50,00%	435.517.168	79,58%		Januari s.d. Desember	
7	Dukungan Pertemuan Codex	427.899.000	Swakelola	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	427.804.464	99,98%		Januari s.d. Desember	
8	Penyusunan Kajian dan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri	90.100.000	Swakelola	57 Dokumen	61 Dokumen	107,02%	85.971.332	95,42%		Agustus	
9	Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Kerja Sama Dalam Negeri	223.850.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	1 workshop	0 workshop	0,00%	146.948.129	65,65%		September	
10	Pertemuan Regional dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri	1.156.975.000	Swakelola	3 Pertemuan	2 Pertemuan	66,67%	1.056.879.820	91,35%		Januari s.d. Desember	
11	Operasional Biro Kerja Sama	407.835.000	Swakelola	12 Laporan	10 Laporan	83,33%	274.690.827	67,35%		Januari s.d. Desember	
12	Peningkatan Kompetensi Biro Kerja Sama	239.016.000	Swakelola	2 Laporan	1 Laporan	50,00%	188.508.000	78,87%		Januari s.d. Desember	
13	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Biro Kerja Sama	242.909.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	2 Laporan	1 Laporan	50,00%	90.336.511	37,19%		April, Agustus dan Desember	

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	METODE PENGADAAN 1 Lelang Umum/ Seleksi Umum 2 Lelang Terbatas/ Seleksi Terbatas 3 Pemilihan langsung/ Seleksi Langsung 4 Penunjukan Langsung	REALISASI					HAMBATAN DAN KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
				FISIK			KEUANGAN				
				Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	%	Rupiah (Rp)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di Timor Leste-Pasifik	284.218.000	Swakelola	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	279.810.187	98,45%		April, Juli, November	
15	Peningkatan Kapasitas dengan Negara-negara OKI	1.074.200.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	928.566.950	86,44%		Mei	
16	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di mitra Asia/Afrika	141.582.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	1.791.000	1,26%		Mei	
	TOTAL	**7.525.900.000**					**5.800.259.880**	**77,07%**			

TABEL MONITORING - EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN KEGIATAN
SAMPAI DENGAN BULAN NOVEMBER 2019

NAMA SATUAN KERJA : **Sekretaris Utama**
TAHUN ANGGARAN : **2019**

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	METODE PENGADAAN 1 Lelang Umum/ Seleksi Umum 2 Lelang Terbatas/ Seleksi Terbatas 3 Pemilihan langsung/ Seleksi Langsung 4 Penunjukan Langsung	REALISASI					HAMBATAN DAN KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
				FISIK			KEUANGAN				
				Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	%	Rupiah (Rp)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyusunan Kajian, Posisi,dan Penjajakan Kerja Sama Bilateral	343.332.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	14 Laporan	10 Laporan	71,43%	244.598.888	71,24%	Lemahnya pemantauan pelaksanaan kegiatan	Januari s.d. Desember	
2	Koordinasi Lintas Sektor/Interkementerian dan Pertemuan Bilateral dengan Mitra di Dalam dan Luar Negeri	1.198.860.000	Swakelola	4 Laporan	3 Laporan	75,00%	1.184.002.568	98,76%		Januari s.d. Oktober	
3	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-isu Kerja Sama Bilateral	69.745.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	2 Laporan	1 Laporan	50,00%	67.742.150	97,13%		Januari s.d. Desember	
4	Penyusunan Kajian dan Posisi Badan POM dalam Kerja Sama Regional dan Multilateral	173.216.000	Swakelola	20 Laporan	17 Laporan	85,00%	138.223.000	79,80%		Januari s.d. Desember	
5	Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Regional dan Multilateral di Dalam dan Luar Negeri	904.866.000	Swakelola	4 Laporan	2 Laporan	50,00%	447.725.519	49,48%		Februari s.d. Desember	
6	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerja Sama Regional dan Multilateral	547.297.000	Swakelola	2 Laporan	1 Laporan	50,00%	530.583.086	96,95%		Januari s.d. Desember	
7	Dukungan Pertemuan Codex	427.899.000	Swakelola	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	427.804.464	99,98%		Januari s.d. Desember	
8	Penyusunan Kajian dan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri	90.100.000	Swakelola	57 Dokumen	70 Dokumen	122,81%	86.446.832	95,95%		Agustus	
9	Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Kerja Sama Dalam Negeri	223.850.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	1 workshop	0 workshop	0,00%	209.820.315	93,73%		September	
10	Pertemuan Regional dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri	1.156.975.000	Swakelola	3 Pertemuan	2 Pertemuan	66,67%	1.056.879.820	91,35%		Januari s.d. Desember	
11	Operasional Biro Kerja Sama	407.835.000	Swakelola	12 Laporan	11 Laporan	91,67%	367.489.117	90,11%		Januari s.d. Desember	
12	Peningkatan Kompetensi Biro Kerja Sama	239.016.000	Swakelola	2 Laporan	1 Laporan	50,00%	188.508.000	78,87%		Januari s.d. Desember	
13	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Biro Kerja Sama	242.909.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	2 Laporan	1 Laporan	50,00%	112.877.311	46,47%		April, Agustus dan Desember	

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	METODE PENGADAAN 1 Lelang Umum/ Seleksi Umum 2 Lelang Terbatas/ Seleksi Terbatas 3 Pemilihan langsung/ Seleksi Langsung 4 Penunjukan Langsung	REALISASI					HAMBATAN DAN KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
				FISIK			KEUANGAN				
				Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	%	Rupiah (Rp)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di Timor Leste-Pasifik	284.218.000	Swakelola	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	279.810.187	98,45%		April, Juli, November	
15	Peningkatan Kapasitas dengan Negara-negara OKI	1.074.200.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	928.566.950	86,44%		Mei	
16	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di mitra Asia/Afrika	141.582.000	Swakelola	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	1.791.000	1,26%		Mei	
	TOTAL	**7.525.900.000**					**5.800.259.880**	**77,07%**			

TABEL MONITORING - EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN KEGIATAN
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2019

NAMA SATUAN KERJA : **Sekretaris Utama**
TAHUN ANGGARAN : **2019**

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	METODE PENGADAAN 1 Lelang Umum/ Seleksi Umum 2 Lelang Terbatas/ Seleksi Terbatas 3 Pemilihan langsung/ Seleksi Langsung 4 Penunjukan Langsung	REALISASI					HAMBATAN DAN KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
				FISIK			KEUANGAN				
				Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	%	Rupiah (Rp)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyusunan Kajian, Posisi,dan Penjajakan Kerja Sama Bilateral	343.332.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	14 Laporan	14 Laporan	100,00%	343.231.588	99,97%	Lemahnya pemantauan pelaksanaan kegiatan	Januari s.d. Desember	
2	Koordinasi Lintas Sektor/Interkementerian dan Pertemuan Bilateral dengan Mitra di Dalam dan Luar Negeri	1.198.860.000	Swakelola	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	1.198.676.882	99,98%		Januari s.d. Oktober	
3	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-isu Kerja Sama Bilateral	69.745.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	69.674.650	99,90%		Januari s.d. Desember	
4	Penyusunan Kajian dan Posisi Badan POM dalam Kerja Sama Regional dan Multilateral	173.216.000	Swakelola	20 Laporan	20 Laporan	100,00%	173.073.133	99,92%		Januari s.d. Desember	
5	Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Regional dan Multilateral di Dalam dan Luar Negeri	904.866.000	Swakelola	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	904.119.880	99,92%		Februari s.d. Desember	
6	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerja Sama Regional dan Multilateral	547.297.000	Swakelola	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	546.918.086	99,93%		Januari s.d. Desember	
7	Dukungan Pertemuan Codex	427.899.000	Swakelola	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	427.804.464	99,98%		Januari s.d. Desember	
8	Penyusunan Kajian dan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri	90.100.000	Swakelola	57 Dokumen	70 Dokumen	122,81%	90.070.832	99,97%		Agustus	
9	Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Kerja Sama Dalam Negeri	223.850.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	1 workshop	1 workshop	100,00%	218.504.595	97,61%		September	
10	Pertemuan Regional dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri	1.156.975.000	Swakelola	3 Pertemuan	3 Pertemuan	100,00%	1.156.879.820	99,99%		Januari s.d. Desember	
11	Operasional Biro Kerja Sama	407.835.000	Swakelola	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	401.626.713	98,48%		Januari s.d. Desember	
12	Peningkatan Kompetensi Biro Kerja Sama	239.016.000	Swakelola	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	238.481.000	99,78%		Januari s.d. Desember	
13	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Biro Kerja Sama	242.909.000	Swakelola dan Pemilihan Langsung	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	242.378.774	99,78%		April, Agustus dan Desember	

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	METODE PENGADAAN 1 Lelang Umum/ Seleksi Umum 2 Lelang Terbatas/ Seleksi Terbatas 3 Pemilihan langsung/ Seleksi Langsung 4 Penunjukan Langsung	REALISASI					HAMBATAN DAN KENDALA	RENCANA TINDAK LANJUT	KET
				FISIK			KEUANGAN				
				Target (Satuan)	Realisasi (Satuan)	%	Rupiah (Rp)	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di Timor Leste-Pasifik	284.218.000	Swakelola	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	284.179.187	99,99%	Lemahnya pemantauan pelaksanaan kegiatan	April, Juli, November	
15	Peningkatan Kapasitas dengan Negara-negara OKI	1.074.200.000	Swakelola	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1.072.637.665	99,85%		Mei	
16	Peningkatan Kapasitas dengan Negara di mitra Asia/Afrika	141.582.000	Swakelola	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	140.923.000	99,53%		Mei	
	TOTAL	**7.525.900.000**					**7.509.180.269**	**99,78%**			

Lampiran 7. Hasil pengukuran survei kepuasan Internal layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama Tahun 2019

Survey ditujukan untuk menilai 3 layanan Biro Kerja Sama, yaitu:

A. Layanan Penyiapan Bahan Kerja Sama (bobot 35%)

B. Layanan Penyelesaian Naskah Kerja Sama (MoU/PKS) (Bobot 35%)

C. Layanan Penyelesaian Surat Persetujuan (SP) dan Exit Permit (bobot 30%)

Kriteria yang dinilai meliputi:

1. Kemudahan mendapatkan informasi (melalui web site, media sosial, nota dinas, surat-surat, pedoman, dll)]
2. Kejelasan informasi yang disampaikan baik lisan maupun tulisan (surat menyurat atau memo) whatsapp)
4. Hasil Layanan
5. Ketepatan Waktu Layanan
6. Kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) personil dalam memberikan layanan kepada pelanggan/users
7. Kecepatan menganggapi keluhan
8. Kemampuan menyelesaikan masalah yang disampaikan
9. Kerapihan penampilan personel
10. Sikap dan keramahan personil dalam memberikan layanan

Penilaian:

SM = "Sangat Memuaskan" dengan bobot: 10

M = "Memuaskan" dengan bobot 8,5

C = "Cukup" dengan bobot 7,5

TM = "Tidak memuaskan" dengan bobot 6,5

STM = "Sangat tidak Memuaskan dengan bobot 5

Lampiran 8. Rekap Hasil Survei Kepuasan Internal Biro Kerja Sama

No	A. Penyiapan Bahan Kerja Sama					B. Penyelesaian MoU/PKS					C. Penyelesaian SP dan Exit Permit					REKAP					Indeks
	SM	M	C	TM	STM	SM	M	C	TM	STM	SM	M	C	TM	STM	SM	M	C	TM	STM	
1	0	2	6	1	0	0	3	7	0	0	0	4	6	0	0	0,0	25,5	47,5	2,2	0,0	**75,2**
2	0	9	1	0	0	0	9	1	0	0	0	10	0	0	0	0,0	79,3	5,0	0,0	0,0	**84,0**
3	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
4	0	3	3	4	0	0	3	3	4	0	0	7	3	0	0	0,0	36,8	22,5	17,3	0,0	**70,7**
5	0	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	4	6	0	0	0,0	39,7	40,0	0,0	0,0	**77,1**
6	0	10	0	0	0	0	4	6	0	0	0	10	0	0	0	0,0	68,0	15,0	0,0	0,0	**81,9**
7	0	9	1	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	82,2	2,5	0,0	0,0	**84,5**
8	0	8	2	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0,0	22,7	55,0	0,0	0,0	**74,2**
9	0	0	7	3	0	0	0	10	0	0	0	5	5	0	0	0,0	14,2	55,0	6,5	0,0	**70,2**
10	0	9	1	0	0	0	10	0	0	0	0	8	2	0	0	0,0	76,5	7,5	0,0	0,0	**83,6**
11	0	7	3	0	0	0	10	0	0	0	1	6	3	0	0	3,3	65,2	15,0	0,0	0,0	**82,5**
12	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
13	0	9	1	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	82,2	2,5	0,0	0,0	**84,5**
14	0	9	1	0	0	0	6	4	0	0	2	8	0	0	0	6,7	65,2	12,5	0,0	0,0	**83,3**
15	0	0	2	8	0	0	0	3	7	0	0	0	10	0	0	0,0	0,0	37,5	32,5	0,0	**59,5**
16	0	4	6	0	0	0	2	5	3	0	0	0	10	0	0	0,0	17,0	52,5	6,5	0,0	**71,1**
17	1	6	3	0	0	0	10	0	0	0	1	9	0	0	0	6,7	70,8	7,5	0,0	0,0	**84,4**
18	0	10	0	0	0	0	9	1	0	0	0	10	0	0	0	0,0	82,2	2,5	0,0	0,0	**84,5**
19	9	1	0	0	0	2	8	0	0	0	9	1	0	0	0	66,7	28,3	0,0	0,0	0,0	**94,8**
20	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
21	4	5	0	0	0	4	6	0	0	0	0	0	3	7	0	26,7	31,2	7,5	15,2	0,0	**80,5**
22	0	1	6	3	0	0	1	5	4	0	0	4	5	1	0	0,0	17,0	40,0	17,3	0,0	**74,3**
23	0	3	7	0	0	0	4	6	0	0	0	5	5	0	0	0,0	34,0	45,0	0,0	0,0	**79,0**

No	A. Penyiapan Bahan Kerja Sama					B. Penyelesaian MoU/PKS					C. Penyelesaian SP dan Exit Permit					REKAP					Indeks
	SM	M	C	TM	STM	SM	M	C	TM	STM	SM	M	C	TM	STM	SM	M	C	TM	STM	
24	0	9	1	0	0	0	10	0	0	0	0	8	2	0	0	0,0	76,5	7,5	0,0	0,0	**84,0**
25	0	2	4	4	0	0	2	5	3	0	0	2	6	2	0	0,0	17,0	37,5	19,5	0,0	**74,0**
26	2	8	0	0	0	2	8	0	0	0	2	8	0	0	0	20,0	68,0	0,0	0,0	0,0	**88,0**
27	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**100,0**
28	3	7	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	10,0	76,5	0,0	0,0	0,0	**86,5**
29	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	**75,0**
30	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
31	0	9	1	0	0	0	9	1	0	0	0	10	0	0	0	0,0	79,3	5,0	0,0	0,0	**84,3**
32	0	7	1	1	0	0	8	1	1	0	0	8	1	1	0	0,0	65,2	7,5	6,5	0,0	**79,2**
33	0	2	8	0	0	0	4	6	0	0	0	4	6	0	0	0,0	28,3	50,0	0,0	0,0	**78,3**
34	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	**75,0**
35	0	0	0	9	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0,0	0,0	0,0	62,8	0,0	**62,8**
36	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
37	0	6	4	0	0	0	6	4	0	0	0	6	4	0	0	0,0	51,0	30,0	0,0	0,0	**81,0**
38	2	3	5	0	0	2	5	3	0	0	0	10	0	0	0	13,3	51,0	20,0	0,0	0,0	**84,3**
39	9	1	0	0	0	8	2	0	0	0	10	0	0	0	0	90,0	8,5	0,0	0,0	0,0	**98,5**
40	2	3	5	0	0	3	4	3	0	0	1	5	4	0	0	20,0	34,0	30,0	0,0	0,0	**84,0**
41	3	7	0	0	0	3	7	0	0	0	2	7	0	0	0	26,7	59,5	0,0	0,0	0,0	**86,2**
42	0	9	1	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	82,2	2,5	0,0	0,0	**84,7**
43	0	0	3	7	0	0	0	3	7	0	0	0	0	10	0	0,0	0,0	15,0	52,0	0,0	**67,0**
44	0	4	6	0	0	0	5	5	0	0	0	6	4	0	0	0,0	42,5	37,5	0,0	0,0	**80,0**
45	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
46	0	0	10	0	0	0	2	8	0	0	0	2	8	0	0	0,0	11,3	65,0	0,0	0,0	**76,3**
47	0	1	3	6	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0,0	2,8	7,5	56,3	0,0	**66,7**
48	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	**75,0**

No	A. Penyiapan Bahan Kerja Sama					B. Penyelesaian MoU/PKS					C. Penyelesaian SP dan Exit Permit					REKAP					Indeks
	SM	M	C	TM	STM	SM	M	C	TM	STM	SM	M	C	TM	STM	SM	M	C	TM	STM	
49	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
50	0	4	6	0	0	0	4	6	0	0	0	4	6	0	0	0,0	34,0	45,0	0,0	0,0	**79,0**
51	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	**65,0**
52	0	3	7	0	0	0	3	7	0	0	0	7	3	0	0	0,0	36,8	42,5	0,0	0,0	**79,3**
53	0	6	4	0	0	0	6	4	0	0	0	3	7	0	0	0,0	42,5	37,5	0,0	0,0	**80,0**
54	0	7	3	0	0	0	7	3	0	0	0	5	5	0	0	0,0	53,8	27,5	0,0	0,0	**81,3**
55	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
56	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
57	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	**75,0**
58	6	4	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	20,0	68,0	0,0	0,0	0,0	**88,0**
59	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0,0	56,7	0,0	21,7	0,0	**78,3**
60	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
61	1	6	3	0	0	1	7	2	0	0	0	10	0	0	0	6,7	65,2	12,5	0,0	0,0	**84,3**
62	1	4	5	0	0	0	4	6	0	0	0	4	6	0	0	3,3	34,0	42,5	0,0	0,0	**79,8**
63	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
64	0	7	3	0	0	0	9	1	0	0	0	9	1	0	0	0,0	70,8	12,5	0,0	0,0	**83,3**
65	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	**75,0**
66	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	**75,0**
67	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
68	5	4	1	0	0	7	3	0	0	0	4	6	0	0	0	53,3	36,8	2,5	0,0	0,0	**92,7**
69	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	**75,0**
70	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	**75,0**
71	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	**75,0**
72	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
73	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**100,0**

No	A. Penyiapan Bahan Kerja Sama					B. Penyelesaian MoU/PKS					C. Penyelesaian SP dan Exit Permit					REKAP					Indeks
	SM	M	C	TM	STM	SM	M	C	TM	STM	SM	M	C	TM	STM	SM	M	C	TM	STM	
74	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
75	1	7	2	0	0	0	3	7	0	0	0	9	1	0	0	3,3	53,8	25,0	0,0	0,0	**82,2**
76	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**100,0**
77	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0,0	28,3	50,0	0,0	0,0	**78,3**
78	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	5	5	0	0,0	0,0	62,5	10,8	0,0	**73,3**
79	0	7	3	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0,0	19,8	57,5	0,0	0,0	**77,3**
80	4	6	0	0	0	6	4	0	0	0	6	4	0	0	0	53,3	39,7	0,0	0,0	0,0	**93,0**
81	5	5	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	83,3	14,2	0,0	0,0	0,0	**97,5**
82	2	7	1	0	0	0	8	1	0	0	0	9	1	0	0	6,7	68,0	7,5	0,0	0,0	**82,2**
83	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	**75,0**
84	10	0	0	0	0	9	0	0	0	0	10	0	0	0	0	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	**96,7**
85	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**100,0**
86	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	**75,0**
87	1	9	0	0	0	1	9	0	0	0	1	9	0	0	0	10,0	76,5	0,0	0,0	0,0	**86,5**
88	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	8	2	0	0	0	26,7	62,3	0,0	0,0	0,0	**89,0**
89	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	**75,0**
90	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**100,0**
91	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
92	0	6	4	0	0	0	6	4	0	0	0	4	6	0	0	0,0	45,3	35,0	0,0	0,0	**80,3**
93	8	2	0	0	0	3	7	0	0	0	0	10	0	0	0	36,7	53,8	0,0	0,0	0,0	**90,5**
94	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
95	0	0	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	1	9	0	0,0	0,0	27,5	41,2	0,0	**68,7**
96	0	9	1	0	0	0	10	0	0	0	0	6	4	0	0	0,0	70,8	12,5	0,0	0,0	**83,3**
97	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
98	0	6	4	0	0	0	8	2	0	0	0	6	4	0	0	0,0	56,7	25,0	0,0	0,0	**81,7**

No	A. Penyiapan Bahan Kerja Sama					B. Penyelesaian MoU/PKS					C. Penyelesaian SP dan Exit Permit					REKAP					Indeks
	SM	M	C	TM	STM	SM	M	C	TM	STM	SM	M	C	TM	STM	SM	M	C	TM	STM	
99	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
100	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
101	0	8	2	0	0	0	5	5	0	0	0	7	3	0	0	0,0	56,7	25,0	0,0	0,0	**81,7**
102	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
103	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
104	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
105	0	7	3	0	0	0	7	3	0	0	0	7	3	0	0	0,0	59,5	22,5	0,0	0,0	**82,0**
106	0	10	0	0	0	0	9	1	0	0	0	4	6	0	0	0,0	65,2	17,5	0,0	0,0	**82,7**
107	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
108	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
109	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**100,0**
110	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	**75,0**
111	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	**75,0**
112	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
113	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0,0	56,7	25,0	0,0	0,0	**81,7**
114	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	1	9	0	0	0,0	31,2	47,5	0,0	0,0	**78,7**
115	0	0	9	0	1	0	0	2	8	0	0	0	10	0	0	0,0	0,0	52,5	17,3	1,7	**71,5**
116	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
117	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
118	1	6	3	0	0	0	9	1	0	0	6	4	0	0	0	23,3	53,8	10,0	0,0	0,0	**87,2**
119	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
120	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	**75,0**
121	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
122	0	0	5	5	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0,0	0,0	62,5	10,8	0,0	**73,3**
123	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	**75,0**

No	A. Penyiapan Bahan Kerja Sama					B. Penyelesaian MoU/PKS					C. Penyelesaian SP dan Exit Permit					REKAP					Indeks
	SM	M	C	TM	STM	SM	M	C	TM	STM	SM	M	C	TM	STM	SM	M	C	TM	STM	
124	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
125	0	7	3	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	76,5	7,5	0,0	0,0	**84,0**
126	0	6	2	1	0	0	6	2	0	0	0	10	0	0	0	0,0	62,3	10,0	2,2	0,0	**74,5**
127	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
128	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
129	0	10	0	0	0	1	9	0	0	0	0	10	0	0	0	3,3	82,2	0,0	0,0	0,0	**85,5**
130	0	0	10	0	0	0	1	9	0	0	0	0	10	0	0	0,0	2,8	72,5	0,0	0,0	**75,3**
131	2	7	0	0	0	0	9	0	0	0	1	9	0	0	0	10,0	70,8	0,0	0,0	0,0	**80,8**
132	0	8	2	0	0	0	9	1	0	0	0	0	10	0	0	0,0	48,2	32,5	0,0	0,0	**80,7**
133	3	7	0	0	0	4	6	0	0	0	3	7	0	0	0	33,3	56,7	0,0	0,0	0,0	**90,0**
134	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	**75,0**
135	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
136	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	**75,0**
137	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
138	0	8	2	0	0	0	8	2	0	0	0	7	3	0	0	0,0	65,2	17,5	0,0	0,0	**82,7**
139	4	6	0	0	0	5	5	0	0	0	9	1	0	0	0	60,0	34,0	0,0	0,0	0,0	**94,0**
140	0	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	10	0	0	0	0,0	56,7	25,0	0,0	0,0	**81,7**
141	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
142	0	9	1	0	0	0	9	1	0	0	0	9	1	0	0	0,0	76,5	7,5	0,0	0,0	**84,0**
143	0	6	4	0	0	0	8	2	0	0	0	9	1	0	0	0,0	65,2	17,5	0,0	0,0	**82,7**
144	3	7	0	0	0	3	7	0	0	0	3	7	0	0	0	30,0	59,5	0,0	0,0	0,0	**89,5**
145	2	7	1	0	0	6	4	0	0	0	5	5	0	0	0	43,3	45,3	2,5	0,0	0,0	**91,2**
146	4	6	0	0	0	3	7	0	0	0	4	6	0	0	0	36,7	53,8	0,0	0,0	0,0	**90,5**
147	0	6	4	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	73,7	10,0	0,0	0,0	**83,7**
148	0	8	2	0	0	0	3	7	0	0	0	2	7	0	0	0,0	36,8	40,0	0,0	0,0	**76,8**

No	A. Penyiapan Bahan Kerja Sama					B. Penyelesaian MoU/PKS					C. Penyelesaian SP dan Exit Permit					REKAP					Indeks
	SM	M	C	TM	STM	SM	M	C	TM	STM	SM	M	C	TM	STM	SM	M	C	TM	STM	
149	0	6	4	0	0	0	7	3	0	0	0	0	10	0	0	0,0	36,8	42,5	0,0	0,0	**79,3**
150	0	9	1	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0,0	25,5	52,5	0,0	0,0	**78,0**
151	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
152	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
153	0	4	5	1	0	0	4	6	0	0	0	4	6	0	0	0,0	34,0	42,5	2,2	0,0	**78,7**
154	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	**75,0**
155	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
156	0	0	9	0	0	0	4	6	0	0	0	0	10	0	0	0,0	11,3	62,5	0,0	0,0	**73,8**
157	1	9	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	3,3	82,2	0,0	0,0	0,0	**85,5**
158	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**100,0**
159	0	8	2	0	0	0	8	2	0	0	0	7	3	0	0	0,0	65,2	17,5	0,0	0,0	**82,7**
160	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	2	8	0	0	0	6,7	79,3	0,0	0,0	0,0	**86,0**
161	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	5	5	0	0	0	16,7	70,8	0,0	0,0	0,0	**87,5**
162	7	3	0	0	0	8	2	0	0	0	8	2	0	0	0	76,7	19,8	0,0	0,0	0,0	**96,5**
163	0	0	4	6	0	0	4	6	0	0	0	6	4	0	0	0,0	28,3	35,0	13,0	0,0	**76,3**
164	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
165	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**100,0**
166	0	3	6	0	0	0	0	10	0	0	2	0	8	0	0	6,7	8,5	60,0	0,0	0,0	**75,2**
167	0	0	10	0	0	0	2	8	0	0	0	10	0	0	0	0,0	34,0	45,0	0,0	0,0	**79,0**
168	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	**75,0**
169	2	8	0	0	0	2	8	0	0	0	2	8	0	0	0	20,0	68,0	0,0	0,0	0,0	**88,0**
170	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
171	0	10	0	0	0	0	9	1	0	0	0	10	0	0	0	0,0	82,2	2,5	0,0	0,0	**84,7**
172	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	4	6	0	0	0	13,3	73,7	0,0	0,0	0,0	**87,0**
173	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**

No	A. Penyiapan Bahan Kerja Sama					B. Penyelesaian MoU/PKS					C. Penyelesaian SP dan Exit Permit					REKAP					Indeks
	SM	M	C	TM	STM	SM	M	C	TM	STM	SM	M	C	TM	STM	SM	M	C	TM	STM	
174	3	7	0	0	0	4	6	0	0	0	0	10	0	0	0	23,3	65,2	0,0	0,0	0,0	**88,5**
175	5	5	0	0	0	1	9	0	0	0	0	10	0	0	0	20,0	68,0	0,0	0,0	0,0	**88,0**
176	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
177	0	9	1	0	0	0	10	0	0	0	0	9	0	0	0	0,0	79,3	2,5	0,0	0,0	**81,8**
178	0	9	1	0	0	0	9	1	0	0	0	9	1	0	0	0,0	76,5	7,5	0,0	0,0	**84,0**
179	0	8	2	0	0	0	8	2	0	0	0	8	2	0	0	0,0	68,0	15,0	0,0	0,0	**83,0**
180	0	8	2	0	0	0	8	2	0	0	0	8	2	0	0	0,0	68,0	15,0	0,0	0,0	**83,0**
181	0	10	0	0	0	1	8	0	0	0	0	10	0	0	0	3,3	79,3	0,0	0,0	0,0	**82,7**
182	0	8	2	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	79,3	5,0	0,0	0,0	**84,3**
183	5	4	0	0	0	5	5	0	0	0	7	3	0	0	0	56,7	34,0	0,0	0,0	0,0	**90,7**
184	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
185	0	9	1	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	82,2	2,5	0,0	0,0	**84,7**
186	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	**75,0**
187	0	9	1	0	0	0	9	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	79,3	2,5	0,0	0,0	**81,8**
188	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
189	0	7	3	0	0	0	9	1	0	0	0	10	0	0	0	0,0	73,7	10,0	0,0	0,0	**83,7**
190	8	2	0	0	0	4	6	0	0	0	3	7	0	0	0	50,0	42,5	0,0	0,0	0,0	**92,5**
191	0	0	4	6	0	0	0	3	7	0	0	0	10	0	0	0,0	0,0	42,5	28,2	0,0	**70,7**
192	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**100,0**
193	0	10	0	0	0	2	8	0	0	0	0	10	0	0	0	6,7	79,3	0,0	0,0	0,0	**86,0**
194	0	1	9	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0,0	2,8	72,5	0,0	0,0	**75,3**
195	3	7	0	0	0	1	9	0	0	0	1	9	0	0	0	16,7	70,8	0,0	0,0	0,0	**87,5**
196	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	79,3	0,0	0,0	0,0	**79,3**
197	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	7	3	0	0	0,0	76,5	7,5	0,0	0,0	**84,0**
198	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**100,0**

No	A. Penyiapan Bahan Kerja Sama					B. Penyelesaian MoU/PKS					C. Penyelesaian SP dan Exit Permit					REKAP					Indeks
	SM	M	C	TM	STM	SM	M	C	TM	STM	SM	M	C	TM	STM	SM	M	C	TM	STM	
199	1	9	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	3,3	82,2	0,0	0,0	0,0	**85,5**
200	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	**85,0**
201	0	10	0	0	0	0	9	1	0	0	0	10	0	0	0	0,0	82,2	2,5	0,0	0,0	**84,7**
202	0	6	4	0	0	0	8	2	0	0	0	6	4	0	0	0,0	56,7	25,0	0,0	0,0	**81,7**
203	9	1	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	96,7	2,8	0,0	0,0	0,0	**99,5**
204	0	9	1	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0,0	82,2	2,5	0,0	0,0	**84,7**
Indeks Kepuasan Internal terhadap Layanan Biro Kerja Sama																					**80,5**

Lampiran 9. Capaian Jumlah Dokumen Kerja Sama yang ditindaklanjuti secara efektif

No	KERJA SAMA	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
	Kerja Sama Bilateral												
1	Amerika	1											
2	Arab Saudi									1			
3	Australia								1				
4	Bangladesh		1										
5	China												
6	European					1							
7	India									1			
8	Iran						1						
9	Jepang					1							
10	Kazakhstan					1							
11	Korea												
12	Maroko			1									
13	Mozambiq								1				
14	Nigeria								1				
15	Palestina										1		
16	Timor-Leste					1							
17	Turki									1			
18	Ukraina								1				
19	Yordania										1		
	Kerja Sama Regional dan Multilateral												
1	APEC-LSIF RHSC (*Life Science Innovation Forum and Convergence - Regulatory Harmonization Steering Committee*)												
2	ACCSQ PPWG (Pharmaceutical Product Working Group)						1						
3	ACCSQ TMHS-PWG (Traditional Medicines and Health Supplement Product Working Group)						1						
4	ACCSQ PFPWG (Processed Food Product Working Group)										1		
5	ASEAN Health Cluster 2 (AHC 2) - Responding to All Hazards and Emerging Threats								1				
6	ASEAN Health Cluster 3 (AHC 3) - Strengthening Health Systems and Access to Care						1						
7	ASEAN Health Cluster 4 (AHC 4) - Ensuring Food Safety.						1						
8	ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)									1			

No	KERJA SAMA	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
9	ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)					1							
10	Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).												1
11	*World Health Organization (WHO), Member States Mechanism on Substandard and Falsified Medical Products (MSM SFMP), Benchmarking*								1				
12	*World Health Assembly* (WHA)					1							
13	Pembahasan *Concept Paper* WLA						1						
14	Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)												1
15	*Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme* (PIC/S)										1		
16	*Codex Committee Contaminant in Food* (CCCF), *Codex Committee on Food Additives* (CCFA), *Codex Committee on Nutrition and Food for Special Dietary Uses* (CCNFSDU), dan *Codex Committee on Food Labelling* (CCFL)				1								
17	*World Trade Organization* (WTO) Technical Barriers to Trade (TBT), Sanitary and Phytosanotary (SPS), Trade Policy Review (TPR), Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPS);										1		
18	*Food and Agriculture Organization (FAO)*										1		
19	*World Bank*		1										
20	*Commission on Narcotics and Drugs* (CND)			1									
	Kerja Sama Dalam Negeri												
1	MoU Wirawati Catur Panca									1			
2	MoU Lembaga Administrasi Negara								1				
3	PKS Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah												1
4	PKS Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Banten												
5	KPID Provinsi Riau									1			
6	Universitas Tanjung Pura		1										
7	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten												
8	Universitas Padjajaran			1									
9	Bank Mandiri				1								
10	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut												
11	Pemerintah Kabupaten Nias Barat												
12	Pemerintah Kota Pemantangsiantar												

No	KERJA SAMA	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
13	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba												
14	Pemerintah Kabupaten Nias												
15	Kwartir Daerah Sumatera Barat				1								
16	Universitas Sahid												
17	Universitas Terbuka Batam												
18	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Riau									1			
19	Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia										1		
20	Universitas Muhammadiyah Gorontalo						1						
21	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Gorontalo				1								
22	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pulau Morotai				1								
23	Kwatir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan												
24	Universitas Wira Wacana												
25	Universitas Adiwangsa Jambi (Rektor)						1						
26	Universitas Adiwangsa Jambi (Dekan Fak. Farmasi)						1						
27	Badan Pusat Statistik												1
28	Pemerintah Kabupaten Bangka												1
29	Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura							1					
30	Universitas Islam Riau												
31	Institut Pertanian Bogor												1
32	Bina Insan Gemilang Indonesia Foundation (BIG Indonesia)												1
33	Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Barat								1				
34	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pontianak												1
35	Pemerintah Kabupaten Wonogiri												
36	PKS Institut Teknologi Bandung								1				
37	Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia									1			
38	Dharma Wanita Persatuan											1	
39	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat												
40	PKS Wirawati Catur Panca									1			
41	Pemerintah Kabupaten Karanganyar									1			
42	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan									1			
43	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Gorontalo											1	
44	Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu (KOPITU)									1			

No	KERJA SAMA	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
45	Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat									1			
46	Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Dinas Kesehatan)												1
47	Kepolisian Resor Kabupaten Indragiri Hilir										1		
48	Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun)										1		
49	Kementerian Agama										1		
50	Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA)										1		
51	PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (GOJEK)										1		
52	PT. Media Dokter Investama (HALODOC)												
53	PT. Grab Teknologi Indonesia										1		
54	PT. Bukalapak.com										1		
55	PT. Medika Komunika Teknologi (KLIKDOKTER)												
56	Tokopedia										1		
57	Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Dinas Ketahanan Pangan)										1		
58	MoU Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO)										1		
59	PKS Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO)										1		
60	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu												
61	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia												
62	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi												
63	Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bengkulu												
64	Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia											1	
65	MoU Yayasan Puteri Indonesia											1	
66	PKS Yayasan Puteri Indonesia											1	
67	Universitas Airlangga											1	
68	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Dinas Kesehatan)												1
69	AKAFARMA Aceh					1							
70	PKS BIN					1							
	Jumlah Kerja Sama Efektif	**1**	**3**	**3**	**5**	**8**	**9**	**1**	**9**	**13**	**18**	**6**	**10**
	Jumlah Kumulatif Kerja Sama Efektif	1	4	7	12	20	29	30	39	52	70	76	86

Lampiran 10. Capaian Dokumen Kerja Sama Tahun 2019

NO	KERJA SAMA	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
	Kerja Sama Bilateral												
1	Amerika	1											
2	Arab Saudi									1			
3	Australia								1				
4	Bangladesh		0,5						0,5				
5	China												1
6	European					1							
7	India									1			
8	Iran						0,5			0,5			
9	Jepang					1							
10	Kazakhstan					1							
11	Korea												1
12	Maroko			1									
13	Mozambiq								1				
14	Nigeria								1				
15	Palestina										1		
16	Timor-Leste					1							
17	Turki									1			
18	Ukraina								1				
19	Yordania										1		
	Kerja Sama Regional dan Multilateral												
1	APEC-LSIF RHSC (*Life Science Innovation Forum and Convergence - Regulatory Harmonization Steering Committee*)								1				
2	ACCSQ PPWG (Pharmaceutical Product Working Group)						1						
3	ACCSQ TMHS-PWG (Traditional Medicines and Health Supplement Product Working Group)						1						
4	ACCSQ PFPWG (Processed Food Product Working Group)										1		
5	ASEAN Health Cluster 2 (AHC 2) - Responding to All Hazards and Emerging Threats								1				
6	ASEAN Health Cluster 3 (AHC 3) - Strengthening Health Systems and Access to Care						1						
7	ASEAN Health Cluster 4 (AHC 4) - Ensuring Food Safety.						1						
8	ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)									1			
9	ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade					1							

NO	KERJA SAMA	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
	Agreement (AANZFTA)												
10	Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).												1
11	*World Health Organization (WHO), Member States Mechanism on Substandard and Falsified Medical Products (MSM SFMP), Benchmarking*								1				
12	*World Health Assembly* (WHA)					1							
13	Pembahasan *Concept Paper* WLA						1						
14	Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)												1
15	*Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme* (PIC/S)										1		
16	*Codex Committee Contaminant in Food* (CCCF), *Codex Committee on Food Additives* (CCFA), *Codex Committee on Nutrition and Food for Special Dietary Uses* (CCNFSDU), dan *Codex Committee on Food Labelling* (CCFL)				1								
17	*World Trade Organization* (WTO) Technical Barriers to Trade (TBT), Sanitary and Phytosanotary (SPS), Trade Policy Review (TPR), Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPS);										1		
18	*Food and Agriculture Organization (FAO)*										1		
19	*World Bank*		1										
20	*Commission on Narcotics and Drugs* (CND)			1									
	Kerja Sama Dalam Negeri												
1	MoU Wirawati Catur Panca	1											
2	MoU Lembaga Administrasi Negara		1										
3	PKS Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah			1									
4	PKS Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Banten		1										
5	KPID Provinsi Riau		1										
6	Universitas Tanjung Pura		1										

NO	KERJA SAMA	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
7	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten			1									
8	Universitas Padjajaran			1									
9	Bank Mandiri				1								
10	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut				1								
11	Pemerintah Kabupaten Nias Barat				1								
12	Pemerintah Kota Pemantangsiantar				1								
13	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba				1								
14	Pemerintah Kabupaten Nias				1								
15	Kwartir Daerah Sumatera Barat				1								
16	Universitas Sahid				1								
17	Universitas Terbuka Batam				1								
18	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Riau				1								
19	Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia				1								
20	Universitas Muhammadiyah Gorontalo				1								
21	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Gorontalo				1								
22	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pulau Morotai				1								
23	Kwatir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan					1							
24	Universitas Wira Wacana					1							
25	Universitas Adiwangsa Jambi (Rektor)							1					
26	Universitas Adiwangsa Jambi (Dekan Fak. Farmasi)							1					
27	Badan Pusat Statistik							1					
28	Pemerintah Kabupaten Bangka							1					
29	Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura							1					
30	Universitas Islam Riau							1					
31	Institut Pertanian Bogor								1				
32	Bina Insan Gemilang Indonesia Foundation (BIG Indonesia)								1				
33	Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Barat								1				
34	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga								1				

NO	KERJA SAMA	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
	Kota Pontianak												
35	Pemerintah Kabupaten Wonogiri								1				
36	PKS Institut Teknologi Bandung								1				
37	Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia								1				
38	Dharma Wanita Persatuan									1			
39	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat									1			
40	PKS Wirawati Catur Panca									1			
41	Pemerintah Kabupaten Karanganyar					1							
42	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan									1			
43	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Gorontalo											1	
44	Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu (KOPITU)									1			
45	Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat									1			
46	Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Dinas Kesehatan)										1		
47	Kepolisian Resor Kabupaten Indragiri Hilir										1		
48	Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun)										1		
49	Kementerian Agama										1		
50	Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA)										1		
51	PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (GOJEK)										1		
52	PT. Media Dokter Investama (HALODOC)										1		
53	PT. Grab Teknologi Indonesia										1		
54	PT. Bukalapak.com										1		
55	PT. Medika Komunika Teknologi (KLIKDOKTER)										1		
56	Tokopedia										1		
57	Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Dinas Ketahanan Pangan)										1		
58	MoU Masyarakat Anti Fitnah Indonesia										1		

NO	KERJA SAMA	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
	(MAFINDO)												
59	PKS Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO)										1		
60	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu											1	
61	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia											1	
62	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi											1	
63	Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bengkulu											1	
64	Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia											1	
65	MoU Yayasan Puteri Indonesia											1	
66	PKS Yayasan Puteri Indonesia											1	
67	Universitas Airlangga											1	
68	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Dinas Kesehatan)								1				
69	AKAFARMA Aceh					1							
70	PKS BIN				1								
	Jumlah	**2**	**5,5**	**5**	**16**	**10**	**5,5**	**6**	**15,5**	**10,5**	**20**	**9**	**3**
	Jumlah Kumulatif	**2**	**7,5**	**12,5**	**28,5**	**38,5**	**44**	**50**	**65,5**	**76**	**96**	**105**	**109**